



INDONESIA  
RUMAH  
BERSAMA

**INDONESIA  
RUMAH  
BERSAMA**

Kumpulan Makalah

Penyunting :  
Nur Khozin

Diterbitkan :  
Museum Kebangkitan Nasional  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-602-14482-3-6

Cetakan Pertama, 2013

## KATA SAMBUTAN

Komunikasi, penelitian dan konservasi merupakan fungsi dasar museum yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan oleh museum. Museum Kebangkitan Nasional terus berusaha untuk menyempurnakan pelaksanaan tiga fungsi dasar museum tersebut, sehingga visi untuk menjadikan Museum Kebangkitan Nasional sebagai wahana pendidikan sejarah kebangkitan nasional pada tahun 2018 bisa segera terwujud.

Fungsi komunikasi dalam Museum Kebangkitan Nasional salah satunya diwujudkan dengan menerbitkan buku yang berjudul INDONESIA: RUMAH BERSAMA. Buku ini merupakan seleksi kumpulan makalah seminar yang diadakan di Museum Kebangkitan Nasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Buku ini memuat informasi dan pengetahuan tentang proses terbentuknya kesadaran berbangsa dan perjuangan dalam menciptakan bangsa bangsa. Makalah-makalah dalam buku ini ditulis oleh sejarawan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia.

Meskipun materi dalam buku ini sudah diseminarkan dihadapan sejarawan, dosen, mahasiswa, guru sejarah, generasi muda dan keluarga pahlawan tidak menutup kemungkinan masih ada kesalahan, karena itu masukan dan saran masih kami perlukan demi kesempurnaan buku ini. Semoga penerbitan buku ini bisa memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang proses terbentuknya bangsa Indonesia.

Jakarta, Desember 2013

Kepala Museum Kebangkitan Nasional



**R. Tjahjopurnomo**

NIP.195912271988031001

## KATA PENGANTAR

Proses untuk menjadi bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat bukanlah hal yang mudah, karena itu sudah menjadi keharusan bagi segenap komponen bangsa untuk mempertahankannya. Perkembangan nasionalisme Indonesia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Sekolah Dokter Bumi Putera atau *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA).

Pelajar STOVIA yang berasal dari berbagai daerah tinggal bersama dalam asrama untuk waktu yang cukup lama, sehingga sekat-sekat kedaerahan diantara mereka mulai terkikis digantikan oleh kesadaran akan persamaan nasib, wilayah, budaya dan sejarah. Asrama STOVIA menjadi tempat lahir dan berkembangnya kesadaran untuk hidup bersama, karena itu gedung STOVIA menempati peran penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia.

Peran penting gedung STOVIA terus berlanjut sampai dengan saat ini. Sejak tahun 1974 gedung tersebut difungsikan sebagai tempat untuk mewariskan dan menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa, karena didalamnya terdapat Museum Kebangkitan Nasional yang menyajikan informasi tentang sejarah pergerakan bangsa Indonesia.

Museum Kebangkitan Nasional secara rutin mengadakan seminar sejarah dengan melibatkan sejarawan, dosen, mahasiswa, guru sejarah, komunitas, keluarga pahlawan dan pelajar. Museum menjadikan seminar menjadi salah satu cara dalam menyampaikan informasi kepada pengunjung. Kumpulan makalah seminar tersebut kami terbitkan dalam bentuk buku dengan judul **INDONESIA: RUMAH BERSAMA**, sehingga bisa dibaca oleh anggota masyarakat lainnya.

Kumpulan makalah dalam buku ini memiliki tema yang berbeda, sehingga dikelompokkan menjadi dua. Enam makalah pada bagian pertama buku ini dibingkai dengan tema *Konstruksi Nasionalisme Indonesia*, diawali oleh tulisan Leirissa dengan judul *Nasionalisme*. Menurutnya, kita harus memisahkan terlebih dahulu pengertian *nasionalisme* dan *nation state* sehingga akan ada pemahaman secara utuh terhadap nasionalisme. Nasionalisme Indonesia harus mencakup seluruh penduduk nusantara dan

tertanam kuat pada bagian terbesar warga negara yang membentuk suatu komunitas.

Menurut Nunus Supardi dalam tulisan yang berjudul *Relevansi Kesadaran Berbangsa dan Kesadaran Berbudaya Bangsa* konsensus untuk hidup bersama dalam ikatan bangsa Indonesia dimulai sejak berdirinya Budi Utomo dan terus berkembang pada masa-masa berikutnya. Lahirnya kesadaran untuk mejadi satu bangsa ini, mencerminkan betapa dalamnya keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk merubah statusnya menjadi bangsa.

Pemikiran yang serupa I Ketut Ardana yang menulis makalah *Pluralisme dan Faktor Global Dalam Gerakan Nasionalisme Indonesia*. Menurutnya pemikiran kebangsaan pada awalnya lahir di STOVIA, kemudian berkembang menjadi kesepakatan untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo merupakan tahap awal kebangsaan, yang menjadi semakin jelas bentuknya setelah muncul tuntutan Indonesia Merdeka dari *Indische Partij*.

*Indische Partij* merupakan organisasi politik pertama yang didirikan oleh Ernest Douwes Dekker yang mewakili kelompok Indo. Sumbangan penting *Indische Partij* bagi bangsa adalah memperkenalkan konsep kebangsaan multi etnis yang bersifat terbuka dan pluralistis. Inilah kesimpulan dari makalah Pradipto Niwandhono yang berjudul *Kaum Indo dan Nasionalisme: Hibriditas Kolonial Dalam Pembentukan Identitas Indonesia*.

Menurut Yudi Latif dalam tulisannya *Pasang Surut Kebangsaan: Masa Depan Pluralisme Indonesia*, Kongres Pemuda II tahun 1928 mempertegas bentuk nasionalisme Indonesia. Organisasi pergerakan yang semula berlatar belakang etnis maupun keagamaan mengintegrasikan diri ke dalam keindonesiaan. Komitmen kebangsaan lahir melalui proses yang sangat panjang, karena itu harus tetap dipertahankan dengan konsepsi nasionalisme positif dan progresif dalam bentuk Pancasila.

Menurut Bambang Wibawarta dalam makalah *Perubahan Dunia dan Nasionalisme Indonesia*, globalisasi melunturkan tanggung jawab sosial untuk menghidupi seluruh anggota komunitas yang akhirnya mengikis

nasionalisme. Ancaman globalisasi ini bisa diatasi dengan menjadikan semangat kebangsaan sebagai landasan dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang. Ikatan kebangsaan di Indonesia bisa diperkuat dan dipertahankan dengan mengambil landasan ketuhanan, multikulturalisme dan keadilan.

**Menjadi Indonesia** dijadikan sebagai tema bagian kedua buku ini. Menurut Haryono dalam makalah *Pendidikan Pada Masa Kolonial: Segregasi, Liberasi dan Emansipasi*, pendidikan kolonial yang diskriminatif dan segregatif menghasilkan intelektual kritis dengan komitmen kebangsaan yang sangat tinggi. Mereka inilah yang nantinya menjadi tokoh-tokoh pergerakan yang memimpin usaha mengusir penjajahan dari tanah air.

Restu Gunawan dalam makalah *Kaum Elit dan Pergerakan nasional* menyebut Intelektual kritis dengan istilah priyayi baru atau elit modern. Priyayi baru didefinisikan sebagai pegawai pemerintah yang memperoleh jabatan karena faktor pendidikan bukan keturunan. Kelompok priyayi baru bersifat lebih terbuka, sehingga mereka menjadi sumber utama berkembangnya nasionalisme.

Menurut Anhar Gonggong dalam makalah *Humanisme, Marxisme dan Nasionalisme: Konflik Ideologi Organisasi Pergerakan Dalam Mencapai Indonesia Merdeka* Intelektual kritis ini menjadi pelopor perjuangan dengan otak rasional. Organisasi-organisasi perjuangan dengan ideologi agama, nasionalis atau komunis mereka dirikan. Penerapan ideologi yang beragam ini melahirkan konflik yang berkesinambungan sejak masa pergerakan sampai dengan masa setelah kemerdekaan.

Suhartono W. Pranoto dalam makalah *Budi Utomo: Vleksibilitas Strategi Perjuangan Dari Moderat Sampai Non Kooperasi*, menegaskan peran Budi Utomo sebagai organisasi pelopor masa pergerakan nasional yang menginspirasi lahirnya organisasi pergerakan pada masa berikutnya. Sifat vleksibilitas, visioner dan prediktif Budi Utomo, menjadikan organisasi iin mampu bertahan dalam berbagai zaman.

Menurut Taufik Abdullah dalam makalah *Hari Kebangkitan Nasional* lahirnya Budi Utomo dinilai sebagai revolusi tanpa letupan keras,

karena itu pada tanggal 20 Mei 1948 pemerintah menetapkan lahirnya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada masa Orde Baru pemerintah menjadikan tanggal 20 Mei 1908 sebagai tonggak pertama proses pertumbuhan bangsa, kemudian diikuti tanggal 28 Oktober 1928 dan puncaknya tanggal 17 Agustus 1945.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi saat yang tepat untuk mengadakan instropeksi tentang kondisi bangsa. Menurut Susanto Zuhdi dalam makalah *Memaknai Peringatan Kebangkitan Nasional Dalam Kerangka Keindonesiaan*, tokoh-tokoh Budi Utomo sudah mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan dan pendidikan sebagai modal dalam membangun bangsa dan negara. Bangsa yang memiliki pemimpin yang visioner dan masyarakat yang terdidik akan memiliki komitmen kebangsaan yang teguh.

Konstruksi nasionalisme Indonesia yang dibangun dari berbagai unsur dan memerlukan waktu yang panjang berhasil melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses tersebut memerlukan pengorbanan yang tidak ternilai dari seluruh komponen bangsa, sekarang menjadi tugas kita untuk mempertahankan kebersamaan ini.

Penyunting

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I HUMANISME, MARXISME, DAN NASIONALISME :</b>	
<b>KONFLIK IDEOLOGI ORGANISASI PERGERAKAN DALAM MENCAPAI INDONESIA MERDEKA</b>	
<b>Anhar Gonggong</b> .....	1
Pendahuluan : Warga Negeri Jajahan Terdidik – Tercerahkan; Ideologi, Media Massa, dan Dialog Tampil Membangun Kesadaran Baru .....	1
Warga Terdidik—Tercerahkan :	
Membangun Kesadaran Baru untuk Membangsa .....	6
Konflik Ideologis di Antara Organisasi-Organisasi Pergerakan .....	14
Penutup : dari Konflik ke Landasan Persatuan : Pancasila .....	20
<b>BAB II PERUBAHAN DUNIA DAN NASIONALISME INDONESIA BELAJAR DARI SEJARAH JEPANG</b>	
<b>DR. Bambang Wibawarta</b> .....	23
Pendahuluan .....	23
Lokal-Global .....	25
Belajar dari Sejarah Jepang .....	28
Semangat Kebangsaan Indonesia .....	35
Penutup .....	37
Daftar Pustaka .....	39
<b>BAB III PENDIDIKAN PADA MASA KOLONIAL SEGREGASI, LIBERASI DAN EMANSIPASI</b>	
<b>Hariyono</b> .....	43
Pendidikan segregatif Sumber Ketidakadilan .....	46
Merawat Kebhinekaan dan Memperjuangkan Persamaan .....	51
Mengembangkan Kearifan Edukasi Kolonial .....	57

<b>BAB IV</b>	<b>PLURALISME DAN FAKTOR GLOBAL DALAM GERAKAN NASIONALISME DI INDONESIA</b>	
	<b>I Ketut Ardhana</b> .....	61
	Abstrak.....	61
	Pendahuluan.....	62
	Pluralisme dan Faktor-faktor Global .....	65
	Indische Party: Kebijakan Kolonial Belanda dan Ke Arah Terbentuknya Negara-Bangsa .....	71
	Indische Party: Lokalitas, Nasionalisme dan Globalisasi .....	73
	Daftar Pusaka .....	83
<b>BAB V</b>	<b>RELEVANSI KESADARAN BERBANGSA DAN KESADARAN BERBUDAYA BANGSA</b>	
	<b>Nunus Supardi</b> .....	87
	Pendahuluan.....	87
	Kesadaran Berbudaya Bangsa.....	88
	Bagaimana memperkuat kesadaran berbudaya bangsa?.....	91
	Pemakaian Bahasa Melayu di Volksraad.....	93
	Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka .....	95
	Penutup .....	97
<b>BAB VI</b>	<b>KAUM INDO DAN NASIONALISME : HIBRIDITAS KOLONIAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS INDONESIA</b>	
	<b>Pradipto Niwandhono</b> .....	99
	Pengantar.....	99
	Kaum Peranakan Eropa dan kebudayaan Indis .....	100
	Emansipasi Sosial Kaum Indo-Eropa .....	102
	Sebuah Konsep Nasionalisme Pluralistik .....	106
	Kesimpulan .....	112
	Daftar Pustaka.....	114
<b>BAB VII</b>	<b>NASIONALISME</b>	
	<b>Prof. Dr. R.Z Leirissa</b> .....	115
	KONSEPTUALISASI NATION-STATE .....	115
	Nasionalisme .....	116

NASIONALISME DALAM SEJARAH KITA .....	119
Nasionalisme lokal yang lembut .....	119
Nasionalisme yang menantang.....	119
Nasionalisme dalam masa Revolusi dan sesudahnya .....	120
KESIMPULAN.....	121
<b>BAB VIII KAUM ELIT DAN PERGERAKAN NASIONAL</b>	
<b>Restu Gunawan</b> .....	123
Dari Nasionalisme Lokal ke Nasionalisme Indonesia .....	126
Kebangkitan Kebangsaan: Sebuah Refleksi.....	131
Daftar Pustaka.....	137
<b>BAB IX MEMAKNAI PERINGATAN KEBANGKITAN NASIONAL DALAM KERANGKA KEINDONESIAAN</b>	
<b>Susanto Zuhdi</b> .....	139
Pemimpin Bangsa yang visioner adalah yang mampu “Membaca Sejarah” .....	140
Bangsa Yang Kerdil dan Lemah Ingatan?.....	142
Catatan Penutup .....	144
<b>BAB X “HARI KEBANGKITAN NASIONAL” PESAN SEJARAH DAN HARAPAN MITOS</b>	
<b>Taufik Abdullah</b> .....	147
Lahirnya sebuah organisasi modern .....	147
Sejarah dan mitos .....	149
Makna 20 Mei 1908.....	155
<b>BAB XI PASANG – SURUT KOMITMEN KEBANGSAAN : MASA DEPAN PLURALISME DI INDONESIA</b>	
<b>Yudi Latif</b> .....	163
Komitmen Kebangsaan Awal Kemerdekaan .....	167
Komitmen Kebangsaan Era Orde Baru.....	171
Komitmen Kebangsaan Era Reformasi .....	173

**HUMANISME, MARXISME, DAN NASIONALISME :**  
**KONFLIK IDEOLOGI**  
**ORGANISASI PERGERAKAN DALAM MENCAPAI**  
**INDONESIA MERDEKA\*\***

**Anhar Gonggong\*\*\***

1. **Pendahuluan : Warga Negeri Jajahan Terdidik – Tercerahkan; Ideologi, Media Massa, dan Dialog Tampil Membangun Kesadaran Baru.**

Matahari di awal abad ke- 20 memberi sinar cahayanya ke bumi negeri jajahan *Nederlandsch-indie (Hindia Belanda)*. Dengan memancarnya sinar matahari awal abad ke -20 itu, terjadi pelbagai perubahan yang membuka ruang menuju bangunan kesadaran baru warga negeri jajahan. Perubahan kebijakan dari pemerintah kolonial yang akan dijalankan di negeri jajahannya, Hindia Belanda. Salah satu kebijakan yang sangat penting ialah dilihat dari tumbuh kembangnya kesadaran baru di tengah masyarakat negeri jajahan. Kesadaran baru yang dimaksud itu menyangkut pada beberapa hal, pertama, kesadaran untuk menciptakan atau merumuskan diri sebagai bangsa baru: untuk itu diperlukan, kedua, diciptakan persatuan; ketiga, merumuskan visi, tujuan masa depan yang akan diwujudkan, yaitu (menuju) kemerdekaan.

---

\*\* Disampaikan di depan Seminar Nasional yang diadakan oleh Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pada 8 Juni 2011.

\*\*\* Tenaga Profesional di Lemhannas, 1985-sekarang. Sejarawan, Pengajar Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya, Jakarta, 1984-sekarang. Pengajar Agama dan Nasionalisme di Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, 1991-sekarang. Pengajar Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, 2003-sekarang. Mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), 2005-sekarang.

Lahirnya kesadaran baru itu terjadi terutama sekali karena (mulai) adanya warga terdidik tercerahkan yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang mereka miliki. Berkaitan dengan itu, Sartono Kartodirdjo mencatat bahwa:

***“Sejajar dengan perkembangan perekonomian pada satu pihak dan perluasan bidang pemerintahan beserta administrasi dan pelayanannya di pihak lain, timbullah kebutuhan akan tenaga, baik dalam bidang administrasi maupun dalam pelbagai bidang teknik dan kejuruan. Sekedar untuk memenuhi kebutuhan itulah, pemerintah kolonial secara lambat laun mendirikan sekolah-sekolah, mula-mula terbatas sampai tingkat rendah saja dan baru dalam dasawarsa kedua abad ke-20 dibuka sekolah tingkat menengah dan sejak dua puluhan tingkat tinggi.”<sup>1</sup>***

Dalam proses selanjutnya, dibuka pula sekolah tinggi dalam bidang teknik, hukum, dan sastra. Demikian pula dalam perkembangannya kemudian, terdapat sejumlah pemuda negeri jajahan Hindia Belanda yang berhasil melanjutkan pendidikannya ke negeri induk bangsa terjajah ini, yaitu kerajaan Belanda (negeri Belanda). Tampilnya para warga negeri jajahan terdidik yang tidak hanya sekedar terdidik, melainkan juga tercerahkan ini, karena ilmu pengetahuan yang diperolehnya dalam kelas-kelas sekolah mereka, buku-buku acuan, sehingga mereka memiliki peralatan metodologis-

---

<sup>1</sup>Sartono Kartodirdjo, 1990, Pengantar Sejarah Indonesia baru : Sejarah Pergerakan Nasional : dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, (jilid 2), Gramedia, Jakarta, hal.74.

teoretis untuk memahami situasi yang dihadapinya. Demikianlah, warga anak negeri jajahan yang telah memiliki peralatan untuk mengubah nasib buruk bangsanya yang terjajah ini, tampil ke arena dan mengambil peranan strategisnya, dengan segala resikonya.

Tampilnya, anak negeri jajahan yang terdidik-tercerahkan itu, dengan berbekal metodologi-teori ilmu yang diperolehnya dari sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, tentu tidak pernah dibayangkannya. Karena lembaga pendidikan yang dibentuknya itu tidak lebih dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka sistem administrasi pemerintahan jajahannya. Bukan untuk mengubah tatanan pemerintahan dan masyarakat kolonialis sebagaimana yang selama ini dijalan-bangunkan oleh kerajaan penjajah itu. Dalam hal ini, Gubernur Jenderal Colijn menyatakan :

***“ Merupakan tragedi politik kolonial, karena ia membentuk dan membangun kekuatan-kekuatan yang di kemudian hari akan melawan pemerintah kolonial.”***<sup>2</sup>

Berkaitan dengan itu, dengan mengutip pandangan R. Kennedy, Sartono Kartodirdjo menyatakan,.....”pendidikan dapat dipandang sebagai sebuah dinamit bagi sistem kolonial.”<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui, ketika warga jajahan terdidik tercerahkan itu tampil ke arena “perlawanan” yang terbuka dalam negeri jajahan Hindia Belanda, pertama-tama yang mereka lakukan ialah menciptakan senjata-senjata alat perlawanan mereka. Inilah yang membedakan dengan perlawanan-perlawanan sebagaimana yang dilakukan pada abad 17, 18 dan 19. Para pendahulu mereka pada abad-abad lampau tersebut melakukan perlawanannya dengan

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 60.

<sup>3</sup> Ibid.

menggunakan senjata fisik. Karena itu, saya sebut jenis perlawanan ini dengan strategi otot-fisik dengan pelbagai jenis senjata yang mereka miliki, seperti tombak, klewang, pedang, keris, bedil, meriam, dan lain-lain. Sebaliknya, para pemimpin perlawanan yang dimulai pada awal abad ke-20 itu yang disebut (periode) pergerakan nasional para pemimpin terdidik tercerahkan itu menggunakan senjata yang sepenuhnya bertumpu pada kemampuan-kecerdasan otak. Itu sebabnya saya menggunakan istilah untuk menyebut perlawanan dalam periode pergerakan nasional itu dengan strategi otak rasional. Senjata perlawanan yang digunakan ialah organisasi, ideologi, media massa dan dialog.

Setelah Boedi Oetomo yang dibentuk oleh warga muda terdidik-tercerahkan, yang berusia 18-23 tahun itu, maka terbentuklah berturut-turut organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, (SI), Indische Partij, Partai Komunis Indonesia (PKI), PNI, Pakempalam Katolik Indonesia, Partai Indonesia, PNI-Pendidikan: ada juga Muhammadiyah, Nahdiatul Ulama, dan lain-lain. Semua organisasi itu mempunyai landasan untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Landasan organisasi yang dimaksud itu ialah ideologi. Yang dimaksud dengan ideologi dalam rangka mencapai tujuan-sebagaimana yang ditulis oleh Ian Adams-adalah pembimbing bagi tindakan politik..

***“Ideologi memberi kita ideal untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan, dan alasan untuk diperjuangkan. Dengan demikian, ideologi memberi arti identitas dan tujuan individu tertentu pada mereka yang mempercayainya. Orang dapat melihat dirinya sendiri sebagai seorang liberal yang memperjuangkan hak-hak azasi manusia, seorang nasionalis yang memperjuangkan hak kebebasan negerinya, seorang sosialis revolusioner yang berjuang untuk meruntuhkan sistem kapitalis,***

**atau seorang wanita yang menentang kekuasaan patriarki....**

***Ideologi dapat mengatakan kepada kita kebijakan yang harus kita kejar, menentukan siapa kawan dan siapa lawan, dan mengapa kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan kita adalah berbahaya. Ketika ideologi dianut oleh sekelompok orang, ia dapat menginspirasi tindakan bersama dan memuaskan aspirasi bersama untuk mencipta atau mempertahankan dunia yang paling mungkin di mana segala sesuatunya, setidaknya-tidaknya yang paling bernilai, dapat dipenuhi.”<sup>4</sup>***

Tujuan, keyakinan, kesadaran yang terkandung dalam ideologi bukanlah alat untuk organisasi itu saja, melainkan harus disebarluaskan, disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dalam rangka itu, diperlukan alat lain, yaitu media massa. Karena itu, selama periode pergerakan nasional, organisasi politik dan massa menerbitkan macam-macam jenis media massa, terutama surat kabar harian, majalah dengan namanya masing-masing. Salah seorang penulis yang sadar akan peranan penting media massa menerbitkan macam-macam jenis media massa, terutama surat kabar harian, majalah dengan namanya masing-masing. Salah seorang penulis yang sadar akan peranan penting media massa ialah *Tirto Adi Soeryo*.<sup>5</sup> Tidak kurang penting dan

---

<sup>4</sup>Ian Adams, 2004, *Political Ideology Today*, (terjemahan oleh Ali Noerzaman: "Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan", Qalam, Yogyakarta, hal. 9.

<sup>5</sup> Untuk keterangan yang luas tentang peranan media masa dalam pergerakan nasional, lihat Ahmad Adam, 2003, *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesia Consciousness (1855-1913)*, (diterjemahkan oleh Amarnan Loebis, Mien Joebhaar : "Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran ke Indonesiaan", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, passim. Lihat juga Taufik Rahzen, et.al, 2007, *Tanah Air Bahasa Seratus Jejak pers Indonesia*, Biora Institute, I Boekoe, Jakarta, passim.

strategisnya ialah terjadinya dialog antara warga terdidik-tercerahkan yang asal tempat kelahirannya berbeda-beda, dalam arti wilayah tempat kelahiran, dan asal etnik, kesukubangsaannya. Sebagaimana diketahui, warga anak negeri jajahan yang menjalani pendidikan di pelbagai kota- Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Padang, dan lain-lain-adalah warga yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, dan bertemu di kota, di sekolah tempat mereka menempuh pendidikan: atau berkenalan di asrama tempat mereka tinggal, atau di tempat-tempat lainnya. Tentu yang terpenting tempat terjadinya dialog itu ialah yang mereka bentuk, tempat mereka menjadi pengurus atau anggota organisasi.

## 2. **Warga Terdidik—Tercerahkan : Membangun Kesadaran Baru untuk Membangsa**

Kenyataan diri kita adalah bersifat majemuk dengan segala latar belakang historis-etnik, atau mungkin yang dapat disebut dengan pluralism lokal. Tentu hal itu merupakan faktor yang mengandung sifat rumitnya sendiri. Dalam membangun diri sebagai bangsa yang satu-bersatu, harus menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Organisasi yang dibentuk pertama, Boedi Utomo adalah sepenuhnya beresiat etnis, lokal dan diprakarsai oleh warga terdidik tercerah, dr. Wahidin dan dr. Soetomo, dengan latar pendidikan Sekolah Dokter Jawa (**STOVIA**). Tampilnya Boedi Oetomo yang "*Jawaistis*" itu dapat dipahami sebagai sebuah kenyataan historis. Dalam kaitan itu, yang seharusnya dilihat dengan tampilnya Boedi Oetomo itu bukanlah pada latar belakang etnis Jawa yang membentuk, melainkan ide dasarnya untuk memajukan warga masyarakat negeri jajahan yang penduduk terbanyaknya adalah etnis Jawa dan Sunda. Jadi, pada diri Boedi Oetono ada makna dan tujuan yang bersifat untuk kemajuan dan emansipatoris bagi masyarakat anak negeri jajahan, Hindia Belanda.

Setelah Boedi Oetomo dibentuk oleh mahasiswa STOVIA, kemudian dibentuk pula organisasi Indische Partij dan Sarekat Islam (SI), Indische Partij dibentuk oleh Tiga Serangkai Douwes Dekker (kemudian mengganti namanya dengan Setiabudi), Cipto Mangunkusumo, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara). Organisasi (politik) yang bersifat “multirasional” ini merumuskan ideologinya dengan nasionalisme Hindia dan sikap politik mereka kepada pemerintah kolonial ialah *non-kooperasi*. Karena sikapnya yang demikian itu, akhirnya ketiga tokoh pimpinan partai ini ditangkap dan dijatuhi hukuman pembuangan ke luar wilayah Hindia Belanda. Suwardi Suryaningrat “dibuang” ke negeri Belanda. Di negeri induk jajahan itu Suwardi Suryaningrat “berkumpul” dengan pelajar mahasiswa Hindia Belanda. Dalam waktu-waktu tertentu, ia berdialog dengan para pemuda mahasiswa Hindia Belanda itu; dan dengan dialog itu, Suwardi Suryaningrat dapat memberikan “masukan-masukan” bagi mereka agar tumbuh bibit-bibit kesadaran baru untuk mengubah nasib mereka sebagai anak negeri jajahan. Setelah beberapa tahun “terbuang” di negeri Belanda, akhirnya kembali ke Hindia Belanda. Suwardi Suryaningrat tidak menerjunkan diri ke dalam bidang gerakan politik, melainkan dalam bidang pendidikan. Bersama dengan Soetatmo Suryokusumo, ia mendirikan lembaga pendidikan nasional dengan nama *Taman Siswa*; dan sebagai pemimpin Taman Siswa itu, ia lebih dikenal dengan nama *Ki Hajar Dewantara*. Perguruan taman Siswa memang berkembang hampir ke seluruh Hindia Belanda dan menjadi lembaga pendidikan yang menyemaikan kesadaran baru bagi anak-anak didiknya.

Selanjutnya pada 1911, terbentuklah Sarekat Islam (SI) yang diprakarsai oleh seorang tokoh pedagang batik di Solo, *Haji Samanhudi*. Organisasi politik ini awalnya berkembang pesat di bawah kepemimpinan *Oemar Said Cokroaminoto*, seorang “pedagang” yang menetap di Surabaya. Karena sikapnya yang lebih radikal, disamping ideologinya

ajaran Islam, maka organisasi ini dalam waktu singkat berhasil menarik perhatian warga Hindia Belanda untuk menjadi anggotanya. Mereka yang menjadi anggota sekaligus juga mendirikan cabang SI di daerah mereka masing-masing. Citra agama demikian Robert van Niel-yang menyebabkan organisasi ini tumbuh dengan pesat. Cabang SI terdapat di semua kota-kota besar di wilayah Hindia Belanda. Di Batavia, dimana semua organisasi meletakkan dasarnya, Sarekat Islam segera menyatakan anggotanya lebih dari dua belas ribu orang.<sup>6</sup>

Sarekat Islam ketika itu terbuka untuk semua warga negeri jajahan, termasuk mereka yang sudah mempunyai organisasi di tempat kerja mereka, seperti *Semaun* yang ketika itu sudah mempunyai organisasi buruh kereta api. Tokoh buruh kereta api ini kelak berjumpa dengan Sneevliet yang datang ke Hindia Belanda melalui Surabaya. Dengan itu, iapun tampil sebagai tokoh yang berideologi Marxis-Leninis komunis; sebelumnya ia juga adalah tokoh dan pimpinan Sarekat Islam Semarang, yang dalam perkembangannya kemudian membentuk kelompok komunis dalam tubuh Sarekat Islam. Itulah cikal bakal Partai Marxis-Leninis dengan nama *Partai Komunis Indonesia (PKI)*.

Dalam perjalanannya kemudian, PKI yang memang sebagaimana biasanya partai Marxis-Leninis berifat radikal atau revolusioner dan menentang kekuasaan pemerintah kolonial dalam bentuk sikap non-kooperasi. Para pemimpinnya mengorganisasikan gerakan-gerakan dalam bentuk , antara lain, pemogokan buruh. Tidak itu saja, bahkan para pemimpin nya telah merancang suatu pemberontakan terbuka kepada kekuasaan kolonial. Rencana pemberontakan ini telah mereka bicarakan di Prambanan pada 1924. Namun ternyata, diantara pimpinan PKI tidak ada kesepakatan yang bulat. Untuk melaksanakan rencana

---

<sup>6</sup>Robert van Neil, 2009, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite* (penerjemah: Ny. Zahara Deliar Noer, "munculnya Elit Modern Indonesia"), Pustaka Jaya, Jakarta, hal.142.

Prambanan itu, maka PKI mengirim salah seorang pimpinannya, Alimin, untuk menemui pimpinan gerakan komunis internasional, Joseph Stalin untuk meminta pertimbangan . Stalin sebenarnya tidak setuju dengan rencana itu, tetapi rencana pemberontakan itu sudah diketahui pihak kolonial yang menyebabkan dilakukanlah pemberontakan PKI pada akhir 1926 di Banten dan sekitarnya pada awal 1927 di Silungkang Sumatera Barat.<sup>7</sup>

Demikianlah, keadaan setelah pemberontakan PKI 1926/1927 itu menyebabkan pelbagai tindakan keras dilakukan terhadap orang-orang PK dan juga terdapat beberapa orang dari Sarekat Islam yaitu mendapat hukuman pembuangan ke sebuah tempat konsentrasi penahanan dengan lokasi yang menyebabkan para tahanan sepenuhnya terisolasi. Dengan terjadinya penumpasan terhadap PKI dan kemudian pelarangan gerakannya oleh pemerintah kolonial, terjadilah “kekosongan” dalam gerakan kemerdekaan pada waktu itu. Apalagi, tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, tidak saja kepada PKI, melainkan juga kepada Sarekat Islam dan organisasi lain yang “dicurigai” bersikap anti kekuasaan kolonialis. Dalam situasi itu, tampillah Ir. Soekarno ke permukaan dan dengan dukungan rekan-rekan intelektualis tamatan universitas di negeri Belanda seperti Mr. Ali Sastroamijoyo, dan juga Muhammad Hatta yang ketika itu masih di negeri Belanda Ir. Soekarno membentuk sebuah organisasi yang kemudian dikenal dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI).

Perlu dicatat bahwa sebelum membentuk PNI, mahasiswa Soekarno telah mengorganisasikan sebuah kelompok studi yang diberinya nama studieclub Bandung. Untuk menunjukkan sikap dan anutan ideologis dirinya, ia menulis sebuah artikel dengan judul: Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dalam artikelnya yang

---

<sup>7</sup>Tentang pemberontakan di Silungkang, Mestika Zeed telah menulis skripsinya di UGM dan telah diterbitkan beberapa tahun yang lalu.

cukup panjang itu yang dimuat pada Suluh Indonesia Muda terlihat betapa pemuda Soekarno (waktu itu berusia 25 tahun) terobsesi oleh ideologi persatuan di antara ketiga ideologi perjuangan yang sedang berkembang itu, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Alinea-alinea terakhir dari artikel (pertamanya?) itu menunjukkan ide persatuan secara jelas. Ia menulis :

“Tulisan kita hampir habis.

*Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan bahwa paham nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita yakin, bahwa kita dengan terang-benderang menunjukkan kemauan kita menjadisatu. Kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insyaf bahwa persatuanlah membawa kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan. Dan kita yakin pula, bahwa walaupun pikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing pihak, ia menunjukkan bahwa persatuan itu bias tercapai. Sekarang tinggal menetapkan sahaja organisasinya, bagaimana Persatuan itu bisa berdiri: tinggal mencari organisatornya sahaja, yang menjadi Mahatma Persatuan itu. Apakah Ibu—Indonesia, yang mempunyai Putera-putera sebagai Oemar Said Tjokroaminoto, Cipto Mangunkusumo, dan Semaun—apakah Ibu-Indonesia itu tidak*

***mempunyai pula Putera yang bisa menjadi Kampiun Persatuan itu?”<sup>8</sup>***

Perhatikan kalimat, kata-kata bagian akhir dari artikel,“... tinggal mencari organisatorinya sahaja, tinggal menetapkan sahaja organisasinya.” Juga ada kata-kata,“... Putera yang bisa menjadi *Kampiun Persatuan*....”Dengan membentuk PNI, hal-hal yang dimaksud dari kata-kata tersebut telah ditemukan; dan itu adalah Soekarno sendiri!

Dengan PNI, (Ir.) Soekarno tampil sebagai organisatoris sekaligus sebagai kampiun persatuan. Azas dan strategi perlawanannya dengan organisasi politik PNI sebagai alatnya, ialah non-kooperasi. Artinya, PNI yang dipimpin oleh Soekarno menentukan sikapnya untuk tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena itu pula, semua gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial. Hal yang sama juga berlaku kepada seluruh pengurus PNI. Setelah berlangsung selama ± 2 tahun, 1927-1929, Soekarno dan pengurus PNI dikejar oleh intelijen pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya ia bersama beberapa pemimpin PNI ditangkap dan kemudian diadili di *Landraad Bandung*. Di depan pengadilan kolonial itu, Soekarno memberikan pidato pembelaannya yang menunjukkan keluasan pengetahuannya. Pidato pembelaannya itu diterbitkan dengan judul *Indonesia Menggugat*.

Tidak hanya di Hindia Belanda para pemimpin pergerakan dicurigai dan dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial. Warga Hindia Belanda yang sedang melanjutkan pendidikan di negeri Belanda, Muhammad Hatta dan kawan-kawan juga mendapat perlakuan buruk dari pemerintah kerajaan Belanda, termasuk dengan menangkap mereka. Tentang perlakuan “diskriminatif” terhadap mahasiswa Muhammad Hatta dan kawan-kawan, mendapat perhatian serius dari

---

<sup>8</sup>Soekarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, jilid pertama, cetakan ketiga, Panitya Penerbit *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta, hal. 22

pemimpin-pemimpin pergerakan di Hindia Belanda. Tidak kurang dari seorang Soekarno yang memberikan perhatian serius. Itu terbukti dengan diturunkan tulisannya yang berjudul *“Pemandangan dan Pengadjaran”* yang dimuat dalam *Suluh Indonesia Muda*. Soekarno menulis alinea pertama tulisannya dengan kata-kata:

***“Mohammad Hatta, Abdul Madjid Djoyo Adiningrat, Mr. Ali Sastriamijoyo, dan Muhammad Nasir Datuk Pamungcah—nama orang muda, pemimpin “Perhimpunan Indonesia” di negeri Belanda, yang di dalam pengabdianya terhadap Ibu-Indonesia, di dalam usahanya memimpin suatu perhimpunan yang mengejar kemerdekaan tanah-air dan bangsa, didalam perjuangannya menganjuri segolongan pemuda-pemuda yang dengan ketetapan hati dan kegagahan sikap. Digeladah rumahnya berkali-kali, ditahan di dalam penjara berbulan-bulan, dituntut di muka hakim di dalam bulan puasa, bulan perdamaian. Didakwa melanggar artikel 131 hukum siksa negeri Belanda, menghasut berontak pada kekuasaan Belanda dengan memuatkan tulisan-tulisan di dalam majalah “Indonesia Merdeka” nomor Maret—April 1927—maka tiada satu tanda kelembakan yang tampak di dalam mereka punya kata dan mereka punya jawab, tiada satu kelembakan yang terdengar atau terbaca di dalam mereka punya pembelaan diri dimuka hakim.”***<sup>9</sup>

Demikianlah cara pemerintah kolonial menghadapi pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan yang bersifat radikal seperti yang dipimpin oleh Soekarno di Hindia Belanda dan yang dipimpin oleh

---

<sup>9</sup>Dibawah Bendera Revolusi, hal.63

Muhammad Hatta di negeri induk jajahan, negeri Belanda. Hatta dan kawan-kawan diadili *di negeri Belanda*, tetapi berhasil bebas dari tuduhan jaksa kolonial. Sebaiknya dengan Soekarno bersama dengan kawan-kawannya, mereka dijatuhi hukuman oleh pengadilan kolonial *di Bandung*. Ketika Soekarno dipenjara, pimpinan PNI yang tidak ditangkap antara lain Mr. Sartono beranggapan bahwa dengan dipenjarakannya Soekarno sebagai pimpinan PNI, maka nama PNI sebagai organisasi partai politik tidak dapat dipertahankan. Karena itu, Mr. Sartono dan kawan-kawan mendirikan partai baru, *Partai Indonesia (Partindo)*. Tindakan Mr. Sartono dan kawan - kawannya mendirikan Partindo menyebabkan Muhammad Hatta “marah” dan “keluar” dari PNI, dan mendorongnya untuk membentuk PNI Pendidikan bersama dengan Sutan Syahrir.

Dalam langkah untuk membangun kesadaran baru melalui organisasi, media masa, dan dialog, terdapat juga pemimpin yang mengambil strategi yang bersifat kooperasi, yaitu “dalam arti tertentu” bersedia bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Mereka ini biasanya adalah para priyayi, ambtenaar, atau pegawai negeri. Dari lingkungan pimpinan organisasi itu terdapat nama-nama yang mempunyai pengaruh besar. Dr. Soetomo, Muhammad Husni Thamrin, I.J. Kasimo, dan lain-lain. Di antara mereka ada yang menjadi anggota Volksraad dalam periode tertentu, yaitu I.J. Kasimo dan Muhammad Husni Thamrin.

Demikianlah gambaran singkat tentang organisasi gerakan dalam periode pergerakan nasional pada waktu itu. Selanjutnya, pada lembar-lembar berikut, kita akan melihat konflik ideologis selama periode itu yang justru terjadi di tengah-tengah usaha menjadi bangsa yang satu, menjadi merdeka, dan menegakkan sebuah negara republik.

### 3. **Konflik Ideologis di Antara Organisasi-Organisasi Pergerakan**

Ketika Sarekat Islam sedang berkembang dengan pesatnya, datanglah seorang anggota Comintern, komunis internasional, ke Indonesia melalui Surabaya. Sneevliet namanya. Tentu saja kedatangannya tidak terlepas dari tujuan politik untuk menyebarkan ideologi politik yang diyakini kebenarannya itu, Marxisme-Leninisme, atau singkatnya: komunisme. Ketika Sneevliet akan menyebarkan ideologi anutannya itu, timbul masalah, yaitu melalui apa atau melalui organisasi yang mana. Tentu saja salah satu kemungkinan penyebarannya melalui ISDV, karena Sneevliet membentuk dan menjadi bagian dari organisasi itu.

Dengan menggunakan ISDV sebagai alat, usaha Sneevliet tidak berjalan efektif, karena di samping jumlah anggotanya yang “sedikit”, terutama juga dikarenakan sebagian besar anggota organisasi politik Marxis ini adalah orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Melalui organisasi yang terdahulu dan bersifat “Jawais”, Boedi Oetomo, juga tidak akan efektif karena di samping ideologi gerakan ini lebih bersifat etnis, keanggotaannya juga terbatas, dan berjumlah kecil, bukan merupakan organisasi massa. Karena itu, satu-satunya organisasi yang lebih terbuka dan yang akan efektif ialah melalui Sarekat Islam. Tentu saja untuk segera masuk ke dalam lingkungan kepengurusan Sarekat Islam, juga bukan hal mudah sebagaimana diharapkan. Namun, jalan itu lebih terbuka.

Ada tokoh buruh kereta api dari Semarang, Semaun. Dari periode awal berkembangnya organisasi di Hindia Belanda, 1908-1921, disiplin organisasi/partai belum dijalankan; maka seseorang pribadi dapat saja menjadi anggota lebih dari satu organisasi atau partai. Hal itulah yang memungkinkan seseorang dapat menjadi anggota di satu partai walaupun ia sudah terlebih dahulu menjadi anggota dari partai dapat menjadi anggota Sarekat Islam. Dengan masuknya tokoh-tokoh Marxis-komunis itu ke dalam lingkungan Sarekat Islam, maka bermula

dan berkembanglah konflik ideologi dalam tubuh organisasi politik yang justru berideologi Islam, yaitu Sarekat Islam. Ideologi saling berebut pengaruh dalam tubuh Sarekat Islam. Para tokoh Marxis-komunis yang menjadi anggota Sarekat Islam membentuk kekuataannya dari dalam, atau dalam istilah McVey, *the block within*. Tentu saja konflik ideologi tidak dapat dihindarkan di antara dua keyakinan ideologi yang ada dalam tubuh Sarekat Islam. Dalam kongres nasional ketiga Sarekat Islam di Surabaya, 29 September – 6 Oktober 1918, memang terjadi pertentangan di antara Abdul Muis dengan Darsono, diadakan suatu pertemuan tertutup. “Darsono dan Semaun tiba-tiba membuka kartunya, mereka mengancam hendak menarik mundur cabang Semarang dari Sarekat Islam.<sup>10</sup> Namun, konflik itu dapat “diatasi” selama Cokroaminoto menjadi pimpinan Sarekat Islam dan berada di tengah-tengah organisasinya. Sebagai tokoh utama organisasinya, ia sangat mempertahankan dan memelihara persatuan dan keutuhan organisasinya itu. “Konflik ideologi dan konsekuensi dari cara-cara yang tidak bertanggungjawab kurang berarti untuknya dibandingkan dengan keutuhan organisasinya. Untuk maksud itulah, kelompok Semarang sebutan bagi Semaun dan kawan-kawan penganut ideologi Marxis-komunis Semaun dimasukkan ke dalam panitia pengarah sentral dan Darsono diangkat menjadi propagandis<sup>11</sup> resmi Sarekat Islam.

Walau demikian, dua kekuatan ideologi dalam tubuh Sarekat Islam terus menunjukkan sikap yang berbeda dalam melihat persoalan yang terjadi. “Muis sendiri, seakan tidak menganggap pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang memang menyakitkan karena hari berikutnya ia dengan keras menentang usul Semaun untuk tidak mau bekerja sama dengan Volksraad, yang ketika itu sedang berada pada

---

<sup>10</sup>Robert van Niel, *op.cit.*, hal. 205

<sup>11</sup> *Ibid.*

tahap terakhir pembentukannya untuk menjamin masuknya wakil-wakil Islam di dalam dewan ini.”<sup>12</sup> dari kekuatan Sarekat Islam “murni” memang ada desakan agar kekuatan komunis harus disingkirkan, tetapi kehendak itu tidaklah mudah dilakukan, karena bagaimanapun Cokroaminoto menentang perpecahan di dalam organisasi.”<sup>13</sup> karena itulah terjadi istilah van Niel genjatan senjata di antara yang bermusuhan itu. Dalam situasi genjatan senjata itulah seakan-akan kekuatan ideologis Islam bersedia “berdamai” dengan kekuatan komunisme.

Hal itu tampak pada kongres kelima di Yogyakarta, 2-6 Maret 1921.

**“Di sinilah suatu persetujuan pra kongres disepakati, yang menggabungkan konsep-konsep dan komunis di dalam wadah yang baru berkembang. Agus Salim dan Semaun menjadi pengurus rencana baru ini. Salim telah menjelaskan bahwa Islam bersifat demokratis dan sosialis, seperti selalu dilakukannya sebelumnya. Semaun bersedia menerima prinsip Islam di dalam wadah tersebut untuk mempertahankan keutuhan organisasi dalam menjalankan pekerjaan.”<sup>14</sup>**

Kemungkinan berkembangnya kelompok Marxis-komunis pimpinan Semaun-Darsono dan Tan Malaka adalah karena kemampuan mereka menggunakan pelbagai hal yang berkaitan dengan ajaran Islam yang “diterjemahkan” sebagai sejajar dengan ajaran Marxis-komunisme. Langkah pensejajaran itu dilakukan dengan menggunakan orang yang memang mempunyai kualifikasi sebagai tokoh Islam,

---

<sup>12</sup> Ibid., hal. 199

<sup>13</sup> Ibid., hal. 279

<sup>14</sup> Ibid.

seperti Haji Misbach dari Solo dan Haji Datuk Batuah dari Sumatera Barat; demikian pula Haji Adnan dari Tegal, bahkan juga berhasil menyusup masuk ke sebuah pesantren di Ponogoro.<sup>15</sup> Tokoh-tokoh komunis beragama Islam ini berusaha menyebarkan idenya dengan “memanfaatkan” ajaran Islam maupun kekuatan fisik yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai tujuannya itu, tokoh-tokoh komunis beragama Islam itu menerbitkan media massa berupa surat kabar. Haji Misbach menerbitkan Islam Bergerak. Hal yang sama dilakukan oleh Haji Datuk Batuah dan kaum Marxis-komunis di Sumatera Barat. Mereka menerbitkan Djago! Djago Dan Pemandangan Islam.<sup>16</sup>

Walau demikian, kekuatan “Islam murni” dalam Sarekat Islam tampak makin tidak mau mentolerir keberadaan kelompok Marxis-komunis di dalam tubuh organisasinya. Itu terlihat dalam kongres nasional keenam Sarekat Islam di Yogyakarta pada 1921. Ketika itu, Cokroaminoto ditahan karena dianggap berkaitan dengan peristiwa “huru-hara” Garut. Karena itu, yang memegang pimpinan kongres nasional adalah Agus Salim dan Abdul Muis. Kedua pimpinan teras Sarekat Islam ini memang selalu berhadapan dengan kekuatan Marxis-komunis di dalam tubuh Sarekat Islam. Demikian pula, unsur Islam di dalam Sarekat Islam demikian keras bagi komunis untuk dikalahkan. Tindakan tidak beragama begitu berat menimpa golongan komunis. Dalam kongres itu, Agus Salim memberi keterangan yang mempertentangkan doktrin sosial Marxis dengan ajaran sosial dalam Islam. Akibat keterangannya itu, kongres dengan suara terbanyak berhasil memenangkan suara untuk menegakkan disiplin partai.

---

<sup>15</sup>Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, 1965, Cornell University, Ithaca, New York, hal.174<sup>13</sup>Ibid., hal. 279

<sup>16</sup>Anhar Gonggong, 1979, *Pemanfaatan Islam oleh kaum Komunis. Beberapa Kasus Pada Awal Munculnya Gerakan Komunis di Indonesia (1914-1927)*, di dalam *Persepsi*, Tahun 1, nomor 1, hal 64.

Golongan komunis pun mengundurkan diri dari Sarekat Islam.<sup>17</sup> Tentu saja keputusan kongres nasional Yogyakarta 1921 yang menjalankan disiplin partai segera menuai ketidaksetujuan dari tokoh-tokoh komunis beragama Islam. Salah seorang yang menentang keras keputusan penetapan disiplin partai Sarekat Islam itu ialah Haji Misbach di Madiun. Haji Misbach menyatakan: “Tiada mufakat dan tiada ridla sekali akan adanya partij discipline yang diadakan dalam badan CSI atas pimpinannya S. Cokroaminoto. Dalam pandangannya yang tentu saja dapat dipandang sebagai wakil dari rekan-rekan segolongannya disiplin partai itu semata-mata hanya memecah belah persatuan kita.”<sup>18</sup> Karena itu, maka tokoh revolusioner yang pada akhirnya dibuang ke Digul ini menyatakan “bersanggup akan melawan ini maksudnya disiplin partai Sarekat Islam dimana juga, terutama pula nanti dimana ada CSI Congress.”<sup>19</sup>

Demikianlah konflik ideologi yang terjadi di antara Sarekat Islam dengan orang-orang berpaham Marxis-komunis yang berawal dari masuknya mereka ke dalam tubuh organisasi berideologi Islam itu. Setelah kekuatan golongan Marxis-komunis membentuk organisasi politiknya sendiri, PKI, maka sesuai dengan doktrin revolusionernya, organisasi politik yang “berinduk” di Moskow ini –sebagai bagian dari Comintern—terus melakukan kegiatan revolusioner, termasuk mempersiapkan pemberontakan yang dilakukan pada 1926/1927 di Banten dan Silungkang sebagaimana yang telah disebut pada lembar-lembar terdahulu. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, setelah pemberontakan PKI terjadi, maka Soekarno tampil dengan membentuk PNI.

---

<sup>17</sup>Robert van Niel, *op.cit.*, hal.280-281

<sup>18</sup>Lihat, “Serba-serbi Verslag Pendek dari Openbare oopenlucht Vergaderming SI Pekalongan pada 23-24 Desember 1922”, dalam *islam Bergerak*, 1 Januari 1922

<sup>19</sup>*Ibid.*

Selanjutnya, setelah Soekarno dipenjarakan dan kemudian dilepaskan, maka gerakan yang dilakukannya melalui Partindo setelah gagal mempertemukan Partindo yang menganut ideologi marhaenisme dengan PNI-Pendidikan yang menganut ideologi sosial demokrat, daulat rakyat. Akan halnya dengan kekuatan PKI, setelah pemberontakannya itu, partai itu dengan keseluruhan pimpinannya yang tidak tertangkap, melarikan diri ke luar negeri, seperti Semaun yang melarikan diri ke Moskow. Mereka yang masih menetap di Hindia Belanda bergerak di bawah tanah.

Sejak tampilnya Soekarno sebagai pemimpin pergerakan PNI, ia berusaha menciptakan kekuatan “kerja sama” di antara partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Itu diwujudkan pada Desember 1927 dengan membentuk PPKI yang di dalamnya termasuk Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Kaum Betawi dan tentu PNI sebagai pemprakarsa. Sebagai pemimpin gerakan yang memang mengutamakan “persatuan”, yang diusahakannya justru menghindari terjadinya konflik, seperti yang telah disinggung pada lembar terdahulu yang berkaitan dengan artikel pertamanya pada 1926, yang menganjurkan bersatunya tiga kekuatan Ideologi, Nasionalis, Islamis, dan Marxis untuk melawan kekuatan penjajahan kolonialis.

Dalam kaitan dengan posisi dan kegiatan Soekarno, perlu dicatat bahwa sebagai pemimpin dan ideolog yang telah melakukan kegiatan intelektual dengan menciptakan sebuah ideologi baru yang disebutnya dengan definisi singkat : “Marxisme yang diterapkan di Indonesia,” definisi selalu diulang-ulang oleh pemimpin utama PNI, Ali Sastroamijoyo, dan pemimpin Partindo, Asmara Hadi dan oleh Soekarno sendiri.

#### 4. **Penutup : dari Konflik ke Landasan Persatuan : Pancasila**

Setelah kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pada 18 Agustus 1945 disahkanlah Pembukaan UUD negara yang di dalamnya tercantum lima butir sila yang disepakati, bersifat konvensional, disebut dengan Pancasila. Dengan demikian, negara Republik Indonesia yang dibentuk melalui sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 ditegakkan berdasar pada Pancasila. Namun, di tengah-tengah kegiatan mempertahankan (proklamasi) kemerdekaan, justru melahirkan konflik di antara kekuatan ideologi politik pada waktu itu, dan bahkan berkembang menjadi konflik bersenjata. Dalam rangka itu, terlebih dahulu perlu dicatat bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, maka hidup kembalilah partai-partai politik yang sejak periode kolonial Belanda dilarang, yaitu PKI dan semua organisasi politik yang dilarang sejak berkuasanya pemerintah fasisme Jepang di Indonesia, dengan itu aktif kembali, PNI, PKI, Murba, Partai Sosial (Indonesia) dan lain-lain.

Konflik terus terjadi karena perbedaan sikap dan cara menghadapi kekuatan pasukan Belanda yang berusaha mengembalikan kekuasaannya di "bekas" jajahannya, tetapi telah menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Ketika Sutan Syahrir berhasil menduduki jabatan Perdana Menteri (PM) yang akan menempuh jalan diplomasi, perundingan dengan pemerintahan Belanda, terjadilah konflik di antara kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Salah seorang yang bersikap menentang, beroposisi terhadap kebijaksanaan pemerintah Sutan Syahrir itu ialah Tan Malaka dari partai Murba yang berideologi komunis Troskis dan dipecat dari PKI karena menentang PM Sutan Syahrir berhasil membangun kekuatan dengan Persatuan Perjuangan yang mendapat dukungan dan kekuatan politik seperti masyumi, PNI, bahkan ada yang menyatakan juga dari TNI pada waktu itu. Akibat pertentangan itu, maka PM syahrir pernah mengalami penculikan.

Selanjutnya terjadi konflik di antara kekuatan-kekuatan ideologis yang makin berkembang yang berkaitan dengan situasi mondial, yaitu pengaruh Perang Dingin, yaitu perang ideologi mondial, yaitu kekuatan ideologi demokrasi liberal kapitalisme yang dipimpin Amerika dan Eropa Barat vs ideologi Marxis komunis yang dipimpin Uni Sovyet dan Eropa Timur. Dalam kaitan itu paling tidak mempunyai dampak tertentu PKI mengambil prakarsa untuk membentuk pemerintahan sendiri di Madiun, September 1948. Peristiwa pemberontakan PKI melahirkan konflik tidak hanya dengan kekuatan TNI, melainkan juga dengan kekuatan ideologi lainnya, yaitu dengan kekuatan politik Partai Sosialis Indonesia dan Partai Murba. Keduanya juga sebenarnya berideologi Marxistis. Jadi dalam pemberontakan PKI, 1948 yang berkonflik, saling bermusuhan, adalah justru terutama kekuatan Marxistis, PKI vs PSI dan Murba. Namun, ditengah-tengah situasi konflik untuk mempertahankan kemerdekaan, dalam situasi kritis, seorang tokoh utama dari Partai Murba, dr. Muwardi, menyatakan tentang tujuan pemberontakan PKI di Madiun itu, yaitu “untuk menghilangkan PKI”.

Demikianlah keterangan yang jauh dari cukup tentang situasi konflik dari tiga kekuatan yang pernah terjadi pada masa berkembangnya organisasi pergerakan, sekarang tiba saatnya untuk kita semua berdialog untuk mendapatkan kebenaran sejarah yang lebih pasti sebagaimana yang tentu dikehendaki seminar nasional yang diadakan oleh Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada hari ini.

# PERUBAHAN DUNIA DAN NASIONALISME INDONESIA

## BELAJAR DARI SEJARAH JEPANG<sup>1</sup>

DR. Bambang Wibawarta<sup>2</sup>

### Pendahuluan

Nasionalisme tidak bisa terlepas dari ideologi (James G. Kellas, 1998). Sebagai suatu ideologi, nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa serta memberi seperangkat sikap dan tindakan. Tingkah laku seorang nasionalis bermuara untuk kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan ideologi pemersatu bangsa, suatu ikatan yang mempersatukan sekelompok manusia berdasarkan kesamaan identitas tertentu. Kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang terdiri dari beragam unsur. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari berbagai unsur mulai dari keberagaman suku, dalam keanekaragaman etnis, bahasa, dan agama yang berpadu membentuk satu kesatuan. Namun seringkali perpecahan terjadi akibat ada anggota yang ingin menonjolkan kesukuan atau agama mereka dan menolak untuk hidup harmonis dalam satu kesatuan. Itulah yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Sudah 62 tahun berlalu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun rasa kebanggaan dan kebangsaan Indonesia tampaknya semakin terpuruk. Dari hasil polling di kompas.com, dari 153.205 responden (status polling pada 20 Januari 2007 pukul 22:51 WIB) hanya 24% yang merasa bangga sebagai bangsa Indonesia sedangkan 76% lainnya merasa tidak bangga sebagai bangsa Indonesia.

---

<sup>1</sup>Makalah diskusi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2007, Museum kebangkitan Nasional, 28 Juni 2007.

<sup>2</sup>Direktur Pusat Studi Jepang-UI, Mengajar di Fak. Ilmu Pengetahuan Budaya dan Program Pascasarjana kajian Wilayah jepang-UI

Hal ini seiring dengan hasil jajak pendapat Kompas untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda 2002. Sebagian besar responden (71%) menilai bahwa rasa kebangsaan, persatuan, dan komitmen masyarakat untuk mempertahankan keutuhan NKRI semakin melemah. Hasil jajak pendapat Kompas dapat menjadi sinyal yang memperlihatkan melemahnya ikatan kebangsaan dalam masyarakat Indonesia.

Dalam beberapa seminar tentang nasionalisme, banyak pertanyaan kritis mengenai nasionalisme di Indonesia, seperti apakah masih diperlukan nasionalisme di Indonesia, bahkan ada yang menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia telah mengalami kegaBerbagai pendapat dan pertanyaan tersebut mencerminkan betapa kecewanya mereka terhadap Indonesia, dan bahkan sebagian dari mereka tidak hanya merasa tidak bangga terhadap negeri ini, namun juga menunjukkan sikap antipatinya.

Berbagai perubahan domestik dan global menimbulkan berbagai dampak, yang kadang dianggap sebagai ancaman. Perubahan global yang ditandai oleh semakin meningkatnya wacana dan proses globalisasi, dalam bidang politik berujung pada masalah demokratisasi dan HAM, dalam bidang ekonomi memunculkan liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi memacu perubahan besar, dan dalam bidang sosial budaya memunculkan wacana dan usaha pemberdayaan masyarakat sipil, serta masuknya nilai-nilai dan budaya asing. Berbagai macam hal tersebut berdampak pada terjadinya perubahan masyarakat dan sistem politik serta ekonomi domestik.

Sementara itu, jika kita perhatikan negara Jepang, negara ini relatif lebih dapat menjaga semangat kebangsaan atau nasionalisme warganya. Dalam makalah ini akan disinggung mengenai hal ini, agar kita dapat lebih baik dalam mengatur strategis mempertebal semangat kebangsaan Indonesia.

## Lokal-Global

Nasionalisme pada dasarnya adalah prinsip politik. Setelah berakhirnya perang dingin, konstelasi politik internasional cenderung makin rumit dan kabur. Dari situasi ini muncul berbagai permasalahan. Di antaranya adalah akibat makin meluasnya kapitalisme-global. Globalisasi pada dasarnya hanya lebih menguntungkan pihak yang memang sudah beruntung, rezim otoriter tambah otoriter. Globalisme memang cenderung menjadi legitimasi otoriterisme, dan hal ini akhirnya mengakibatkan perubahan drastis komunikasi politik antar bangsa, kemudian diikuti perubahan tata ekonomi. Aspek sosiokultural juga mendapatkan imbas dari hal tersebut. Gejolak nasionalisme-etnis yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, yang terkadang diabaikan, jika dibanding faktor lain, seperti sosiokultural atau keagamaan misalnya.

Jika dicermati, masalah etnis, sama halnya dengan masalah nasionalisme terbentuk dari berbagai faktor, yaitu politik, ekonomi, dan perkembangan yang saling terkait dengan faktor sosiokultural, dan akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur masyarakat. Sehingga, masalah etnis seharusnya disikapi berdasarkan faktor-faktor tersebut, bukan hanya dari satu aspek saja, faktor perbedaan agama misalnya.

Pergerakan ekonomi global dapat menyingkirkan rasa nasionalisme, sehingga nasionalisme terlihat menjadi tidak relevan lagi. Di masa lalu modal terkait erat dengan rakyat, karena memiliki tanggung jawab sosial untuk menghidupi seluruh anggota komunitas, atau pun bangsa. Namun dewasa ini, privatisasi mampu menjauhkan modal dari dimensi sosial atau komunitasnya. Demi keuntungan yang sebesar-besarnya modal dengan cepat dapat dipindahkan ke mana pun juga. Banyaknya perusahaan yang melarikan modalnya ke negara lain pada saat krisis ekonomi sekitar sepuluh tahun lalu dan tahun-tahun sesudahnya memberi gambaran jelas mengenai hal tersebut.

Globalisasi sebagai proses yang menghilangkan batas-batas kewilayahan telah mengubah semuanya. Kebudayaan tidak lagi terkungkung dalam teritori tertentu. Kini tidak sedikit anak-anak muda yang lebih paham anime, manga, dan budaya pop impor lainnya daripada kebudayaan sendiri. Kebudayaan telah melepaskan diri dari keterikatannya pada nation-state. Kenyataan semacam ini memunculkan pertanyaan kebudayaan yang manakah yang dapat menjadi media untuk memupuk dan mempertebal nasionalisme atau ikatan kebangsaan.

Namun demikian, bersamaan dengan proses memudarnya batas kewilayahan dan mengglobalnya kebudayaan terjadi gerak sebaliknya berupa pencarian identitas lokal yang semakin intensif. Hal ini terjadi di Jepang pasca Restorasi Meiji. Setelah Restorasi yang membawa perubahan dahsyat terjadi beberapa tahun, banyak yang mulai kritis dan merasa khawatir terhadap hal tersebut. Sehingga gerakan kembali ke segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi mulai muncul.

Globalisasi bidang politik mendatangkan persoalan serupa atas nasionalisme. Globalisasi telah mereduksi pentingnya lingkup politik dari natio-state yang merupakan basis bagi pembangunan sosial-politik. Dari perspektif ekonomi, budaya, dan politik global tampak bahwa nasionalisme menghadapi tantangan yang sangat besar di tengah pusaran globalisasi saat ini.

Jika ditempatkan dalam ketegangan lokal-global, nasionalisme merupakan pencarian identitas lokal (nasional) di tengah pusaran globalisasi. Nasionalisme sebagai identitas bukanlah sesuatu yang bersifat pasif, yang bentuk dan wujudnya sudah jadi dan final. Nasionalisme merupakan sesuatu yang terus aktif bergerak, artinya dia adalah suatu proyek yang mesti terus-menerus dikerjakan, dibangun, serta diberi makna baru pada setiap kesempatan. Di tengah pusaran globalisasi, nasionalisme Indonesia bukan lagi memanggul senjata atau bambu runcing dengan semangat “merdeka atau mati”.

Dalam beberapa kurun waktu belakangan ini kita dapat melihat kebersamaan serta persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kian rapuh, integrasi sosial terancam, pengkotakan makin meningkat, kesetaraan dan keadilan masih lebih banyak berada di tingkat gagasan dari pada di tingkat implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, prinsip menjaga kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural, serta prinsip mencapai keadilan dan kesetaraan yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan dewasa ini dirasakan memerlukan suatu revitalisasi untuk menjaga keutuhan NKRI.

Telah dinyatakan di atas bahwa banyak orang menganggap nasionalisme tidak relevan lagi di era globalisasi, ketika mulai muncul diantara kita sekelompok elit akademis maupun elit politik yang berbicara dengan nada miring mengenai nasionalisme, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa nasionalisme sudah kuno.

Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang pluralistik dan multikultural. Ciri pluralistik, dengan keanekaragaman suku-suku bangsa dan sub suku bangsa dengan adat istiadatnya masing-masing bahasa dan dialek suku-suku bangsa, tradisi, keragaman agama dan kepercayaan tradisional, folklor, ekologi.

Sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi prinsip yang merupakan kesepakatan bersama bangsa kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan adalah berusaha meningkatkan pemahaman multikulturalisme Indonesia. Perlu dilakukan penumbuhan rasa saling memiliki aset-aset nasional yang berasal dari nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia, khususnya dari berbagai suku bangsa. Sedangkan upaya membentuk interdependensi sosial-ekonomi yang memperkokoh persatuan nasional, menghindari eksklusivisme dalam multikulturalisme Indonesia secara sistematis dan terencana, tidak hanya menjadi tanggung jawab para cendekiawan dan kita semua.

## Belajar dari Sejarah Jepang

Istilah modernisasi Jepang biasanya mengacu pada Restorasi Meiji yang terjadi pada 1868. Restorasi Meiji merupakan peristiwa yang menandai runtuhnya sistem feodal pemerintahan Tokugawa dan menempatkan kembali Tenno (Kaisar) sebagai penguasa tertinggi pemerintahan. Jepang yang sebelumnya, yakni pada periode Tokugawa (zaman Edo, 1603-1868) menerapkan politik pintu tertutup (*sakoku*) selama lebih dari 250 tahun, pada tahun 1868 membuka negeri (*kaikoku*)-nya bagi bangsa barat. Selama menerapkan *sakoku*, Jepang behubungan dengan barat hanya dalam bentuk perdagangan komoditi tertentu, seperti kain sutra untuk kalangan bangsawan, dan persenjataan. Dengan Restorasi Meiji Jepang terbuka lebar bagi bangsa barat. Pengaruh Barat, baik dalam bidang kebudayaan, teknologi, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya masuk secara besar-besaran ke Jepang. Jepang bagaikan baru bangun dari tidur panjang, dan baru menyadari ketertinggalannya dari bangsa Barat. Modernisasi, atau perubahan yang mereka lakukan pun berusaha meniru Barat, sehingga Restorasi Meiji sering disebut pula sebagai westernisasi.

Gelombang dahsyat pengaruh barat ini melanda hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya perubahan besar dalam masyarakat Jepang. Tentu saja gelombang perubahan yang datang dengan tiba-tiba ini menimbulkan kontradiksi, ada yang menerimanya dengan begitu saja, ada yang menyikapi dengan hati-hati, dan ada pula yang menolak. Bahkan sebelum dilakukannya Restorasi Meiji muncul suatu gerakan *Sonno Joi*, yang diartikan “menjunjung tinggi kaisar dan mengusir orang asing” yang mereka sebut sebagai orang bar-bar.

Dari segi politik, Restorasi Meiji merupakan gerakan yang mengakhiri dominasi yang sangat lama dari kelas samurai (*bush*) Shogun Tokugawa. Dengan Restorasi Meiji hak-hak istimewa kaum bangsawan dan militer dihapuskan, termasuk kesempatan dalam pekerjaan, dan pendidikan. Dalam usaha menyejajarkan diri dengan bangsa Eropa

yang mereka anggap jauh lebih maju, Jepang menerapkan politik *datsu A nyu O* (keluar dari Asia dan masuk ke Eropa), dan mengumandangkan slogan *Wakon Yosai* (kepribadian Jepang, teknologi Barat).

Pemerintah selanjutnya mengambil berbagai langkah pembenahan, baik untuk urusan dalam negeri maupun dalam menjalin hubungan dengan pihak asing. Untuk urusan dalam negeri, pemerintah misalnya memperkenalkan sistem pajak modern. Untuk melakukan diplomasi dengan pihak luar negeri dan untuk mempelajari berbagai macam hal yang nantinya diharapkan dapat diterapkan di Jepang dikirim beberapa orang utusan ke luar negeri, salah satunya adalah utusan ke Amerika dan Eropa yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi<sup>3</sup> pada tahun 1871.

Bertambahnya pengetahuan ilmiah merupakan faktor penting dalam proses modernisasi. Berbagai aspek kehidupan mendapat perhatian kaum intelektual, dan mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif. Tampaknya Jepang pada saat itu sangat menyadari hal ini, yang terbukti dengan pengiriman para pelajar berprestasi untuk menimba ilmu di luar negeri, dan sekembalinya ke Jepang diharapkan mampu menerapkannya bagi kepentingan negara. Jepang ketika itu beranggapan bahwa Amerika dan Eropa dapat menguasai Asia karena keunggulan mereka khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Jepang berusaha mengejar kekurangan dan ketinggalan mereka agar terhindar dari kolonialisme.

Meski pada akhir zaman Tokugawa sudah berkembang industri rumahan, namun belum melibatkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, dan belum menggunakan mesin-mesin seperti di negara Eropa. Selain

---

<sup>3</sup>Iwakura Tomomi (1825-1883). Berasal dari kalangan rendah. Ia menentang perjanjian antara Amerika-Jepang sebelum Restorasi Meiji. Ia mendukung dilaksanakannya Restorasi Meiji, dan menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan, termasuk salah satu misi yang diembannya ke Amerika adalah untuk melobi Amerika agar mau melakukan revisi perjanjian perdagangan antara Jepang-Amerika, walaupun mengalami kegagalan.

itu kondisi pada saat itu juga tidak mendukung, seperti tingginya pajak tanah, dan sebagian besar rakyat merupakan petani miskin. Baru pada awal Meiji banyak industri yang berkembang, terutama yang ditangani oleh pemerintah. Misalnya industri peralatan perang, pemintalan, dan perkapalan. Jepang banyak meng-impor mesin-mesin dan teknologi yang lebih maju. Hal ini sangat menunjang pemerintah dalam melakukan modernisasi, dan mewujudkan negara sesuai dengan semboyan *Fukoku Kyohei*, yang berarti “negara kaya dan militer kuat”. pemerintah Jepang berpikir hanya dengan cara tersebutlah mereka dapat mengejar ketinggalan, dan dapat menghindari ekspansi negara-negara Barat yang telah maju terlebih dahulu.

Untuk menghindari imperialisme secara ekonomi Jepang merasa harus memiliki perekonomian kuat, dan untuk menghindari imperialisme secara politis Jepang harus memiliki militer yang kuat pula. *Fukoku kyohei*, inilah yang menjadi slogan modernisasi Meiji, tujuan akhirnya adalah menegakkan politik yang kuat, dan membebaskan Jepang dari perjanjian yang tidak seimbang akibat tekanan kekuatan pihak Barat.

Jika dicermati lebih jauh, berbagai kebijakan pemerintah Jepang ketika itu sangat erat dengan upaya memupuk semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa. Selalu dihembuskan bahwa segala sesuatu harus berujung untuk kepentingan nasional. Hal ini masih dapat kita dapatkan hingga saat ini. Hal ini pulalah yang memacu kemajuan Jepang sehingga diperhitungkan dalam kancah internasional.

Jepang memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian global dewasa ini. Tentu saja hal ini bukan merupakan suatu hal yang terjadi begitu saja, tetapi melalui proses panjang. Untuk dapat memahami dengan baik Jepang dewasa ini, kiranya perlu dipahami pula nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Jepang yang tidak terkikis oleh derasnya arus modernisasi.

Bushido sering diartikan sebagai jalan samurai. Istilah bushi

mengacu pada kaum samurai pada masa pemerintahan feodal di Jepang, dan do memiliki berbagai arti, di antaranya *“cara yang baik”*. Atau *“jalan”* Interpretasi lain dari Bushido adalah menciptakan kedamaian dengan menggunakan kekuatan. Bushido yang mengandung nilai-nilai keprajuritan berasal dari pemikiran Buddha, Konfusianisme, dan ajaran Shinto. Untuk memahami bagaimana Bushido diterapkan dalam kehidupan masyarakat Jepang modern harus dipahami pula aspek historis dan sosial dari bushido tersebut. Dewasa ini pengertian tersebut dapat diterjemahkan termasuk untuk meredam konflik. Meski para samurai sudah tidak ada lagi, nilai-nilai Bushido yang tertanam dalam diri mereka seperti kehormatan, kesetiaan, disiplin, dedikasi total serta keberanian, dan lainnya masih tersisa dalam masyarakat Jepang modern.

Dalam makalah ini akan diuraikan sebagian dari latar belakang tersebut di atas. Dengan demikian kita dapat belajar dari apa yang telah dilakukan Jepang. Jepang dapat mengejar ketinggalan mereka dari bangsa Barat karena memiliki keinginan belajar, dan dapat memanfaatkan suatu momentum untuk kepentingan mereka (negara). Tidak hanya peristiwa-peristiwa seperti Restorasi Meiji (1868), tetapi juga bencana seperti gempa bumi dahsyat Kanto (1923), pemboman Hiroshima dan Nagasaki (1945) dapat dimanfaatkan sebagai suatu hal positif dan dijadikan suatu pelajaran dan momentum untuk menjadi lebih baik.

Bagaimana dengan Indonesia? Sepertinya kita masih banyak menyalakan momentum untuk memperbaiki diri dan bangsa. Momentum besar seperti kemerdekaan, peristiwa 65, bencana alam, reformasi dan sebagainya tidak dijadikan momentum untuk bangkit memperbaiki bangsa secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan.

Dalam proses belajar dan meniru Barat bangsa Jepang tidak lupa dengan identitas dan nilai-nilai yang telah lama melekat dalam diri mereka. Kita dapat melihat Jepang modern yang secara sadar

masih memelihara nilai-nilai tradisional tersebut dengan baik. Hal ini sangat penting artinya untuk menciptakan keseimbangan dan dijadikan tempat berpegang dalam perubahan-perubahan yang terus bergulir. Salah satu nilai yang sering dianggap masih melekat dalam diri bangsa Jepang adalah nilai-nilai bushindo.

Pada zaman Edo (1603-1867) terdapat sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat Jepang dalam empat tingkatan, yang disebut dengan shinokosho. Shi merupakan singkatan dari bushi (kaum samurai atau prajurit), no dari nomin (petani), ko dari kosakunin (pengrajin), dan Sho dari shonin (pedagang). Sistem penggolongan tersebut mengatur dengan ketat status dan peran dari masing-masing golongan. Seseorang yang telah dilahirkan dalam golongan tertentu tidak bisa naik ke kelas lain dengan begitu saja. Secara status kaum samurai (bushi) menduduki posisi paling tinggi karena memegang tampuk kekuasaan. Sebagai kelas penguasa, jalan hidup serta tingkah laku bushi menjadi cerminan yang mewakili kehidupan masyarakat feodal yang berpusat pada pola shuju kankei, atau hubungan atasan – bawahan (majikan-bawahan). Dalam pola ini terkandung ajaran tingkah laku yang diantaranya adalah penghormatan terhadap atasan, berani berkorban, balas budi, dan kesungguhan. Semua ini juga tercermin pada tingkah laku bushi di medan perang yang berusaha mengejar nama baik dan harga diri dan berani berkorban demi tugas.

Untuk menjaga agar kaum samurai tetap setia kepada penguasa, mereka diwajibkan untuk mempelajari ajaran konfusius yang dianggap dapat membangkitkan kepatuhan dan pengabdian. Pada awalnya konfusius yang dianggap dapat membangkitkan kepatuhan dan pengabdian. Pada awalnya konfusianisme yang masuk ke Jepang pada sekitar abad ke enam hanya dipelajari oleh sebagian kecil masyarakat saja, khususnya kaum bangsawan dan pendeta Budha. Namun demikian, pada zaman Edo pengaruh ajaran konfusianisme semakin meluas, dan dipelajari kalangan masyarakat umum. Sehingga selanjutnya lahir dan berkembanglah pola ideal seorang samurai

yang kemudian dikenal dengan nama bushindo (jalan bushi/samurai). Hal tersebut merupakan penyatuan prinsip-prinsip kesetiaan dan keberanian samurai berdasarkan sikap moral ajaran konfusius yang menjadi pedoman moral bagi samurai, yang bercampur dengan ajaran Budha aliran Zen, dan Shinto yang sebelumnya sudah ada di Jepang. Zen mengajarkan adanya “harmoni”, sedangkan Shinto antara lain menekankan kesetiaan kepada negara, dan kaisar atau penguasa. Selain itu mereka juga menekankan pada kehormatan dan harga diri.

Bangsa Indonesia pun sebagaimana kita ketahui banyak memiliki kearifan lokal dan slogan-slogan yang sangat baik, yang dapat lebih merekatkan dan mempertebal semangat kebangsaan. Namun sepertinya belum dimanfaatkan secara maksimal, dan berhenti menjadi slogan semata. Hal tersebut belum dimasukkan kedalam program yang lebih sistematis dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sakuma Shozan yang berpendapat bahwa untuk mengejar ketinggalannya dari Barat, Jepang tidak bisa hanya berkiblat pada Barat saja. Hal ini memunculkan konsep manusia ideal, yakni wakon yosai, yang berarti berjiwa Jepang dan menguasai ilmu pengetahuan barat. Jadi untuk menjadi modern tidak harus meninggalkan etika ketimuran, yang dalam hal ini adalah etika konfusius yang selama ini dianut mereka. Jika dilihat secara menyeluruh hal ini tidak pula terlepas dari semangat nasionalisme yang menjadi perekat dalam mencapai tujuan bersama.

Pada awal Meiji, loyalitas terhadap shogun digantikan oleh loyalitas kepada negara dan kaisar. Masalah loyalitas yang merupakan bagian dari nilai-nilai bushindo ini dapat di jumpai dalam karya-karya sastra pasca Restorasi Meiji. Misalnya dalam Sakai Jiken karya Mori Ogai, dengan jelas dapat dilihat pengorbanan diri demi negara dengan melakukan seppuku atau harakiri (bunuh diri dengan memotong perut). Karya-karya seperti ini cukup banyak menghiasi ranah kesustraan Jepang modern.

Perlu mendapat perhatian dalam permasalahan di atas adalah sikap pemerintah dan masyarakat terhadap para anggota pasukan Jepang yang mati untuk negaranya. Mereka diperlakukan sebagai pahlawan meski ditentang negara lain. Maka dari itu hingga saat ini kunjungan ke Kuil Yasukuni, tempat banyak dimakamkannya tentara Jepang korban perang tetap dilakukan oleh anggota parlemen dan perdana menteri Jepang meski mendapat kecaman dari berbagai negara, khususnya Korea dan China karena menganggap tempat tersebut sebagai tempat pemakaman penjahat perang.

Restorasi Meiji menjadikan Jepang negara kuat, dan dalam Perang Dunia II posisi Jepang menjadi lebih kuat lagi. Selama periode ini terdapat pilot-pilot pesawat tempur dalam sebuah skuadron yang dikenal dengan *Kamikaze*, yang berarti "Angin Dewa". Para pilot ini menjadi harapan satu - satunya ketika mereka menderita kekalahan atau terdesak dalam peperangan. Kamikaze adalah para pilot yang memperlihatkan loyalitas dengan bersedia mati demi tugas sebagaimana para samurai yang menjadi inspirasi mereka. Dewasa ini pun, semangat tersebut muncul dalam bentuk misalnya bahwa orang Jepang rata-rata masih sangat menghargai atasan mereka, sejumlah pebisnis melakukan mundur dari jabatan atau bahkan bunuh diri ketika dipecat atau melakukan kesalahan fatal. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari nilai Bushido yang masih tersisa.

Pada zaman modern ini, di Jepang samurai diangkat kembali dengan rasa hormat, dan dihargai seperti pahlawan. Sehingga dengan mudah kita bisa mendapati karya sastra dan film yang berkisah tentang sepak terjang kelas prajurit ini. Contoh dari yang paling terkenal adalah film produksi tahun 1954 'Tujuh Samurai' (*Sichinin no Samurai*) arahan sutradara besar Kurosawa Akira. Bahkan film animasi yang pernah sangat populer 'Sailor Moon' dikatakan mempunyai unsur-unsur pengaruh dari samurai. Ini hanya sedikit contoh dari budaya populer Jepang yang memperkenalkan samurai atau etika bushido kepada dunia, dan memelihara legenda Jepang agar tetap hidup. Masih

banyak lagi contoh lain, yang dapat dijumpai misalnya pada komik, video game, dan sebagainya.

### **Semangat Kebangsaan Indonesia**

Kebangsaan atau nasionalisme adalah loyalitas dan kecintaan kepada suatu bangsa; khususnya sebagai suatu rasa kesadaran nasional untuk memuliakan suatu bangsa di atas yang lain. Karenanya, nasionalisme sering dipandang sebagai ideologi pemelihara bangsa (Eriksen, 1993). Ada beberapa unsur yang mempengaruhi atau membentuk nasionalisme atau kebangsaan. Secara obyektif nasionalisme terbentuk oleh unsur-unsur bahasa, ras, etnik, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaran (Anderson, 2001). Dalam perkembangan berikutnya muncul unsur-unsur tambahan, yaitu adanya hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam masyarakatnya dan adanya persamaan kepentingan ekonomi, yang kemudian disebut nasionalisme modern (Eriksen, 1993).

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Kini nasionalisme menghadapi tantangan besar dari pusaran peradaban baru bernama globalisasi. Nasionalisme bangsa Indonesia sedang diuji fleksibilitasnya, dalam arti kemampuan untuk berubah sehingga tepat dalam menjawab tantangan zaman. Fleksibilitas tidaklah mengurangi jiwa nasionalisme, justru sebaliknya, fleksibilitas menunjukkan begitu dalamnya nasionalisme mengakar sehingga dalam waktu bersamaan dia tetap hidup dan terus-menerus bermetamorfosis.

Untuk konteks masyarakat global seperti sekarang ini dimana pilihan kebangsaan menjadi semakin relatif artinya setidaknya ada satu visi alternatif yang layak dipertimbangkan untuk kedepan, yaitu multikultural nasionalisme. Penting bagi bangsa Indonesia untuk memahami jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap persatuan dan

kesatuan bangsa di era globalisasi. Untuk itu, nasionalisme Indonesia perlu diretualisasi dan direvitalisasi.

Nasionalisme generasi sebelum kemerdekaan lebih ditujukan ke arah lawan asing dari luar, sedangkan bagi nasionalisme kini yang hidup dalam pusaran globalisasi, batas-batas geopolitis semakin kabur. Perjuangan kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan dari nasionalisme kini tidak hanya diarahkan ke pihak-pihak asing tetapi juga ke dalam negeri sendiri, bahkan diri sendiri. Globalisasi merupakan proses sejarah yang tak terelakkan. Kita tidak mungkin lari apalagi menolak serta menghentikan proses globalisasi.

Wujud ikatan kebangsaan yang masih hidup di masyarakat adalah ikatan keluarga dan kesukuan (etnisitas), loyalitas pada ideologi, kesamaan sejarah (perasaan senasib dan sepenanggungan), dan sikap keagamaan yang toleran. Sedangkan wujud ikatan kebangsaan baru untuk masa depan, adalah ikatan kebangsaan yang dapat mengatasi dimensi global dan lokal, menjadikan budaya sebagai dasar pembangunan materi (ekonomi). Ikatan kebangsaan ini berkarakter religiusitas, multikultural, dan berkeadilan.

Ada beberapa hal penting yang dapat menjadi modal utama dalam memperkokoh integrasi nasional, dan sekaligus mempertebal identitas dan kebanggaan nasional, di antaranya adalah, Bahasa Indonesia yang dapat menjadi pemersatu. Pemanfaatan dan pengembangan berbagai keunggulan lokal pun dapat mempertebal identitas dan kebanggaan nasional kita. Namun hal ini harus pula diiringi dengan sosialisasi kesadaran akan multikulturalisme Indonesia melalui berbagai cara seperti melalui pendidikan, media massa, kesenian tradisional, wisata budaya, dan lain-lain.

Pengaruh globalisasi tak terkecuali juga masuk melalui pariwisata, budaya populer (pop culture). Dalam pengembangan atau pembangunan pariwisata di negara kita, prinsip-prinsip nasionalisme harus tetap menjadi landasan. Tampaknya saat ini belum ada

strategi yang jelas dalam menghadapi serbuan budaya populer dari mancanegara. Kita memiliki unsur-unsur kebudayaan suku bangsa yang perlu kita lestarikan sekaligus dikembangkan. Upacara-upacara perlu dilestarikan, dihormati, namun sejalan dengan itu dapat dijadikan kekayaan wisata budaya.

Jepang mampu mengemas dan memadukan wisata modern dengan tradisi dengan baik. Pemerintah Jepang berupaya mendorong kreativitas dalam menggali dan mendayagunakan kekuatan daerah, baik yang berupa wisata ekologi, wisata budaya, dan wisata ziarah. Jepang tampaknya secara sadar, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan terus berusaha memupuk semangat nasionalisme.

## **Penutup**

Pergantian kekuasaan yang dihasilkan oleh gelombang reformasi menyisakan berbagai konflik dalam masyarakat, baik konflik yang bersifat horizontal, seperti : di Sambas, Sampit, Poso, Maluku maupun konflik yang bersifat vertikal, seperti: di Aceh dan Papua. Kini diperlukan nasionalisme yang dapat mengatasi globalisasi dan fanatisme kedaerahan.

Di Jepangun sejak Restorasi Meiji, meskipun merupakan bangsa yang relatif homogen bukan berarti tidak ada konflik dan fanatisme kedaerahan. Bukan pula tidak ada yang anti terhadap kaisar, dan pemerintah. Namun berbagai masalah yang muncul dapat diredam sehingga tidak menjadi konflik berkepanjangan. Konsep harmoni, saling menghargai, dan berbagai kearifan lain dipergunakan dengan baik untuk memupuk nasionalisme secara konsisten.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam memelihara dan mempertebal ikatan kebangsaan Indonesia harus memperhatikan tiga hal, yakni yang berlandaskan Ketuhanan, Multikulturalisme, dan Berkeadilan (distribusi dan alokasi yang adil dalam masyarakat).

Nasionalisme terus bernuansa multikultural, yakni menghargai keberagaman seperti perbedaan etnis dan budaya, yang harus pula didukung faktor lain seperti ekonomi, politik, hukum dan militer, secara kuantitatif banyak diabaikan sehingga ketidakadilan di dalam empat faktor tersebut. Dengan demikian, agar keempat faktor tersebut dapat berkontribusi positif terhadap ikatan kebangsaan, maka aspek keadilan di keempat faktor tersebut harus menjadi pijakan.

Pemerintah Indonesia seharusnya membangun dengan memprioritaskan pembangunan manusia yang cerdas, yang memiliki kehidupan berharkat dan martabat tinggi, tidak rendah diri, sehingga mampu mendisain sendiri arah dan tujuan membangun bangsa dan negara, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak asing, baik negara atau kekuatan asing. Dalam konteks ini nasionalisme merupakan landasan utama membangun negara. Dengan mempertahankan nasionalisme yang diperoleh melalui perjuangan kemerdekaan yang berat, kerjasama dengan dunia internasional harus dilandasi oleh prinsip kesetaraan dan kemitraan, bukan ketergantungan. Inilah yang harus ditanamkan pada bangsa Indonesia, dalam pendidikan mengenai karakter dan pekerti bangsa.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (1999): "Nasionalisme di Indonesia: Asal usul dan Perkembangannya," dalam Sejarah: Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi, Jakarta: MSI dan Arsip Nasional.
- Akamatsu, Paul. 1972. Meiji 1868. London: Allen & Unwin
- Allen, G.C 1962. A Short Economic History of Japan. London: Allen & Unwin
- Amal, Ichlasul dan Armaid Armawi (1998): Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Anderso, Benedict (2001): Komunitas-Komunitas Terbayang . Terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bary, Wm.Theodore de, ed. 1964. Sources of Japanese Tradition. Vol. II. New York: Columbia University Press.
- Beckmann, George M. 1975. The Making of Meiji Constitution. Connecticut: Greenwood Press Publisher
- Bowring, Richard John. 1979. Mori Ogai and The Modernization of Japanese Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Bary, Wm. Theodeore, ed. 1974. Sources of Japanese Traditional. New York: Colombia University Press
- Dore, R.P, ed. 1967. Aspects of Social Change in Modern Japan. Princeton: Princeton U.P
- Eriksen, T.H. (1993): Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives.  
London-Boulder, Colorado. Pluto Press

- Fewster, Stuart dan Gorton. 1988. Japan: From Shogun to Superstate. Woodchurch: Paul Norbury Publications
- Guibernau, Montserrat & John Rex, ed. (1999). The Ethnicity: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Malden: MA. Backwell Publisher Inc.
- Harrison, E.J. 1982. The Fighting Spirit of Japan. Woodstock, NY. The Overlook Press.
- Irokawa Daikichi 1985. The Culture of Meiji Periode. Princeton: Princeton University Press
- Jansen, Marius B, ed 1972. Changing Japanese Attitude Toward Modernization. Princeton: Princeton University Press
- Kosaka, Masaki. 1969. Japanese Thought in The Meiji Era. Tokyo: The Toyo Bunko
- Kahin, G. Mc. T. (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell University Press, Ithaca
- Kohn, Hans (1976): Nasionalisme: Arti dan Sejarahanya. Terjemahan Sumantri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lockwood, william W, ed. 1965. The State and Economic Enterprise in Japan. Princeton: Princeton University Press
- Minami Hiroshi, 1993. Nihonteki Jiga. Tokyo: Iwanami Shinsho
- Nakamura Fumio. 1992. Mori Ogai to Meiji Kokka. Tokyo: Sanichi Shobo
- Newman, J. 1989. Bushido: The Way of the Warrior. Leicester, UK: Magna Books.
- Nitobe Inazo. 1974. Bushido, The Soul of Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle.
- \_\_\_\_\_ 2003. Bushido \_\_\_\_Ima, Yotte Tasubeki "Nihon no Seishin" Tokyo: PHP Editors Group.

- Pyle, Keneth B. 1988. *Generasi Baru Zaman Meiji – Pergolakan Mencari Identitas. Nasional (1885-1895)*. Jakarta: Gramedia.
- Rasyid, Ryaas (1998): *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, menghadapi tantangan Globalisas*, Jakarta: PT Yarsif Watampone
- Sato Masahiro. 2001. *Nihon no kokoro to “Bushido”*. Tokyo: Kyobunkan.
- Smith, Anthony D. (2003): *Nasionalisme, Teori, Ideologi, Sejarah*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Trimberger, Ellen Kay. 1978. *Revolution From Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, Egypt and Peru*. New Brunswick: Transaction Books
- Yamamoto Hirofumi. 2003. *Bushi to Seken-Naze Shi ni Isogunoka*. Tokyo: Chuko Shinsho
- Yuasa, Yasuo. 1967. *Keizai jin no Moral*. Tokyo: Doko Shinsho.

# PENDIDIKAN PADA MASA KOLONIAL SEGREGASI, LIBERASI DAN EMANSIPASI<sup>1</sup>

Hariyono<sup>2</sup>

Keberadaan manusia yang selalu terkait dengan kebudayaan memberi potensi manusia untuk belajar dan mengembangkan diri secara maksimal. Manusia selain berkembang tumbuh dalam budaya juga ikut mengembang tumbuhkan kebudayaan. Belajar menjadi suatu keniscayaan bagi manusia untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam berkebudayaan manusia tidak hanya dapat bertanya bagaimana sifat sesuatu melainkan juga dapat mengusulkan bagaimana sesuatu harus bersifat. Nilai-nilai kemanusiaan dikembangkan dan diaktualisasikan melalui proses pendidikan. Sayangnya, tidak selamanya manusia baik secara individual maupun social mampu menyadari dan mengaktualisasikan potensi belajar (*learning capability*) yang dimiliki. Akibatnya kebudayaan terasa membeku. Manusia terkurung dan terkungkung dalam kebudayaan. Potensi diri dan kemampuan komunitasnya untuk belajar (*community capacity for learning*) mengalami stagnasi bahkan kemunduran dan ketidakberdayaan. Biasanya mereka mudah menjadi objek penghisapan dan penindasan individu dan atau komunitas lain. Masyarakat yang mengalami suatu dominasi, eksploitasi serta hegemoni mudah terjerembab dalam ketidakberdayaan. Persepsi dan konsep diri yang dimiliki mengalami suatu distorsi. Mereka mudah silau dan terpujau dengan kekuatan di luar dirinya termasuk prestasi bangsa lain. Kepercayaan diri dan harga diri terperosok dalam lembah penindasan yang seolah tidak dapat

---

<sup>1</sup>Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Pluralisme Dalam Gerakan Nasionalisme di Indonesia” oleh Dirjen Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta pada tanggal 12 September 2012.

<sup>2</sup>Penulis adalah Staf Pengajar di Jurusan Sejarah, fakultas Ilmu sosial, Universitas negeri Malang

diatasi. Mereka cenderung menggunakan cara mengatasi masalah ruminatif yaitu cenderung memusatkan perhatian dengan hanya memikirkan secara berulang keterpurukan atau depresi yang dihadapi dan enggan melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Barangkali konsep Geertz tentang “involusi” dapat digunakan untuk menjelaskan budaya masyarakat Nusantara yang mengalami pengkerdilan.<sup>3</sup>

Situasi tersebut pernah terjadi pada sebagian besar bangsa Nusantara setelah lama dijajah oleh penguasa kolonial. Mereka kehilangan perspektif sejarah dan perubahan arah kedepan yang lebih baik. Begitu dikuasanya lautan oleh VOC dan diteruskan pemerintah kolonial Belanda, bangsa Nusantara kehilangan kancah pelayaran yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Demikian pula rute perdagangan yang telah di jajah oleh nenek moyang dipotong oleh monopoli yang diterapkan oleh VOC dan atau pemerintah kolonial. Konsekuensi dari hal tersebut menyebabkan masyarakat Nusantara tidak dapat berkiperah dan berkreasi dengan kebudayaannya secara dinamis dan kreatif.

Bangsa Nusantara telah kehilangan memori keberhasilan yang pernah dialami oleh nenek moyangnya. Pada saat masuknya peradaban Hindu-Budha dan Islam mereka mampu melakukan suatu sintesa budaya. Melalui *locol genius* yang dikembangkan muncul stupa Borobudur yang memadukan peradaban India dan peradapan Nusantara. Demikian pula pada saat masuknya Islam, muncul masjid dan pesantren yang ber-“aroma” khas . Keduanya adalah contoh dari budaya material yang mengagumkan sebelum Nusantara jadi bangsa taklukan. Sedangkan budaya sastra dan atau material lainnya masih cukup banyak. Bangsa Nusantara mengalami marginalisasi dan dehumanisasi selama dijajah bangsa asing. Warga Nusantara dipaksa melayani bangsa asing dalam pelbagai bidang kehidupan. Dalam

---

<sup>3</sup>Lihat Lifford Geertz. 1983. *Involusi Pertanian, Proses perubahan ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara.

bidang politik, penguasa kolonial hanya mempertahankan elit pribumi yang loyal dan penurut. Mereka yang kritis dan berani disisihkan dan diasingkan dari rakyatnya. Beberapa tokoh (E.F.E. Douwes Dekker. Suwardi Suryaningrat dan Ciptomangunkusumo) yang berusaha menyatukan potensi dan mengembangkan pemikiran radikal, yaitu *Indische Party* tidak diberi hak berkembang oleh pengusaha kolonial. Dalam bidang ekonomi masyarakat Nusantara hanya dijadikan sebagai pekerjaan kasar dan disisihkan secara sistematis dari dunia pelayaran dan perniagaan. Dalam bidang budaya mereka hanya menjadi resipien budaya. Penguasa kolonial tidak hanya berhasil mengeksploitasi hasil bumi dan tenaga kerja Indonesia, melainkan juga harga diri dan daya hidup masyarakat Nusantara.<sup>4</sup> Potensi diri sebagai makhluk yang berpikir tidak dapat diaktualisasikan. Seolah aktivitas yang ada dijalani tanpa berpikir. Kebiasaan tersebut menyebabkan sebagian besar diantara mereka malas berpikir. Kalau diajak untuk berpikir serius ‘mikir-mikir’. Timbullah stereotype manusia Nusantara yang bermental “Inlander”. Uniknya sosok yang menyadari akan keterbelakangan dan keterkungkungan bangsa Nusantara sebagian besar adalah anak-anak pergerakan yang telah berkenalan dan mengenyam pendidikan atau pengetahuan modern yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pendidikan kolonial yang sangat diskriminatif dan elitis ternyata juga memberi ruang bagi sebagian kecil anak-anak Nusantara tercerahkan. Mereka berhasil merekonstruksi kesadaran kebangsaan yang inklusif sekaligus persamaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Untuk itulah dalam makalah ini, penulis mengajak pembaca untuk bersikap jujur dan

---

<sup>4</sup>Para perintis pergerakan nasional dan pendiri bangsa telah banyak mengungkapkan hal tersebut. Misal Abdul Rivai (1871-1933) pernah menyatakan bahwa masyarakat pribumi, khususnya Jawa telah mengalami demoralisasi yang disebabkan oleh system kolonial dan feodal. “Kesadaran akan kekurangan – kekurangan diri, hinaan dan cemoohan yang dialami, dan kecilnya hasil kerja yang berat mengakibatkan runtuhnya moral dan fisik orang Jawa” dalam Poeze, H.A, 2008. Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, Jakarta: Gramedia, KITLV. Hal.36.

adil terhadap praksis pendidikan di masa kolonial. Pendidikan kolonial memang tidak dapat disangkal bertujuan untuk melanggengkan dominasi, hegemoni dan eksploitasi penguasa kolonial. Pendidikan sangat elitis dan segregatif. Tetapi, pendidikan kolonial juga mampu memberi ruang pada anak-anak Nusantara yang terlibat didalamnya keluar dari imanensi budaya yang mengungkung bangsanya.

Anak-anak pergerakan yang tercerahkan tersebut kemudian berhasil melakukan “refleksi ganda”. Sebagai insan yang terdidik mereka tidak hanya berhasil mengambil jarak dan krisis terhadap kebudayaan Barat. Anak-anak pergerakan juga berhasil mengambil jarak dan kritis terhadap kebudayaan nenek moyangnya. Mereka tidak hanya berusaha melihat dan mempelajari realitas bangsanya secara obyektif melainkan juga berusaha merekonstruksi bagaimana realitas bangsanya ke depan menjadi.

Mereka tidak hanya kritis terhadap imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme tetapi juga sangat kritis terhadap feodalisme budaya nenek moyangnya. Segala bentuk ketidakadilan yang menyebabkan pembodohan dan pemiskinan ingin ditentang. Mereka mendambakan suatu persamaan harkat dan martabat manusia dengan tetap menghargai perbedaan yang ada. Kondisi tersebut menyemai konsepsi nasionalisme yang inklusif. Sebagian di antara mereka berhasil merumuskan praksis pendidikan yang emansipatoris dan transformatif. Praksis pendidikan yang dilakukan oleh Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Moh. Syafei adalah contohnya.

### **Pendidikan segregatif Sumber Ketidakadilan**

Pendidikan ala barat sebenarnya sudah didirikan oleh pemerintah kolonial sejak abad XVI di Nusantara. Misalnya, Portugis sudah mulai mendirikan pendidikan Seminarie di Ternate pada tahun 1536. Pada tahun 1546 Portugis juga sudah berhasil mendirikan pendidikan di Ambon. Demikian pula pendirian sekolah agama di

Timor, Rote dan Sawu telah lama dilakukan oleh Portugis pada abad XVI. Pendidikan yang dikembangkan oleh Portugis cenderung dikaitkan dengan penyebaran agama Katholik. Uniknya Belanda pada saat mengenalkan pendidikan juga cenderung memfokuskan pada daerah-daerah yang pernah mendapat pengaruh Portugis. Daerah yang belum banyak dipengaruhi oleh pendidikan agama misionais Portugis kurang dikembangkan. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan yang pertama kali dikenalkan oleh pemerintah kolonial sangat eksklusif yaitu yang terkait dengan penyebaran agama.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan paradigma pendidikan di Barat sejak masa pencerahan (Aufklarung) pendidikan yang memfokuskan pada agama mulai ditinggalkan pemerintah kolonial. Paradigma pendidikan yang berbasis pada liberalism mulai dominan. Pendidikan menjadi netral dari agama<sup>6</sup>. Gubernur Daendels memerintahkan para bupati di Jawa untuk mendirikan sekolah di setiap distrik guna memberi pendidikan pada rakyat. Walaupun kebijakan Daendels belum sempat direalisasi tetapi berhasil mengenalkan pada kepala daerah pribumi akan pentingnya pendidikan.<sup>7</sup>

Kebutuhan pendidikan modern mulai dirasakan penting dan tidak mendesak untuk dilaksanakan setelah praktek Tanam Paksa berhasil diterapkan. Pemerintah kolonial makin merasa perlu pegawai yang mengenal ketrampilan teknis dengan gaji murah. Pada era tahun 1849 – 1852 berhasil didirikan 20 sekolah untuk anak-anak bumiputera dari kalangan bangsawan di setiap karesidenan. Untuk menunjang kebutuhan guru pada tahun 1852 didirikan sekolah guru (Kweekschool)

---

<sup>5</sup>Lihat Djumhur 1 & Danasuparta, H. 1976. Sejarah Pendidikan. Bandung .CV Ilmu. Hal. 115. Juga Fox, J.J 1996. Panen Lontar. Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<sup>6</sup>Lihat Kartodirdjo, S. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium samapi Imperium, Jakarta: Gramedia, Hal.353

<sup>7</sup>Djumhur & Danasuparta, 1976 hal. 122

yang pertama kali di Surakarta. Kemudian didirikan sekolah guru di beberapa kota lain, misalnya Bukittinggi (1856), Tapanuli (1864), Bandung (1866), Tondano (1873), Ambon (1874), Probolinggo (1875), Banjarmasin (1875), Makasar (1876) dan Padang Sidempuan (1879).

Gerakan mendirikan lembaga pendidikan tersebut makin membesar dan intensif sejak perusahaan swasta berhasil mengembangkan usahanya di era perekonomian liberal yang diterapkan sejak tahun 1870. Kebutuhan akan tenaga terampil makin mendesak untuk dipenuhi. Mendatangkan orang Eropa yang terdidik membutuhkan biaya yang mahal. Kebutuhan perusahaan modern serta birokrasi pemerintah bersinggungan dengan keprihatinan sebagian kecil orang Belanda yang prihatin dengan nasib kaum pribumi.

Kelompok yang terakhir tersebut lebih dikenal dengan istilah kaum etnis. Jadi perpaduan antara kebutuhan industry dan pejuang nilai-nilai kemanusiaan mendorong diterapkannya kebijakan politik etnis.<sup>8</sup>

Sejak saat ini muncullah belbagai lembaga pendidikan modern tingkat menengah dan tinggi. Seiring dengan struktur masyarakat di Nusantara yang oleh Belanda dibedakan antara golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputera maka pendidikan yang diberlakukan masih tetap bersifat segregatif. Ada sekolah khusus untuk anak-anak Eropa misalnya ELS, Europese Lagers School (Sekolah Dasar Eropa), Timur Asing misalnya HAS, Hollands-Arabische School (Sekolah Belanda-Arab) dan HCS, Hollands-Chinesche School (Sekolah Belanda-China) serta sekolah untuk golongan Bumiputera yang dibagi menjadi dua yaitu untuk golongan elit atau priyayi misalnya HIS, Hollands-Inlandse School dan untuk rakyat biasa yaitu Volkschool. Pendidikan masih bersifat diskriminatif dan elitis. Hanya sebagian kecil, yaitu mereka yang berasal dari keluarga bangsawan tinggi atau rekomendasi pejabat

---

<sup>8</sup>Lihat Wertheim, W.F 1956. Indonesian Society in Transition. Bandung: Sumur Bandung. Hal. 56.

Belanda, warga pribumi yang dapat masuk sekolah bangsa Eropa.

Politik pendidikan kolonial di abad XIX bagi golongan bumiputera menurut Sartono Kartodirdjo pada umumnya didasarkan pada pemikiran liberalism yang netral agama, menggunakan bahasa daerah (*landstaal*) dan enggan menggunakan bahasa Belanda, mengutamakan pengetahuan dan ketrampilan teknis guna memenuhi kebutuhan praktis dan lebih mengkaitkan dengan kebudayaannya sendiri.<sup>9</sup>

Sejak awal abad XX keberadaan lembaga pendidikan semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Politik etis telah menjadi pendorong utama berdiri dan berkembangnya pelbagai lembaga pendidikan modern. Bila awalnya sekolah guru HIK (*Hollands-Inlandes Kweekschool*) yang diutamakan maka beberapa sekolah menengah dan tinggi segera menyusul. Misalnya STOVIA (*School tot Opleiding voor Inlandse Artsen*)

Sekolah Persiapan Dokter untuk Pribumi, NIAS, *Nederlands Indise Arsten*, Sekolah Dokter Hindia Belanda, GHS, *Geneeskunde Hoge School*, Sekolah Tinggi kedokteran, THS, *Technise Hoge School*, Sekolah Tinggi Teknik, RHS, *Rechts Hoge School*, Sekolah Tinggi Hukum.

Tumbuh kembangnya pelbagai lembaga pendidikan pada masa kolonial tersebut masih tidak sebanding dengan pertambahan penduduk pribumi. Lembaga pendidikan yang bersifat diskriminatif dan elitis berjalan sangat lamban. Dan lapangan pekerjaan bagi golongan terpelajar pribumipun menjadi sangat terbatas akibat adanya diskriminasi di pelbagai bidang pekerjaan, baik di pemerintahan maupun swasta. Jabatan-jabatan strategis masih didominasi oleh

---

<sup>9</sup>Kartodirdjo, S. 1987. Hal. 391.

golongan Eropa Anak pribumi yang memiliki keahlian tinggi terus dipersulit mendahului jabatan yang strategis bergengsi.<sup>10</sup>

Permasalahan yang cukup menarik adalah posisi sebagian kecil anak bumiputera dari kelompok elit yang diperbolehkan menempuh di sekolah Eropa atau Belanda. Berkat jabatan orang tua dan atau rekomendasi pihak pejabat mereka dapat memperoleh pendidikan yang bermutu secara akademis. Hal ini dimungkinkan karena pendidikan pada masa kolonial juga menggunakan prinsip berkonkordansi dengan pendidikan yang ada di negeri Belanda. Sehingga mutu dan proses pendidikan berusaha dijaga secara serius. Pada satu sisi sistem konkordansi menceraibera anak Nusantara dari nilai budaya namun pada sisi lain memperoleh pendidikan yang setara dengan pendidikan di negeri Belanda. Hal ini yang memungkinkan beberapa anak Indonesia dapat melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda.

Namun secara social mereka harus menerima diperlakukan tidakadil, baik oleh paraguru maupun oleh siswa lainnya. Perlakuan tidak adil tersebut membawa pengalaman riil bagi anak-anak bumiputera. Sensivitas mereka terusik. Bagi mereka melalui belajar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual melainkan juga mengalami peningkatan hati nurani “ Sensitivity to problems” bagi mereka mengalami sebuah lompatan kreatif dalam proses belajar sekaligus praktis kehidupan.<sup>11</sup> Sebagai golongan elit terdidik baru mereka mendapat perlakuan yang berbeda baik oleh kalangan penjajah asing maupun oleh elit pribumi khususnya dari kalangan priyayi atas.

Pengalaman hidup tersebut memberikan suatu keresahan (anxiety) pada kalangan siswa. Mereka telah mengenal pelbagai

---

<sup>10</sup>Kartodirjo, S 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari kolonialisme sampai Nasionalisme , Jakarta; Gramedia pustaka Utama. Hal.77

<sup>11</sup>Van Peursen , C.A 1975. Strategi Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 156

pemikiran yang demokratis namun dalam praktek kehidupan di Nusantara masyarakat pribumi selalu diremehkan dan dilecehkan.

Mereka sangat krisis terhadap kemiskinan, kebodohan serta ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Nusantara. Mereka terus berusaha mencari penyebab kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan. Mental penghambaan yang dialami oleh masyarakat nusantara juga dianggap sebagai bagian dari kemiskinan.<sup>12</sup> Masyarakat Nusantara yang mengidap inferioritas memungkinkan kekuatan asing terus mengeksploitasi tanpa perlawanan yang cerdas dan visioner. Kalangan terdidik mampu menjadi protagonis pergerakan nasional. Sistem kolonial yang segregatif dan eksploitatif mampu menjadi kancah bagi anak-anak Nusantara untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia Indonesia tanpa menegasi kodrat sejarah bangsa yang sangat beragam dari aspek budaya, etnis, ras dan agama. Kajian dan pemahaman mereka tentang bagaimana sifat bangsa Indonesia juga memberikan suatu perspektif dan kepekaan bagaimana bangsa Indonesia seharusnya bersifat ke depan.

### **Merawat Kebhinekaan dan Memperjuangkan Persamaan**

Sistem pendidikan yang segregatif tidak menutup potensi diri mereka melihat realitas secara cerdas. Pengenalan mereka dengan “dunia barat” menyadarkan mereka akan adanya perbedaan-perbedaan tingkat dan gaya hidup masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa, khususnya Belanda. Mereka sadar akan adanya pola kehidupan tradisional masyarakat pribumi yang masih dibelenggu oleh adat istiadat yang kolot. Golongan terdidik mengalami keresahan, anxiety.

Uniknya keresahan yang dialami tokoh-tokoh di Nusantara di masa kolonial justru mampu membawa transformasi diri. Pada diri

<sup>12</sup>Lihat Hariyono.2011. Demokrasi Radikal, Blue Print Demokrasi Mandiri bangsa. Malang. Lintas Kata. Hal. 31 – 46.

mereka terjadi suatu lompatan eksistensial yang cukup positif. Mereka menjadi sangat kritis terhadap ketidakadilan yang ada. Mereka tidak hanya menuntut hilangnya ketidakadilan yang disebabkan oleh system yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Imperialisme, kapitalisme dan kolonialisme menyebabkan kemiskinan dan kebodohan melanda masyarakat Nusantara. Mereka juga prihatin dengan feodalisme serta gaya hidup tradisional yang beku serta membelenggu.

Akibatnya feodalisme dengan mudah dijadikan sarana penguasa colonial maupun feodal sangat merugikan rakyat nusantara. Mereka berusaha melakukan “liberasi” terhadap system colonial yang menciptakan imanensi budaya masyarakat Nusantara.

Perlakuan tidak adil hanya akan menimbulkan ketidaksamaan derajat, harkat dan martabat manusia. Ketika berusaha mencari alternative pemecahan yang dihadapi oleh bangsanya. Secara konsep berkembanglah wacana yang terkait dengan prinsip-prinsip kekuasaan yang bernuansa ‘*power with*’. Kekuasaan yang mengandalkan dominasi, eksploitasi dan hegemoni sebagai ciri utama kekuasaan yang berparadigma “*power over*” sebagaimana diterapkan oleh pemerintah kolonial sangat tidak manusiawi. Mereka mengusulkan suatu kekuasaan yang lebih menekankan pada persamaan dan sinergitas.<sup>13</sup>

Perkenalan anak-anak Nusantara memungkinkan munculnya cara pandang baru terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Terjadi suatu “ akibat tak tersengaja ” (*unintended consequence*) dari lembaga pendidikan masa kolonial yaitu munculnya intelektual kritis dan memiliki komitmen kebangsaan yang sangat tinggi. Merekalah yang kemudian menjadi tokoh pergerakan yang

---

<sup>13</sup>Lihat Kreisberg, S. 1992. *Transforming Power, Domination, Empowerment, and Education*. New York; State University of New York Press.

sangat tinggi. Merekalah yang kemudian menjadi tokoh pergerakan nasional sekaligus pencerah budaya bangsanya.<sup>14</sup>

Kalangan pelajar yang sempat belajar di Belanda menemukan suatu realitas yang sangat kontradiktif dengan praktek kehidupan di Nusantara. Mereka merasa dihargai dan dihormati di negeri penjajah bahkan dapat menyuruh orang Belanda. Sebaliknya di negeri sendiri mereka dipisahkan dan dipaksa menghormati golongan Eropa. Bahkan dalam ruang dan fasilitas umum orang pribumi sering dianalogikan dengan anjing. Banyak muncul larangan yang melecehkan, misalnya: "*Verboden voor Inlander en honden*" (Dilarang masuk bagi pribumi dan anjing). Pelecehan dan internalisasi melalui dominasi dan hegemoni tentang sikap mental inferior bangsa Indonesia ingin diakhiri.

Bagi anak-anak Indonesia yang sempat pergi dan atau belajar ke negeri Belanda langsung menghadapi suatu kenyataan yang riil dan kadang mampu memberikan resonansi bagi tumbuhnya kesadaran eksistensial. Pertama, mereka mengalami perlakuan sederajat dengan orang Eropa, suatu kehidupan yang tidak mungkin dapat dialami selama ada di Hindia Belanda. Kedua, ketercabutan mereka dari akar budaya menimbulkan suatu keresahan sekaligus mendorong pencarian identitas pribadi yang lebih cocok dan ideal. Posisinya yang jauh dari Indonesia memungkinkan golongan terdidik ini mengambil distansi dan meminimalisasi sekat-sekat primordial yang ada di Indonesia. Bahkan mereka mampu menciptakan suatu alternative nasionalisme yang lebih sesuai dengan kondisi historis dan sosiologis masyarakat Indonesia dengan mengutamakan persatuan.<sup>15</sup> Munculnya pemikiran radikal dan revolusioner dari Indische party yang mengutamakan persamaan derajat dan persatuan diantara warga nusantara jelas

---

<sup>14</sup>Majid, N. 2004. Indonesia Kita. Jakarta. Gramedia pustaka Utama. Hal.33-37, Van Niel, R.1984. Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya. Juga lihat, kartodirdjo, S. 1993.

<sup>15</sup>Ingleson, J 1983, Jalan Ke pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934. Jakarta: LP3ES

mendahului jiwa dan pemikiran zamannya.

Kegagalan Indische Party sebagai suatu gerakan politik tidak menyurutkan suatu perjuangan . Justru salah satu tokohnya yaitu Suwardi Suryaningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro menjadi salah satu obor perjuangan pendidikan di Indonesia. Lembaga pendidikan masa colonial telah memberi ruang bagi mereka untuk berkembang tumbuh secara baik. Kosmologi kehidupan berpengaruh terhadap etos kerja mereka sehingga mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan tidak hanya mempelajari ketrampilan teknis pedagogi di kelas untuk anak-anak melainkan juga memiliki kompetensi dan komitmen sebagai guru masyarakat, bahkan ada yang menjadi guru bangsa.

Sebagian dari mereka berhasil merumuskan suatu pendidikan alternative yang lebih membumi dan membebaskan. Ki Hajar Dewantoro, salah satu tokoh Indische Party dan penulis artikel "*Als ik een Nederlander Was*" yang membuat penguasa kolonial marah menjadi salah satu pelopor pendidikan yang emansipatoris dan transformative. Beliau yang mengagumi pemikiran para ahli pendidikan humanis, misal Frederich Frobel, Maria Montessori dan Rabindranath Tagore berhasil meramu pemikiran besar dengan konteks budaya dan nilai budaya luhur Indonesia. Sekolah bagi Ki Hajar diharapkan bukan tempat latihan yang menyiksa dan membosankan, melainkan sebagai suatu "*taman bermain*". Melalui bermain diharapkan siswa dapat mengembangkan imginasi dan fantasinya sesuai dengan kodrat alam dengan tetap sadar dan peduli terhadap lingkungan budaya sekitarnya.

Ada 7 (tujuh) asa yang dijadikan landasan sekolah Taman Siswa, yaitu: mendasarkan pada kodrat alam dalam mendidik anak, menerapkan system among dalam proses pendidikan, mendasarkan pada budaya bangsa bukan budaya asing, berprinsip kerakyatan sehingga menghindari prinsip segregatif dan elitis, memupuk kepercayaan diri akan kemampuan sendiri, berusaha membiayai diri sendiri agar tidak tergantung dan diawasi oleh

pemerintah kolonial, dan keikhlasan lahir batin bagi pendidik dalam proses pembelajaran dengan para siswanya.<sup>16</sup>

Demikian pula praksis pendidikan yang dipelopori oleh tokoh Engku Muh. Sjafei dengan INS Kayutanam berhasil mengembangkan konsep pendidikan yang lebih membumi. Melalui ruang pendidik para siswanya melakukan dialog dengan guru serta mengembangkan ketrampilan di bengkel. Kesenian dijadikan sebagai salah satu media sekaligus penunjang para siswa mengembangkan pendidikan karakter yang tidak tercerabut dari akar budayanya.<sup>17</sup>

Selain dua tokoh dengan lembaga pendidikannya yang cukup fenomenal tersebut, pendidikan pada masa kolonial juga diwarnai oleh pendidikan alternative yang dikembangkan oleh umat islam baik melalui pondok pesantern maupun lembaga sekolah yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. Terbatasnya akses masyarakat kebanyakan untuk memperoleh pendidikan modern serta pertimbangan ideology dan budaya banyak anggota masyarakat yang lebih bangga mengirimkan putra – putrinya ke pesanteran. Kelompok ini banyak juga dipengaruhi dan berelasi dengan perkembangan pendidikan yang ada di Timur Tengahnya

Dengan makin berkembang pelbagai lembaga pendidikan yang ada makin memungkinkannya kesadaran akan adanya keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat Nusantara berusaha memberikan pembelajaran yang menghargai perbedaan yang ada, baik dalam skala pribadi maupun sosial. Mereka tidak berusaha melakukan segregasi. Dimensi persamaan sebagai sesama warga bangsa makin ditonjolkan.

---

<sup>16</sup>Tilaar, H.A.R 1995, 50 tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995. Jakarta: Gramedia, Widiasarana Indonesia. Hal. 38

<sup>17</sup>Untuk mengetahui beberapa prinsip pendidikan yang dikembangkan oleh Taman Siswa dan INS kayu tangan lihat Tilaar, H.A.R 2012. Perubahan Sosial dan pendidikan: pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 319-330.

Apalagi di beberapa sekolah tersebut selain menggunakan bahasa daerah juga menggunakan bahasa Melayu yang sudah distandarkan. Bahasa pengantar tersebut kemudian makin giat dikobarkan setelah kongres pemuda sepakat menempatkan bahasa Melayu sebagai representasi bahasa persatuan.

Melalui konsep toleransi dan solidaritas pelbagai perbedaan yang ada pada diri individu maupun masyarakat mampu dijumpai. Nilai tersebut tidak hanya berhenti pada tuntutan akan persamaan nasib melainkan juga menyuburkan proses kimiawi sosial tumbuhnya kesadaran nasional untuk memiliki persamaan derajat dengan bangsa lain, yaitu menginginkan bangsa yang merdeka dan setara dengan bangsa-bangsa lain.

Pendidikan yang dikembangkan oleh kalangan tokoh pribumi justru mampu memandirikan pelajar untuk mengembangkan prestasi, reputasi dan harga diri baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Para siswa difasilitasi dan dimotivasi untuk mengembangkan kemampuan belajar (*learning capacity*) secara terus menerus. Dalam konteks seperti itulah kita dapat memahami mengapa beberapa tokoh mampu memiliki kecerdasan yang tinggi walaupun yang bersangkutan secara formal tidak (atau belum) menyelesaikan pendidikan menengah atau tinggi. Tokoh A. Muis, Agus Salim, Hamka, Adam Malik, Tan Malaka dan Sjahrir merupakan contohnya. Demikian pula mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi tidak terjebak dalam perspektif ilmu lorong yang cenderung menggunakan kacamata “*myopic*”. Mereka tidak hanya tahu tentang disiplin yang digeluti melainkan juga banyak tahu pelbagai bidang di luar ilmu yang secara formal digeluti. Moh. Hatta walaupun mempelajari ekonomi juga banyak tahu tentang politik, ideologi, sejarah, budaya dan sebagainya. Demikian pula Soekarno yang secara formal mempelajari masalah teknik juga banyak tahu aspek politik, ekonomi, sejarah dan budaya.

## Mengembangkan Kearifan Edukasi Kolonial

Pola pendidikan yang segregatif dan elitis membawa konsekuensi yang tidak disengaja pada sebagian kecil kalangan terdidik. Wawasan mereka yang telah berkenalan dengan pengetahuan modern serta pengalaman riil yang dialami akan perlakuan tidak adil yang dirasakan berhasil mendorong timbulnya pemikiran yang visioner bagi kehidupan bangsanya. Mereka tidak lagi bersedia menjadi orang biasa atau orang kecil yang dikerdilkan. Mereka telah berpikir dan berjiwa besar. Dalam keterbatasan fasilitas, pendidikan masa koonial relative berhasil menumbuhkembangkan budaya belajar.

Berkat pendidikan yang berkualitas mereka memiliki etos belajar dan bekerja yang baik. Pendidikan masa kolonial yang tidak permisif terhadap penyelewengan dalam proses belajar dan hasil belajar memberi dampak pada mereka untuk memiliki pandangan dan sikap hidup yang positif. “ Sebagai generasi pertama yang menuntut pelajaran system Barat, mereka tidak hanya menyerap pengetahuan dari textbook pelbagai bidang pengetahuan. Tetapi juga mengalami pendidikan formal yang memolakan sikap baru mencakup disiplin social, pemikiran rasional, gaya hidup menurut jadwal waktu, dan nilai-nilai lainnya.”<sup>18</sup>

Pendidikan kolonial berhasil mengubah mindset sebagian anak bumiputera menjadi mindset yang dinamis dan berkembang. Rasa percaya diri, harga diri sebagai manusia yang berdaulat telah memuka cakrawala baru dalam melihat diri dan realitas. Sebagai elit modern mereka merasa memiliki tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus merajut budaya baru.<sup>19</sup> Melalui pemahaman realitas yang cukup mereka telah melakukan suatu proses

---

<sup>18</sup>Kartodirdjo, S. 1993. Hal. 82

<sup>19</sup>Hariyono. 2008 . Anak-anak Pergerakan dan pencerahan Budaya Indonesia. Dalam Djoko Marihandono. Titik Balik Historiografi di Indonesia. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. Hal. 269-286.

dialog yang intensif sehingga memunculkan pemikiran yang berbobot. Sebelum muncul istilah demokrasi deliberative dan pendidikan multicultural mereka telah berhasil merealisasikannya.

Pelbagai nilai dan praksis pendidikan yang dikembangkan oleh anak-anak pergerakan berhasil menciptakan akan pentingnya keberanian untuk berpikir merdeka. Melalui kedaulatan berpikir itulah seseorang dapat mengembangkan potensi diri dan bangsanya secara maksimal. Mereka berhasil menghindari terjadinya “*memetic engineering*” yang dilakukan oleh penguasa kolonial yang menempatkan lembaga pendidikan sebagai media “*demostikisasi*” (penjinakan) sekaligus hegemonic. Mereka sadar bahwa lembaga pendidikan kolonial tanpa diimbangi oleh kesadaran kritis akan memudahkan penguasa colonial merekayasanya sebagai aparatus ideologis yang dapat melanggengkan dominasi mereka atas bangsa bumiputra.

Pendidikan karakter menjadi bagian penting bagi lembaga pendidikan kolonial. Keutamaan akademis tidak dapat dicapai tanpa kejujuran . para siswa diharamkan untuk melakukan plagiasi apalagi menggunakan gelar akademis yang tidak diperoleh secara wajar. Munculnya sosok pribadi yang memiliki integritas tidak dapat dipisahkan dari dunia sosio cultural masyarakatnya. Untuk itulah pendidikan memilki posisi strategis memfasilitasi subjek didik untuk tidak tercerabut dari akar budayanya tetapi juga tidak terkungkung oleh kebudayaannya secara tradisional.

Kemampuan belajar baik sebagai pribadi maupun komunitas terus dikembangkan. Mereka berusaha memiliki dan mengembangkan ketrampilan teknis tanpa meninggalkan dimensi budaya masyarakatnya. Mereka berusaha menggali nilai-nilai tradisi yang ada dengan terus belajar dan membuka ufuk baru bagi perkembangan sejarah.<sup>20</sup> Mempelajari sejarah tidak berhenti untuk memahami peristiwa

---

<sup>20</sup>Kleden, I. 1988. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES. Hal. 247

dan realitas masa lampau melainkan yang utama untuk membuka kesadaran sejarah yang memungkinkan melihat realitas kini dan yang akan datang dari perspektif yang visioner.

Dalam akhir makalah ini barangkali apa yang dinyatakan oleh pendidik Paulo Freire, yang menyatakan bahwa:... ***dehumanisasi, meskipun merupakan fakta sejarah yang kongkret, bukanlah takdir yang turun dari langit, tetapi akibat tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekerasan dari tangan-tangan para penindas, yang pada gilirannya mendehumanisasikan kaum tertindas. Ada benarnya. Namun logika tersebut membawa konsekuensi bahwa persamaan dan penghargaan terhadap derajat manusia tidak muncul secara tiba-tiba. Kita semua perlu berjuang dan membangun solidaritas bersama meminimalisir proses dehumanisasi dan ketidakadilan yang dalam praksis pendidikan masa kini masih sering muncul. Semoga.***

# PLURALISME DAN FAKTOR GLOBAL DALAM GERAKAN NASIONALISME DI INDONESIA<sup>1</sup>

I Ketut Ardhana  
Universitas Udayana

## Abstrak

Indische party yang didirikan di era pemerintahan kolonial Belanda memberikan kontribusi signifikan dalam terbentuknya nasionalisme Indonesia. Ini terlihat dari kemampuan organisasi ini memberikan pengaruh pada kebangkitan rasa kebangsaan, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa dengan latar belakang masyarakat yang pluralis. Kebangkitan Indische Party ini tidak terlepas dari pengaruh global yang mempengaruhi gerakan nasionalisme di Indonesia. Bagaimana Indische Party yang dikenal sebagai salah satu partai orang Pribumi “indisch” sesuai dengan namanya mampu memberikan reaksi pada perkembangan global itu. Kemunculan partai ini dapat dianggap sebagai reaksi masyarakat pribumi dalam bingkai negara kolonial akibat perkembangan global yang dicirikan oleh adanya persaingan antar negara-negara Eropa. Ini menunjukkan, ketika negara tidak mampu mengurus kepentingan masyarakatnya, maka reaksi atas kekuasaan negara akan diwujudkan dalam bentuk kemunculan wadah organisasi yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Tulisan ini akan membahas bagaimana faktor-faktor global berpengaruh terhadap perkembangan nasionalisme di Indonesia yang memiliki karakteristik masyarakat pluralis. Untuk membahas persoalan ini akan dibahas beberapa hal antara lain pertama kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis dan faktor-faktor global menjelang munculnya gerakan nasionalisme? kedua, peran apa yang dimainkan oleh Indische Party dalam berhadapan dengan kebijakan kolonial dan ketiga kontribusi apa yang diberikan oleh Indische Party dalam terbentuknya aspek-aspek negara-bangsa? Inilah beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, dengan harapan akan dapat memahami lebih baik pemahaman akan pentingnya peran global, pluralisme dalam terbentuknya gerakan nasionalisme di Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang.

---

<sup>1</sup>Makalah disampaikan pada Seminar Nasional peringatan Satu Abad Indische Partij, dengan tema: “Pluralisme dalam Gerakan Nasionalisme di Indonesia: Faktor Global dalam Proses Gerakan Nasionalisme di Indonesia”. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2012 pada tanggal 12 September 2012 di Auditorium Museum Kebangkitan Nasional, Jalan Abdul Rachman Saleh No. 25 Jakarta.

## I. Pendahuluan

Setiap tanggal 28 Oktober, setiap tahunnya bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Hari ini, saya ditugaskan membawakan makalah yang berkaitan dengan tema “ Pluralisme dalam gerakan nasionalisme di Indonesia: Faktor Global dalam nasionalisme di Indonesia”. Sebuah tema yang sangat relevan untuk dibahas pada saat kita akan memperingati 100 tahun Indische partij dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional, setelah bangsa kita memasuki masa reformasi yang diikuti dengan berbagai tuntutan akan keterbukaan di hampir setiap aspek kehidupan masyarakat. Pengangkatan isu pluralism dan faktor global dalam gerakan nasionalisme di Indonesia pada saat sekarang ini menunjukkan, betapa pentingnya kita melihat perjalanan panjang dinamika masyarakat Indonesia sampai terbentuknya menjadi sebuah negara-bangsa ketika berhadapan dengan berbagai persoalan seperti masalah krisis ekonomi ketika berhadapan dengan pengaruh global, konflik yang sering terjadi dalam masyarakat baik yang bersifat horizontal, maupun yang vertikal.

Pertanyaan sekitar mengapa masyarakat yang dahulunya satu sama lain tidak berkaitan secara politik kenegaraan, yang memiliki latar belakang pluralis akhirnya mampu bersatu membentuk sebuah bangsa? Seberapa jauh relevannya mengkaji permasalahan pluralisme ini bila dilihat perannya yang begitu signifikan dalam gerakan nasionalisme di Indonesia ini apabila kita melihat bahwa nasionalisme Indonesia yang sudah memasuki usia itu tetap berkembang sesuai dengan berbagai tantangan arus globalisasi yang berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin mengglobal? Dampak perkembangan global terhadap dinamika masyarakat Indonesia yang dimaksud

adalah bagaimana kita sebagai bangsa tidak bisa terlepas dari berbagai pengaruh yang terjadi di dunia luar yang mana pengaruh itu ternyata berimplikasi terhadap tatanan nilai dan budaya masyarakat di seluruh kepulauan Nusantara. Misalnya saja sejak terjadinya perpecahan negara superpower Uni Sovyet, terintegrasinya Jerman yang setelah cukup lama terbagi akibat pengaruh internasional di kawasan itu, berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika politik di tingkat nasional dan lokal.

Di Indonesia, dimulai dengan berakhirnya Orde Baru dan diperkenalkannya Reformasi sejak tahun 1998 dicirikan dengan berakhirnya pemerintah yang autoritar dan sentralistik dan diperkenalkannya berbagai konsep perubahan seperti otonomi daerah, “putra daerah” yang disatu pihak menyebabkan kemajuan perkembangan di daerah-daerah, dipihak yang lain ternyata menimbulkan berbagai persoalan antara lain konflik etnis, konflik batas wilayah akibat pemekaran wilayah, yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, dapat menyebabkan masalah disintegrasi bangsa. Kalau sebagai sebuah konsep sosial budaya dalam arti penguatan-penguatan nilai budaya lokal seperti dalam penguatan ekonomi kreatif dalam konteks kesejahteraan masyarakat, “tentu baik dikembangkan. Ini dapat dilihat misalnya seperti konsep “Riau Raya”, “Ajeg Bali”, “Pan Dayak” dan yang lainnya sepanjang berkembang di sekitar persoalan penguatan nilai-nilai budaya lokal yang mempertebal nilai-nilai kearifan lokal, sehingga masyarakat lokal tersebut mampu bertahan terhadap berbagai pengaruh luar yang mengglobal. Namun sebagai kekuatan politik untuk kepentingan kelompok tertentu, tentu dapat mengganggu yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan juga berpengaruh pada proses demokrasi yang sedang berlangsung dengan baik itu.

Pengelolaan berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik masyarakat seperti ini harus dilakukan dengan baik, karena dengan adanya perkembangan seperti itu, ada kesan seolah-olah terbentuknya nasionalisme Indonesia masih mencari bentuknya ditengah-tengah berbagai persoalan kesukuan dengan payung “kearifan lokal” sedang berkembang dimasyarakat. Hal ini bisa terjadi, ketika masyarakat menganggap negara belum maksimal memainkan perannya dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat maka gejolak atau riak sosial politik sering muncul kepermukaan. Dengan demikian ada kesan bahwa seolah-olah makna nasionalisme Indonesia yang eksis sekarang ini tampaknya dipertanyakan, karena menguatnya etho-nasionalisme yang bersifat primordial di beberapa daerah dapat memperkuat asumsi-asumsi seperti itu. Tentu, dalam era reformasi yang ditandai dengan tuntutan transparansi dalam kehidupan yang demokratis tidak menginginkan adanya perkembangan neo-feodalisme yang dianggap mengganggu proses demokrasi yang telah berkembang baik selama ini, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara demokratis terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India.

Akan tetapi, bagaimana dinamika masyarakat bisa dikelola dengan baik karena dalam era globalisasi ini tampak semangat atau euphoria demokrasi berkembang dengan cepat, transparansi, dan pengelolaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik semakin dibutuhkan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan korupsi yang terjadi di beberapa daerah memerlukan penanganan secara baik dalam menuju kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Bertitik tolak dari pemikiran yang berkembang itu, tidaklah mengherankan apabila masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya untuk melawan berbagai musuh bersama itu dengan tetap menyatakan bahwa

nasionalisme Indonesia ini adalah harga mati yang didasari atas empat pilar penting yaitu tetap utuhnya Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

## **II. Pluralisme dan Faktor-faktor Global**

Pengertian masyarakat multibudaya dibentuk pertama kali di Kanada sebagai akibat terjadinya migrasi penduduk ke wilayah itu yang berlangsung semakin intens. Konsep multibudaya itu merujuk pada pengertian dimana telah berlangsung migrasi multi-etni dengan lingkup ruang yang besar. Dapat dikatakan bahwa pengertian masyarakat multibudaya itu muncul sejak tahun 1964 (barangkali yang pertama kali) oleh ahli sosiologi Kanada, Charles Hobart, ketika diselenggarakannya Konferensi Dewan Kanada tentang Kristen dan Yesus di Winnipeg-Manitoba, Kanada. Setahun kemudian pada tahun 1965, Senator Kanada dan Prof. Slawistik Paul Vuzyk menyelenggarakan konferensi tahunan “Asosiasi Kanada untuk masyarakat Slavist” yang membahas bagaimana terjadinya masyarakat multibudaya di sebuah wilayah di Kanada. Saat itu dibahas bagaimana tipe struktur masyarakat multibudaya dari suatu masyarakat migrasi multibudaya dunia. Tipe Struktur etnis budaya dari suatu masyarakat yang berasal dari Kanada, Australia, dan Inggris. Selanjutnya setelah Kanada, kemudian muncul Australia dimana paham multibudaya diangkat pada ruang politik yang resmi yaitu di Kanada pada tahun 1974, di Australia pada tahun 1977-1978.

Terbentuknya masyarakat pluralis atau multibudaya di Indonesia dapat dilihat dari aspek sejarah dan migrasi yang terjadi baik karena dinamika masyarakat Indonesia sendiri, maupun pengaruh global yang terjadi sejak abad ke-16 itu.

Bagaimana konsep masyarakat multibudaya yang terjadi itu dapat dilihat sebagaimana beberapa uraian berikut ini. Berdasarkan konsep yang ada terutama dari sudut pandang interkontinental dan global dapat dibedakan masyarakat multibudaya yang terbentuk secara heterogen menurut perkembangan sejarah dan titik pandang ruangan budaya masyarakat yaitu terdiri dari delapan (8) tipe utama daerah dunia (baca: Mintzel, 1997).<sup>2</sup> Model ini menjelaskan konsep kebudayaan umum, bagian dan pinggiran. Dalam model lingkaran yang ini, bahwa masyarakat umum dibagi melalui kebudayaan umum yang aman ciri-cirinya sebagian dari semua

---

<sup>2</sup>**Pertama**, daerah-daerah yang luas, bercirikan multietnik dan masyarakat imigrasi multibudaya dan multietnis di USA dan Kanada. **Kedua**, negeri Eropa Barat Daya dari barat yang telah mulai menerima karakter masyarakat multibudaya dengan multietnis sebagaimana kekuasaan kolonial sebelumnya melalui migrasi (kolonial dan Postkolonial). **Ketiga**, negeri-negeri Eropa daratan yang terjadi sebagai akibat gerakan perjalanan secara regional dan gabungan secara politik berhubungan sepanjang perjalanan waktu masa lalu dan kini pada masyarakat negara multibudaya dan multietnis. Untuk itu, termasuklah Eropa Barat sebagai contohnya: Belgia, Eropa Tenggara, bekas Yugoslavia/ Balkan dan Italia Utara. **Keempat**, melalui gerakan perjalanan yang secara aktual masyarakat multibudaya berdasarkan imigrasi, negeri-negeri Eropa yang berkembang secara maju sebagai contoh: Jerman, Australia, dan Swiss. **Kelima**, masyarakat negara dibentuk berdasarkan budaya Indian, Amerika Selatan, dan kebudayaan Ibero-Roma seperti Mexico, Peru, dan Equador. Di Amerika Selatan, misalnya mulai permulaan sejarah dan ruang Amerika Utara pada penduduk yang membuka arah baru, melainkan bertitik tolak pada conquistador yang tidak pindah rumah untuk tinggal di dunia yang baru. Mereka mengizinkan membawa barang rampasan dan kekayaan ke tempat asal selain itu sudah ada di Amerika Selatan dan Tengah, penduduk yang secara sejarah dengan kebudayaan yang tinggi. **Keenam**, masyarakat multibudaya dan multietnis di luar Eropa di Asia Tengah dan Asia Tenggara seperti India, Malaysia dan Indonesia. Di wilayah subkontinent India bertemu berbagai ras satu sama lain. India selalu melihat kemungkinan untuk menemukan sebuah modus kebudayaan bersama kehidupan suku yang berbeda. **Ketujuh**, tidak melupakan melalui masyarakat migrasi Inggris (Eropa) di benua Australia yang terbentuk secara khusus. **Kedelapan**, masyarakat multibudaya dan multietnis di benua Afrika seperti Republik Afrika Selatan dan masyarakat asli Afrika.

subbudaya adalah sama baik sebagai kebudayaan pinggiran maupun kebudayaan bagian. Ukuran dari semua subkultur bervariasi antara subkultur yang satu dengan yang lainnya.

Dengan melihat model lingkaran ini, dapat dipahami bagaimana masyarakat Indonesia berada dalam konteks masyarakat multibudaya, Kondisi terbentuknya Indonesia sebagai masyarakat multibudaya ini tidak dapat lepas dari kondisi geografis dan historis masyarakat Indonesia. Kebudayaan suku yang dianggap sebagai kebudayaan asli (indigenous) terdesak, akibat pengaruh dari masuknya migrasi penduduk baru pada abad-abad berikutnya yang turut mewarnai terbentuknya masyarakat Indonesia multibudaya. Inilah yang secara konseptual dapat menjelaskan terbentuknya masyarakat Indonesia sebagai sebuah masyarakat multibudaya.

Dilihat dari pemaparan itu menunjukkan bagaimana berbagai etnis, suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda terintegrasi menjadi sebuah bangsa sebagai akibat kesamaan nasib sepenanggungan sebagai bangsa yang pernah dijajah, dan oleh karena itu adanya keinginan kuat menjadi sebuah bangsa. Berbagai penelitian tentang sejarah kebangkitan nasionalisme Indonesia menunjukkan bahwa nasionalisme Belanda yang diterapkan di zaman kolonial itu dianggap tidak mampu membuat kehidupan masyarakat pribumi di tanah jajahannya lebih sejahtera. Ketidakmampuan ini disebabkan berbagai faktor seperti kepentingan pemerintah kolonial lebih ditekankan pada aspek ekonomi dan perdagangan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya bagi negeri induk.

Adapun alasan misalnya mengapa Belanda yang datang ke negeri jajahan pada abad ke-16 yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya akan kepentingan ekonomi daripada kepentingan politik semata. Ini dapat dilihat pada bagaimana produk lokal di Kepulauan Nusantara yang sangat dikenal dan dibutuhkan seperti rempah-rempah dijualbelikan secara intens pada abad itu. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, maka didirikanlah sebuah kongsi dagang Belanda

yang disebut VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) pada awal abad ke-17 tahun 1602.

Meskipun seiring dengan kepentingan itu, aspek-aspek untuk penyebaran agama juga terjadi di Kepulauan Nusantara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, dan tradisi budaya. Kehidupan masyarakat pada saat itu sangat dinamis dibuktikan dengan adanya proses migrasi yang berkaitan pula dengan aspek perdagangan lokal dan regional di kawasan Nusantara yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Bagi wilayah-wilayah dimana penyebaran Islam mendominasi seperti di kawasan Indonesia Barat seperti Jawa dan Madura kecuali pada wilayah yang sedikit tersentuh pengaruh Islam seperti di pedalaman dan pulau kecil-kecilnya pada umumnya--, maka pengaruh agama yang disebarkan oleh Belanda dalam hal ini baik *missie* maupun *zending* tidak banyak terjadi. Namun, ini tidaklah berarti bahwa tidak ada agama atau kepercayaan lokal yang berkembang seperti dapat dilihat pada kebudayaan Nias di kepulauan Mentawai, Hegemoni Hindu di Bali dan daerah lainnya untuk menyebutkan beberapa contoh. Dengan kata lain, di luar wilayah-wilayah tersebutlah agama yang disebarkan oleh *missie* dan *zending* banyak berlangsung sebagaimana yang terjadi di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua (cf. Ardhana,2000).

Dalam kondisi masyarakat yang plural inilah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Keberagaman ini tentu menyebabkan Belanda cukup berhati-hati dalam menangani setiap persoalan di tingkat lokal. Terlebih-lebih kedatangan mereka ini sebenarnya banyak dilatarbelakangi dengan perkembangan yang terjadi tanah negeri induk sendiri di Belanda pada khususnya dan di Eropa pada umumnya. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh global berlangsung dengan berbagai tuntutan terhadap daerah-daerah yang sudah dikunjungi sejak abad ke-16 hingga abad ke-17. Perebutan terhadap Malaka pada tahun 1511 membuktikan bagaimana faktor politik, ekonomi, agama menjadi penyebab perebutan wilayah itu. Adanya makna yang

penting tentang Malaka yaitu siapa yang menguasai Selat Malaka, akan menguasai Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya yang pelayaran-pelayaran dari berbagai etnis Melayu, Jawa, Bugis dan sebagainya berlayar dan berdagang di kawasan ini (Corteseo, 1944).

Memang sejak sebelum abad ke-20, Belanda melancarkan sejumlah serangan terhadap Makasar tahun 1667 hingga 1669. Akan tetapi, dalam kasus ini pun tampak terlihat adanya tujuannya ekonomi, dimana serangan terhadap Makasar lebih banyak dimaksudkan untuk menjamin monopoli perdagangan rempah-rempah yang mendapat penentangan dari Kerajaan Sulawesi Selatan tersebut. Pihak Belanda sendiri tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut haknya terhadap sebagian besar wilayah kepulauan luar. Penguasa wilayah ini memang telah terikat serangkaian perjanjian-perjanjian itu tidak ditindaklanjuti (Ardhana, 2005)

Sementara itu, perkembangan global lainnya seperti yang terjadi di Afrika, dimana tampak bahwa benua Afrika sudah dibagi-bagi oleh kepentingan bangsa Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis yang dimulai abad ke-18 hingga memasuki abad ke-19 yang dianggap sebagai mulainya pelaksanaan imperialisme modern (1870-1894). Pada saat dunia dibagi-bagi dalam kekuasaan kolonial Eropa (termasuk Amerika) supremasi Eropa atas seluruh dunia didasarkan pada penggolongan daerah kolonial di luar Eropa atau lebih tepat lagi secara imperial (Locher Scholten, 1994:99). Pembagian wilayah di antara penguasa-penguasa kolonial itu memberikan dampak ekonomi, politik, sosial budaya pada kebijakan pemerintah kolonial Belanda di masyarakat jajahan saat itu. Pada masa perkembangan imperialisme modern inilah semakin meluasnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah jajahannya.

Seperti sudah diketahui setelah Hindia Belanda dikembalikan secara resmi oleh Inggris pada tanggal 13 Agustus 1814, pihak Belanda bermaksud menanggulangi masalah konstitusional di

Hindia Belanda, termasuk di “kepulauan luar”. Sejak saat itu, mereka berusaha menegakkan kekuasaan mereka di seluruh wilayah kepulauan yang dalam dua abad terakhir telah terbentuk kerajaan-kerajaan pribumi yang otonom. Pada tahun 1900 pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk mengkonsentrasikan seluruh kekuasaannya dari Batavia. Locher Scholten (1994) menjelaskan bahwa pemerintah kolonial di bawah bimbingan Snouk Hurgronje berusaha melakukannya secara damai dan baru setelah upaya ini tidak berhasil, dipertimbangkanlah untuk melakukan aksi militer. Pada tahun 1894, Johannes Benedictus van Heutsz, yang berpengalaman dalam masalah administrasi dan strategi perang, diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Karena kemampuannya dalam memperkuat otoritas penguasa, maka pengikutnya menyebutnya dengan julukan sebagai “pasifikator” (De Graaf, 1949: 454-455, Furnivall, 1939: 237). Tugas utamanya adalah untuk memaksakan kehendak Belanda, dalam hal ini aneksasi militer. Tujuan ekspedisi militer yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda itu bukanlah didasarkan pada motif-motif ekonomi dan perdagangan. Hanya beberapa kasus dimana motif ekonomi menyebabkan dilakukannya aksi kenegaraan Belanda (Locher-Scholten, 1994: III).

Ekspedisi militer Belanda dilakukan ke Aceh kemudian ke wilayah-wilayah lainnya di Nusantara. Di Nusa Tenggara misalnya, pada awalnya mereka menyelidiki kekayaan alam yang ada di Kepulauan Nusantara seperti yang dilakukan di Nusa Tenggara. Akan tetapi, ketika penyelidikan tidak menghasilkan apa-apa mereka memutuskan untuk meneguhkan dan mengkonsolidasikan kedaulatan kolonial Belanda di tanah jajahan pada tahun 1907. Oleh karena itu, Locher-Scholten (1894: 87 dan Wesseling, 1988: 66) dapat mencocokkannya dengan teori imperialisme yang berorientasi pinggiran dengan menyatakan bahwa imperialisme Belanda bukan merupakan “aksi” melainkan “reaksi”. Dalam bagan yang dibahas oleh Gallagher dan Robinson, perluasan “secara informal jika memungkinkan, aneksasi formal diperlukan” (Gallagher dan Robinson, 1979: 185). Pada saat itu,

hubungan ketergantungan Hindia Belanda terhadap kekuasaan kolonial dilegitimasi dan dilegalisir. Namun, secara bersamaan juga dapat terbentuknya wilayah Indonesia secara territorial (Wesseling, 1988: 62-63). Hingga abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakannya ini dalam daerah kekuasaannya di Asia tenggara (Dahm, 1974: 87).

### III. **Indische Party: Kebijakan Kolonial Belanda dan Ke Arah Terbentuknya Negara-Bangsa**

Adanya persaingan-persaingan yang semakin meningkat di negeri jajahan menyebabkan Belanda mulai memikirkan akan pentingnya menarik perhatian penduduk pribumi, bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda berbeda dengan pemerintahan kolonial bangsa-bangsa Eropa lainnya. Di antara adalah yang cukup penting untuk disebutkan dengan memberikan perhatian di bidang pendidikan. Maksudnya adalah untuk memenuhi tuntutan akan perlunya tenaga pribumi yang lebih terdidik dalam kerangka birokrasi kolonial Belanda. Walaupun diketahui bahwa pemerintahan kolonial Belanda hanya memberikan pendidikan yang cukup terbatas bagi masyarakat pribumi, akan tetapi paling tidak telah dapat memberikan dampak perkembangan pemikiran di kalangan penduduk pribumi akibat didirikannya sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Kebijakan untuk memberikan pendidikan ini dimungkinkan, karena Belanda hanya menginginkan Indonesia dalam kerangka kepentingan negara kolonial, "Pax Neerlandica". Itulah sebabnya kemudian diintroduksikannya politik etis (*Ethische Politiek*) oleh Ratu Wilhelmina di Belanda pada tahun 1901 yang diharapkan mampu mengisi kekurangan itu dan menunjukkan kepada dunia luar, bahwa sifat penjajahan yang diterapkan di tanah jajahan adalah tidak sama dengan penjajah-penjajah Barat lainnya seperti Inggris, Perancis di kawasan Asia Tenggara.

Hadirnya kekuasaan kolonial Belanda dalam bentuk berhasilnya menyatukan wilayah-wilayah dalam satu kesatuan administratif, nampak memberi peluang bagi berkembangannya semangat keindonesiaan. Ini bisa dimengerti karena meskipun para elit pribumi diberikan pendidikan secara terbatas pada kepentingan merekrut mereka untuk menempati posisi sebagai penguasa lokal yang tidak langsung bagi kepentingan kolonial, namun mereka pun sebenarnya tidak merasa puas atas kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, namun mereka pun sebenarnya tidak merasa puas atas kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di tanah jajahan. Mereka pun menyadari akan keterbatasan-keterbatasan yang diberikan pemerintah kolonial, sehingga berbagai upaya dilakukan sebagaimana dapat dilihat dengan terbentuknya organisasi sosial keagamaan pada taraf awalnya, dan kemudian diikuti dengan dibentuknya organisasi yang sifatnya politik. Perubahan politik yang lama kelamaan sifatnya radikal ini mempengaruhi peta politik di Indonesia.

Memang sebelum awal abad ke-20 memang terdapat gerakan anti kolonial yang sifatnya masih tradisional. Pemimpin gerakan bersama dengan penduduk memberikan reaksi terhadap kebijakan kolonial ini terbatas hanya pada gerakan yang sifatnya tidak permanen, dalam arti apabila pemimpin gerakan tiada, maka gerakan selanjutnya menjadi lenyap. Ini ditunjukkan oleh adanya gerakan-gerakan yang sifatnya sosial keagamaan seperti gerakan menentang pajak, gerakan Ratu Adil dan sebagainya yang mewarnai sifat gerakan masyarakat pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Gerakan yang dipimpin oleh elit penguasa tradisional seperti raja, sultan dan elit agama seperti kyai, haji dan sebagainya yang melandasi sifat gerakan pada nilai-nilai keagamaan memang belum menunjukkan hasil yang maksimal, karena belum terintegrasinya nilai-nilai nasionalisme, meskipun sifat gerakan itu memberikan kontribusi yang signifikan terutama setelah semakin berkembangnya ide-ide kebangsaan itu. Perkembangan di tingkat lokal masih dicirikan ikatan-ikatan yang sifatnya primordial. Komunitas penduduk diikat berdasarkan ikatan-ikatan etnis dan keagamaan,

sehingga apabila mengadakan perlawanan tampaknya tidak efisien dalam menghadapi kekuasaan pemerintah kolonial. Demikianlah pada masa sebelum memasuki awal abad ke-20 masih terbentuk adanya masyarakat Parahiyangan, masyarakat Pasuruan, masyarakat Tuban di Jawa, masyarakat Bandung, masyarakat Klungkung di Bali dan sebagainya yang diikat berdasarkan ikatan sejarah masa kerajaan yang di daerah masing-masing. Hampir tidak ada pengikat yang kuat yang dapat mengintegrasikan mereka menjadi satu kesatuan dalam artian politik kenegaraan sebagaimana kemudian terbentuk menjadi sebuah negara di era berikutnya.

#### **IV. Indische Party: Lokalitas, Nasionalisme dan Globalisasi**

Tekanan politik yang dilakukan penguasa kolonial terhadap penduduk pribumi berdampak luas terutama dalam kaitannya dengan kemunculan organisasi modern yang menggantikan organisasi yang bersifat tradisional. Kondisi masyarakat yang tertekan ini akhirnya mengarah suatu di mana di tanah jajahan diperlukan adanya sebuah perkumpulan yang memiliki ciri modern yang diharapkan dapat mengikat berbagai pemikiran tentang kebangsaan dari berbagai suku yang ada dengan latar belakang tradisi, bahasa, budaya yang berbeda yang kemudian berkembang ke dalam sebuah organisasi pertama yang sifatnya modern di tanah jajahan seperti Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh pelajar-pelajar dari “Sekolah Dokter Jawa” atau “Sekolah Dokter pribumi”, STOVIA (School tot Opleiding voor Inlandshe Artsen) di Weltevreden pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka berasal dari berbagai daerah di koloni Belanda itu dan dari berbagai kelas sosial yang sangat merasakan adanya derita pahitnya kebijakan diskriminasi Belanda saat itu. Sebagai mahasiswa misalnya mereka tidak diizinkan memakai pakaian Eropa, bahkan ketika mereka mendapatkan diploma dokter, tembok rasialisme menghambat mobilitas sosial mereka (Gunawan Muhammad, 2012).

Pembentukannya Budi Utomo ini dilakukan oleh Wahidin Soediro Husodo seorang “Dokter Hindia” dan sejak itu dianggap sebagai era dimulainya gerakan kemerdekaan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa yang menggerakkan aksinya dengan mengedepankan tema-tema sosial. Ini bisa dimngerti, karena dengan tema sosial akan memungkinkan menghindari kecurigaan dari penguasa kolonial, bila dibandingkan dengan mengumandangkan tema-tema politik. Setelah munculnya kelompok Tjipto Mangunkusumo dan yang lainnya, kelompok Jawa mendominasi gerakan ini dan mereka terutama bergerak dalam lapangan kebudayaan Jawa.

Dapat dilihat bagaimana elit masyarakat pribumi melawan kebijakan kolonial Belanda, yang akhirnya memunculkan pergerakan nasional Indonesia itu. Selanjutnya Sarekat dagang islam dibentuk oleh seorang saudagar batik yang bernama Haji Samanhudi pada bulan januari tahun 1911. Pada mulanya perkumpulan ini hanyalah persatuan dagang lokal untuk melindungi kepentingan mereka dari pedagang Cina. Gerakan sarekat Dagang Islam ini melandasi gerakannya pada gerakan pembaharuan islam pada abad ke-19 sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun kesepakatan yang dicapai saat itu adalah “solidritas melalui agama” dimana melalui gerakan Islam ini diharapkan munculnya perlawanan terhadap kekuasaan penjajahan. Tahun 1912 Organisasi Sarekat islam diumumkan, dimana islam menjadi simbol persatuan rakyat saat itu. Raden Oemar Said Tjokroaminoto yang berasal dari kalangan priyayi, berpendidikan OSVIA, menjadi pemimpin organisasi ini dan ia dipandang sebagai pemimpin sebagai seorang ratu Adil sebagaimana terjadi dalam pergerakan-pergerakan melawan penjajahan di era-era sebelumnya. Tidak hanya ide tentang agama Islam atau ekonomi yang menginspirasi islam dalam aktivitas mereka. Perlawanan terhadap aktivitas penyebaran agama Kristen menjadi titik temu dari gerakan mereka itu. Karena memiliki pengikut yang besar, Sarekat Islam akhirnya dipandang sebagai gerakan yang antikolonial pertama di Indonesia. Ketika Sarekat Islam di Jawa mempunyai beberapa arti bagi gerakan mereka, akhirnya

cabang-cabangnya juga dikembangkan hingga ke kepulauan lainnya. (Cf. Ardhana, 1985).

Pada tahun 1912, Kyai Achmad Dahlan yang bersimpati terhadap pembaharuan Mesir, Mochammad Abduh mendirikan Muhammadiyah. Gerakan segera menyebar menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang dikenal menjauhkan diri dari semua hasutan politik. Muhammadiyah mengutamakan kemajuan studi pengajaran Islam dengan cara modern, seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan serta pendirian sekolah dan rumah sakit. Mereka mencoba melengkapi pendidikan Belanda dengan gagasan pembaharuan dari ide dari Mesir. Kemudian sebagai reaksi dari gerakan gerakan Muhammadiyah, kemudian didirikan organisasi Islam konservatif yang bernama Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tahun 1926 (Blumberger, 1934: 17, Dham, 1971: 75).

Dorongan awal seperti yang terjadi pada Budi Utomo mengalami transformasi secara bertahap dari kelompok semi radikal, menghasilkan dua anggota dari cendekiawan pribumi yang menciptakan partai politik pertama tahun 1912, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryadiningrat. Bersama-sama dengan seorang aktifitas politik Eurasia-Belanda, E.F.E Douwes Dekker yang lahir di Pasuruan, mereka mendirikan Indische Partij di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Douwes Dekker yang kemudian lebih dikenal sebagai Danudirja Setiabudi muncul sebagai pemimpin yang memiliki campuran keturunan Belanda, Perancis, Jerman dan Jawa. Selama ini memang buku yang ditulis oleh Robert van Niel yang berjudul tentang the Emergence of the Modern Indonesia Elite sebagai sebuah buku ilmiah yang cukup mendetail menjelaskan tentang Indische Partij (Niel, 1979). Akan tetapi dengan hadirnya terbitan edisi khusus Majalah Tempo kita dapat memahami secara lebih jelas dan lengkap tentang peran Douwes Dekker dan Indische Partij (Tempo, 2012). Indische Partij adalah sebuah organisasi militan dengan bercirikan multirasial. Douwes dekker dianggap sebagai orang

pertama yang mendirikan partai politik di Indonesia yang berusaha untuk memperkuat perasaan cinta terhadap tanah air (Lihat: “Sang Inspirator Revolusi”, dalam tempo, 2012: 31).<sup>3</sup> Pemimpin organisasi ini adalah Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Mereka menggunakan ketidakpuasan orang Indo-Eropa terhadap pemerintah kolonial Belanda untuk bersama-sama dengan orang Indonesia lainnya menentang Belanda. Douwes dekker misalnya meskipun ia bukan penduduk Indonesia “tulen” ia mengaku sebagai orang Jawa dan dianggap telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan indonesia (Tempo, 2012: 34). Untuk itu tujuan ia mendirikan organisasi ini adalah kemerdekaan dengan semboyannya adalah “Hindia untuk Orang Hindia”. Melihat tujuannya ini tampak bahwa posisi penduduk pribumi lebih rendah dari penguasa kolonial. Ini terlihat dari apa yang disuarakan dalam jurnal yang berusia cukup singkat de Express (Niel, 1979: 64). Sutherland (1979: 61) menyebutkan bahwa pada tahun 1912 E.F.E. Douwes Dekker menolak hirarki yang sifatnya rasial dalam kaitannya dengan pendirian Indische partij yang mengedepankan slogannya “the Indies for the Indies born for men of any race who regarded the archipelago”. Disebutkan pula bahwa Indische partij mampu menarik ribuan anggota termasuk sejumlah pegawai-pegawai priyayi. Bahkan Ingleson (1983: 5) menyebutkan bahwa organisasi ini menekankan pentingnya arti kesatuan nasional.

Indische partij bermaksud membangkitkan patriotisme semua rakyat pribumi (Pluvier, 1953:21). Pemerintah kolonial Belanda menganggap oganisasi pribumi ini sangat berbahaya dan karenanya melarang organisasi ini pada bulan Agustus 1913. Douwes Dekker dibuang ke Kupang-Timor, Tjipto Mangunkusumo ke Banda, dan

---

<sup>3</sup>Cokroaminoto misalnya mendapat inspirasi dari Douwes Dekker mengenai cara menghimpun massa berkaitan dengan konsep nasionalisme. Douwes Dekker juga dianggap mempunyai andil besar ketika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indoneia. Akan tetapi ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Douwes dekker berada dalam masa pembuangannya. Baca: “sang Inspirator Revolusi”, dalam Tempo, 2012

Suwardi Soerjaningrat ke Bangka. Atas permintaan mereka sendiri, atas izin Idenburg ketiganya diperbolehkan melakukan perjalanan ke Belanda (Pringgodigdo, 1949: 11, tempo, 2012: 45).<sup>4</sup> Di Belanda inilah mereka mulai mengenal ide-ide nasionalisme Eropa yang paling tidak berpengaruh terhadap ciri pergerakan merek di masa selanjutnya. Hal ini terlihat dari peran Suwardi yang semakin meningkat tatkala ia berhasil mendiseminasikan dasar-dasar pendirian partainya selama pembuangannya di negeri Belanda. Setelah pembuangannya ke Belanda, maka cabang partai ini dipindah ke Semarang dan melanjutkan perjuangannya di bawah Insulinde. Di bawah kekuasaan Gubernur jenderal Belanda, Van Limburg Stirum, mereka akhirnya diizinkan kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1918, yang kemudian muncul kesempatan bagi Dr. Tjipto Mangunkusumo sebagai anggota parlemen, Volksraad yang pertama. Dengan kembalinya Douwes Dekker, gerakan kemerdekaan menjamin Tjipto sebagai anggota Volksraad dan di bawah pengaruhnya Insulinde mulai mendapat angin segar dalam gerakannya. Itulah sebabnya aktifitas di tingkat lokal lebih berkembang dan anggota partai mulai semakin menyalahkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Robert van Niel menyebutkan bahwa konsep nasionalis yang kaku yang berbeda dari kelompok sosialis revolusioner yang tidak hanya anti-kapitalis dan mempertimbangkan masalah sosial ekonomi menurut mereka bisa diraih setelah tercapainya kemerdekaan nasional. Selanjutnya dipersiapkan untuk melakukan taktik paham Komunisme ingin diterapkan dimana Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo memiliki kesempatan yang baik untuk belajar dari kontak-kontak mereka terhadap sahabat mereka di Belanda.

Robert van Niel (1979: 160) yang membahas secara mendetail tentang Indische Partij ini mencatat bahwa Douwes Dekker berharap menemukan peluang untuk menggerakkan taktik pergerakannya

---

<sup>4</sup>Pada tahun 1914-1915, Douwes Dekker tercatat sebagai salah seorang mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Ilmu Negara di Universitas Zurich. Di Eropa, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran marxistis. Lihat: "Mengejar Gelar di Jantung Eropa", Tempo, 2012: 78

dalam kaitannya dengan konsep nasionalismenya dalam Sarekat Islam. Namun, ia menghadapi berbagai konflik dengan konsep revolusioner yang kuat dari pemimpin Sarekat Islam sayap kiri yang mencari dukungan dari kelompok proletariat kota yang mana Douwes Dekker secara bijak memahami akan kesulitan dalam memenuhi target gerakan pada kondisi saat itu. Selain itu, disebutkan bahwa ia menghadapi pertikaian dengan kelompok Muslim lainnya berkaitan dengan gerakan Insulinde itu. Bahkan Insulinde dinyatakan memainkan peran ketika terjadi gangguan-gangguan politik ketika terjadinya peristiwa Toli-Toli dan Gerakan Garut. Banyak terjadi gerakan saat itu sebagaimana disebutkan oleh Robert van Niel seperti yang terjadi di Tjileungsi, Tangerang, Tjipari dan Teluk Putjung. Ini diikuti dengan terjadinya gerakan gangguan di Surabaya yang akhirnya menyebabkan dibuangnya tokoh Komunis Belanda, Brandsteder, dan kejadian lainnya yang dikaitkan dengan peran yang dimainkan oleh pimpinan punck Insulinde seperti Gerakan Solo yang terjadi pada tahun 1919. Dapat dikatakan bahwa sementara Douwes Dekker berusaha memenangkan perannya di Sarekat Islam, maka Tjipto tampak dikaitkan dengan berbagai aktifitas yang menimbulkan gerakan perlawanan di Solo. Pada saat itu, cabang Insulinde di tingkat lokal dipimpin oleh Miss Vogel, tetapi kenyataannya di kuasai oleh Haji Misbach yang berupaya memadukan akibat kontroversi yang terjadi antara konflik yang terjadi, maka akhirnya Insulinde dirubah menjadi National Indische Partij yang didirikan di Bandung. Tidak lama berselang setelah kegagalan National Indische Partij, maka menghasilkan pemisahan antara kelompok nasionalis revolusioner. Douwes Dekker dan Suwardi berada di satu pihak dan Tjipto melanjutkan pergerakan menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda.

Robert van Niel (1979: 163) menambahkan bahwa Douwes Dekker menarik diri dari panggung politik aktif, akan tetapi perannya sangat diperhitungkan berkaitan dengan tujuan puncaknya yaitu Indonesia yang merdeka. Sebagaimana ditulis oleh Tempo (2012, 77) yang mengutip pendapat sejarawan Akira Nagazumi bahwa kehadiran

pendiri Indische Partij mampu mengubah suasana Indische Vereniging yang ada pada waktu itu dengan mendorong mahasiswa saat itu menerbitkan Jurnal Hindia tahun 1916. Disebutkan pada serie kedua penerbitannya adanya subjudul “Organ (media) dari Ikatan Pelajar-pelajar Indonesia”. Ditambahkan bahwa ikatan pelajar itu merangkul lebih dari sepuluh organisasi termasuk Indische Vereeniging. Ditegaskan bahwa itulah pertama kalinya mereka menggunakan istilah “Indonesia”. Pada tahun 1922, ikatan pelajar itu terpecah yaitu Indische Vereeniging yang berubah menjadi Indonesische Vereeniging mengganti jurnal itu menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925 ketika Inonesische Vereeniging dipimpin oleh Soekiman Wirjosandjojo namanya diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ide tentang Indonesia mengambil bentuknya pada tahun 1925. Tempo (2012, 77) menyebutkan bahwa pada tahun itu juga mereka menyatakan manifesto politik “Indonesia merdeka, sekarang juga”. Dikatakan pula antara lain bahwa hanya ada satu Indonesia yang bersatu dan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan antar-kelompok yang dapat mematahkan kekuatan penjajahan. Disebutkan bahwa tujuan bersama adalah “kemerdekaan Indonesia yang menuntut terwujudnya suatu aksi massa nasionalis yang sadar dan berdiri di atas kekuatan sendiri”. Ini kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda yang sangat terkenal pada tahun 1928, dimana sekelompok pemuda dari berbagai latar belakang menyatakan komitmen mereka untuk mendukung Indonesia sebagai satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa. Ini kemudian secara kuat melekat pada Undang-Undang Dasar 1945, ketika Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara yang merdeka oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikianlah dapat dilihat bagaimana peran Douwes Dekker dapat memberikan sumbangan ke arah terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang akhirnya berhasil meraih kemerdekaannya.

Sejak proklamasi itu, Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang tercipta dari perjalanan dinamika sejarah bangsa di kepulauan Nusantara telah memasuki masa yang cukup panjang apabila dilihat

dari peringatan satu abad Indische Partij itu. Sejarah mencatat bahwa terwujudnya konsep negara-bangsa itu telah memerlukan perjuangan yang panjang pula yang tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga pemikiran dari anak bangsa. Nilai-nilai atau paham multirasialisme atau lebih tepat dikatakan sebagai konsep multikulturalisme itu sangatlah sesuai dikumandangkan di negeri yang berbhineka ini. Terlebih-lebih di era globalisasi ini, bagaimana berbagai pengaruh dari luar berdampak terhadap perkembangan di masyarakat. Tambahan pula, negara yang sudah terbentuk sejak tahun 1945 itu diharapkan terus dapat melindungi masyarakat yang terdiri berbagai etnis, agama, bahasa dan kepercayaan itu.

Memang di masa lalu ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan authoritarian dan sentralistis di bawah Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan yang kurang memperhatikan bagaimana keberagaman itu mestinya dipertahankan. Sebaliknya justru terjadi sentralisasi dan penyeragaman di samping pula terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional daripada memberikan ruang gerak yang cukup terhadap persoalan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam beberapa hal menjurus ke arah semakin kuatnya peran negara, munculnya nasionalisme yang berlebihan, sehingga memunculkan persoalan-persoalan seperti masalah diintegrasikannya Timor Timur (Timor Leste) ke wilayah Indonesia yang mendapat protes dunia internasional. Tentu, nasionalisme Indonesia yang ingin dikembangkan tidaklah nasionalisme yang menjadi ancaman bagi negara lain, dibutuhkan nasionalisme yang menjamin kehidupan masyarakat dapat hidup secara damai dengan masyarakat di negara-negara tetangga. Hal ini penting dipahami, karena secara etnisitas penduduk di negeri tetangga itu memiliki etnisitas dan tradisi budaya yang hampir sama dengan penduduk Indonesia sendiri.

Kesalahan yang terjadi di masa Orde Baru menjadi pelajaran yang berharga bangsa-bangsa dan negara Indonesia. Karena kondisi yang pernah terjadi itu banyak dikritik dunia internasional, karena

tidak memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kondisi yang berlangsung lebih dari 32 tahun tampaknya mengkebiri perasaan warga bangsa dimana kebijakan bersifat sentralistis dan menterpinggirkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan, sehingga wilayah-wilayah di kawasan perbatasan dan di pulau-pulau kecil lainnya kurang diperhatikan sehingga disebut wilayah termiskin, terbelakang dan terlupakan. Kondisi seperti ini tentu mendapat peluang bagi negara-negara lain akibat pengaruh global untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kurang diperhatikan itu. Maka pecahlah sengketa perbatasan dengan negeri tetangga seperti masalah perbatasan antar Indonesia dan Malaysia.

Kondisi ini tampaknya mengalami perubahan secara meningkat dan signifikan terutama sejak berakhirnya masa Orde baru tahun 1998 dan mulailah era yang disebut Reformasi. Sebuah era yang penuh dengan keterbukaan, transparansi, demokrasi dan dibukanya sekat-sekat yang tertutup rapat sehingga warga masyarakat dapat menghirup udara kebebasan. Ini tentu disatu pihak membawa perubahan yang cukup berarti dalam upaya memberikan keleluasaan masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya terutama dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Di pihak lain, apabila kewenangan dan kebebasan yang dibuka ini tidak disikapi dengan baik, maka menimbulkan persoalan-persoalan baru sehingga dianggap bangsa kita terjerumus ke arah kebebasan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Diantaranya terjadinya konflik dimana-mana, krisis ekonomi yang sifatnya multidimensi. Konflik Sambas, konflik Poso dan konflik yang pecah di wilayah lainnya yang kadang-kadang sarat dengan isu SARA merupakan contoh bagaimana persoalan muncul ketika kebebasan dan euphoria demokrasi dibuka. Dalam kaitannya dengan masalah otonomi daerah bahkan hanya calon yang merupakan putra daerah yang diberikan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kota atau pilkada-pilkada yang dilakukan.

Tambahan pula dengan diintroduksikannya konsep otonomi daerah sejak tahun 2001 yang apabila tidak disikapi dengan baik juga menimbulkan konflik-konflik di masyarakat seperti konflik perbatasan akibat pemekaran-pemekaran wilayah. Hal ini apabila dibiarkan berkembang dan tumbuh subur, maka akan terus menyimpang dari makna otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Alasannya adalah semakin berkembangnya sifat-sifat primodialisme di daerah-daerah (neo-feodalisme) dan tampak semakin meningkatnya konflik-konflik di daerah terutama dalam kaitannya dengan pengembangan daerah dimana muncul konflik antara masyarakat, investor dan pemerintah daerah. Ini terjadi karena bagaimana masyarakat terkadang terkesan belum siap dengan apa yang sedang berlangsung dalam dunia yang mengglobal (cf. Ardhana, 2011, Ardhana 2007: 51-65).

Apa yang sudah diperjuangkan dan diraih oleh Indische Partij seratus tahun yang lalu tampaknya perlu kita renungkan kembali. Betapa nilai perjuangan yang dilakukan itu dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara yang panjang itu sangat mahal harganya dalam konteks terwujudnya Indonesia merdeka. Kemerdekaan memang sudah diraih oleh bangsa dan negara ini, namun tetap diperlukan perjuangan melawan berbagai tantangan baik dalam negeri sendiri yang sifatnya primordial maupun tantangan dalam dunia global yang menyebabkan ketergantungan. Apabila perjuangan tidak terus dilakukan, maka kitapun kembali terjajah oleh bangsa kita sendiri atau imperialisme asing atau imperialisme global yang menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan dan tersisih dari arena persaingan dunia global.

Hanya dengan tetap mengumandangkan nilai-nilai perjuangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu pejuang bangsa dan negara ini, maka bangsa Indonesia akan mampu bersaing di tingkat regional dan internasional dalam upaya mencapai taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

## Daftar Pusaka

Ardana, I Ketut. 1985. "Perkembangan Muhammadiyah di Bali Tahun 1934-1968". Skripsi Sl. Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada

Ardhana, I Ketut. 2000. *Nusa Tenggara nach Einrichtung der Kolonialherrschaft*. Passau: Lehrstuhl für Sudostasienkunde Universitas Passau dan Richard Rothe.

Ardhana, I Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara pada Masa Kolonial 1915-1950*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ardhana, I Ketut. 2008. "The Question of Nationalism and Local Identity: Decentralization in Bali", dalam *Questions of Nationalism and Cultural Identities in the Present Day Asia*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences in cooperation with the Japan Foundation.

Ardhana, I Ketut. Oktober 2011. "Globalisme dan Multi-versalime: Beberapa Catatan tentang Dinamika Sosial di Bali", dalam *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol.01, Nomor, 02.

Ardhana, I Ketut (et al).2012. *Masyarakat Multikultural Bali: Tinjauan Sejarah, Migrasi dan Integrasi*. Denpasar: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan penerbit Larasan.

Blumberger, J. Th.1934. *Politieke Partijen in Stroomingen in Nederlandsche- Indie*. Leidsche Uitgeverijmaatschappij.

Corteseo, Amanda 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East: from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515 and the Book of Francisco Rodrigues: Rutter of A Voyage in the Red Sea, Nautical Rules, Almanak and Maps, written and draw in the East Before 1515*, I. Nendeln: Liechtenstein Kraus Reprint Limited.

Dahm, Bernhard. 1971. History of Indonesia in the Twentieth Century. London: Pall Mall Press.

Dahm, Bernhard. 1974. Emantipationvrsuche von Kolonialer Herrschaft in Sudostasien. Die Philippinen und Indonesien: Ein Vergleich. Wiesbaden: Otto Harrasowitz.

Elson, R.E. 2008. The Idea of Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press

Furnivall, J.S. 1939. Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge University Press.

Gallagher, John dan Ronald Robinson. 1979. "Der Imperialismus des Freihandels", dalam Hans Ulrich Wehler. Imperialismus. Dusseldorf : Athenaum Verlag GmbH.

Graaf, H.J. 1949. Geschiedenis van Indonesia. S-Gravenhage. Bandung, N.V. Uitgeverij, W. Van Hoeve.

Ingleson, John. 1983. Jalan Ke pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia: Tahun 1927-1934. Jakarta: LP3ES.

Locher-Scholten, Elsbeth. 1994. Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat. Leiden: KITLV Uitgevery.

Mintzel, Alf. 1997. Multikulturelle Gesellschaften in Europa und Nord Amerika: Konzepte, Streitfragen, Analysen, Befunde. Passau: wissenschaftsverlag Rothe

Muhammad, Gunawan. 18 Juli 2012. " A Speech for the Conference on 'Bali and Global Asia,' Makalah dipresentasikan pada Internasional Conference,'Bali in Global asia: Modernization and Heritage Formation", Denpasar: Georg August Universitat, IIAS and KITLV.

Niel, Robert van 1979. The Emergence of the Indonesian Elite. The Hague: W. Van Hoeve Publishers Ltd.

Pluvier, Jan. 1953. *Overzicht van de Ontwikkeling Beweging in Indonesia*. Bandung; s'- Gravenhage.

Pringodigdo, A.K. 1949. *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*. Djakarta: PT Dian Rakyat.

Sutherland, Heather, 1979. *The Making of a Bureaucratic Elite: the Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapore: Heinemann Educational Books Asia (Ltd).

Tempo (Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, 20-26 Agustus 2012: Ernest Douwes Dekker: *Inspirasi bagi Revolusi Indonesia*. Jakarta.

# RELEVANSI KESADARAN BERBANGSA DAN KESADARAN BERBUDAYA BANGSA<sup>1</sup>

Nunus Supardi<sup>2</sup>

## I. Pendahuluan

Membangun kesepakatan (*consesnsus*) menjadi satu ikatan (*commitment*), satu bangsa yang terdiri atas hampir 500 suku bangsa yang beraneka ragam budaya, bukanlah hal yang gampang. Upaya yang dirintis sejak 1908 dengan berdirinya (Boedi Oetomo) hasilnya baru tampak 20 tahun kemudian dengan di ikrarkan (Sumpah Pemuda, 1928), dan tujuh belas tahun kemudian baru mendapatkan pengakuan pada saat kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka secara *de facto dan de jure* bangsa dan negara Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa lain di planet ini. Bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia, lahir pula kebudayaan bangsa Indonesia.

Pergolakan bersenjata untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah di berbagai tempat belum membuahkan hasil. Di samping rakyat menjadi korban meninggal, hidup semakin sengsara, kekuatan menjadi semakin melemah. Sebaliknya, penjajah semakin kuat yang dapat bertindak leluasa menindas rakyat. Keberhasilan penerapan politik adu domba dan memecah belah kekuatan yang tumbuh, menyadarkan para pemuda bumiputra untuk menggunakan cara lain. Cara lain itu adalah dengan membangun kebersamaan dalam satu ikatan kebangsaan.

Awal dari bangkitnya kesadaran itu adalah berdirinya organisasi kemasyarakatan Boedi Oetomo (BO) dengan doktrin perjuangannya menumbuhkan semangat kebangsaan. Kesadaran itu tumbuh setelah

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Diskusi memperingati hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2004

<sup>2</sup> Pencinta Budaya/Mantan Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan Staf Ahli Menteri

mereka belajar di Belanda, banyak membaca buku dan mempelajari berbagai cabang ilmu, serta bergaul dengan pemuda-pemuda dari berbagai bangsa. Mereka itu biasa disebut sebagai kaum terpelajar.

Kesadaran itu makin tampak ke permukaan ketika para pemuda bumiputra yang belajar di Belanda yang menjadi anggota perkumpulan *Indische Vereeniging* tidak mau lagi mengenal sifat kedaerahan.<sup>3</sup>

Mereka kemudian mendirikan *Indonesisch Verbond*. Kata Inlander sebagai sebutan bagi orang-orang bumiputra berubah menjadi Indonesier. Kata ini di perkenalkan oleh Prof. Mr. Voollenhoven melalui bukunya yang berjudul *De Indonesier en Zijn Grond*. Sesudah itu, kata Indonesia banyak digunakan oleh pemuda bumiputra yang belajar di Belanda. Dalam Kongres Internasional yang mereka hadiri secara terbuka “dipropagandakan” kata Indonesia itu. Pers Indonesia kemudian mengambil alih kata itu dan secara terus menerus kata itu digunakan.

## II. Kesadaran Berbudaya Bangsa

Kesadaran berbudaya dan kesadaran berbudaya bangsa memiliki persamaan makna disamping perbedaan. Kesadaran berbudaya itu ditandai kesadaran dari semua suku bangsa untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang memiliki ide, konsep, sistem nilai, perilaku dan berbagai macam benda sebagai perwujudan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kehidupan mereka mencerminkan sebagai suku-suku bangsa yang telah memiliki budaya dan peradaban yang tinggi. Masing-masing memiliki kesadaran untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya, sebagai acuan dalam kehidupannya. Dalam kondisi dijajah mereka telah membuktikan mampu mempertahankan eksistensi budayanya itu.

---

<sup>3</sup>Perkembangan Bahasa Indonesia Dalm Politik, Moh.Hatta, Bahasa dan Sastra

Sementara itu, yang dimaksud dengan kesadaran berbudaya bangsa, adalah kesadaran dari masing-masing suku-suku bangsa untuk tidak hanya mengenal kebudayaan sukunya, tetapi juga kebudayaan bangsa, bangsa Indonesia. Selama ini pembicaraan tentang kesadaran berbudaya bangsa cenderung kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan kesadaran berbangsa. Mungkin karena masalah bangsa lebih memiliki nilai politis dan strategis dibandingkan dengan kebudayaan. Bahkan bahasa sebagai bagian dari kebudayaan lebih penting, sehingga menjadi salah satu butir dalam ikrar Sumpah Pemuda.

Kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa memiliki hubungan yang dekat, bahkan hubungan itu dalam bentuk timbal balik. Tumbuhnya kesadaran berbudaya bangsa, tidak terlepas dari bangkitnya kesadaran berbangsa. Tetapi tidak salah jika dikatakan bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa karena didorong oleh kesadaran bahwa antara kebudayaan masing-masing suku memiliki unsur kemiripan atau kesamaan itu menumbuhkan solidaritas di antara suku bangsa, dan dari sana tumbuh kesadaran berbangsa. Dalam sejarah kehidupan kita, kebudayaan mempunyai peran yang berbeda-beda. Peran itu dapat dilihat dari penilaian dalam zaman pra-revolusi, zaman revolusi dan peran zaman pembangunan. Dalam zaman pra-revolusi, kebudayaan Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk kesadaran berbangsa.

Dalam kaitan dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa dan kesadaran berbudaya bangsa di kalangan masyarakat suku-suku bangsa itu, ada 3 makna yang menarik untuk dicermati. Pertama, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bagian dari tumbuhnya kesadaran berbangsa.

Lahirnya kesadaran untuk menjadi satu ikatan, "satu bangsa," mencerminkan betapa dalamnya keikhlasan masing-masing suku bangsa untuk merubah statusnya dari suku bangsa menjadi bangsa. Kenaikan status itu membawa perubahan yang sangat mendasar

dalam hal kerangka berfikir (*paradigma*) masyarakat.<sup>4</sup> Kerangka berfikir kesuku bangsa yang telah berkembang berabad-abad ini harus berubah atau lebih tepat bertambah menjadi kerangka berfikir kebangsaan. Sebaliknya, kerangka pikir kebangsaan akan banyak diperkaya oleh kerangka pikir suku bangsa.

Di samping banyak elemen kesukubangsaan yang harus disesuaikan dengan kehadiran elemen kebangsaan, tidak sedikit elemen kesukubangsaan yang meningkat statusnya menjadi elemen kebangsaan. Singkatnya, sebagai konsekuensi dari perubahan itu masyarakat tidak hanya menggunakan kebudayaan suku bangsa sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga menggunakan kebudayaan kebangsaan sebagai garis acuan. Di samping masyarakat menggunakan sistem budaya suku bangsa, juga akan menggunakan sistem budaya kebangsaan.

Ikatan kesukubangsaan tidak menjadi renggang akibat perluasan persaudaraan dalam ikatan kebangsaan. Mereka tetap dapat hidup dalam kelompok suku bangsanya, dan masing-masing mempertahankan kebudayaannya. Kebudayaan suku bangsa ada, sebelum adanya kebudayaan bangsa. Kebudayaan suku bangsa ada, selama bangsa Indonesia ada. Kebudayaan suku bangsa akan tetap ada, meskipun bangsa Indonesia karena sesuatu hal tidak ada.

Kedua, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai bentuk "perlawanan budaya." Yang dilawan adalah kebudayaan penjajah dalam arti luas. Meskipun kebudayaan penjajah lebih berkembang di daerah perkotaan, tetapi karena didukung oleh kekuasaan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan sebagai bangsa terjajah, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengatualisasi kesukubangsaaanya, apalagi kebangsaannya secara bebas. Kebudayaan yang pada hakikatnya bersifat dinamis, selalu berkembang menyesuaikan diri dengan perubahan dimandulkan oleh

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Slametmulyana, Politik , Bahasa Nasional, Jambatan Jakarta. 1966 hal. 2

berbagai tindakan pengekangan.

Salah satu contoh adalah soal pemakaian bahasa. Pemerintah Belanda berupaya keras untuk menjauhkan para pelajar dari pemakaian bahasa Melayu dengan alasan kepentingan pendidikan, di samping dengan sengaja memberikan peluang besar bagi orang bumiputra yang pandai berbahasa Belanda untuk maju dan mendapatkan posisi yang baik dalam pemerintahan. Penyebarluasan pemakaian bahasa Belanda merupakan bentuk penjajahan budaya yang perlu diimbangi dengan perlawanan budaya, dalam bentuk upaya membangkitkan kesadaran berbudaya bangsa.

Ketiga, kesadaran berbudaya bangsa dalam makna sebagai kesadaran akan nasib kebudayaan baik kebudayaan bangsa maupun suku bangsa arah ke depan. Pengakuan terhadap kehadiran kebudayaan bangsa konsekuensi terhadap eksistensi kebudayaan suku bangsa dan sebaliknya. Semangat kehidupan suku bangsa tidak boleh padam karena pertumbuhannya menjadi anggota bangsa. Perlombaan untuk melaksanakan aspirasi dan mempertahankan nilai-nilai budaya suku bangsa harus dapat tersalur secara positif dalam kerangka kebangsaan.

### III. Bagaimana memperkuat kesadaran berbudaya bangsa?

Meskipun masih dalam kondisi dijajah, kaum terpelajar telah menempuh berbagai cara untuk memperkuat kesadaran berbudaya bangsa. Antara lain mendorong perkembangan organisasi kemasyarakatan yang berazaskan perjuangan kebangsaan, pendidikan bagi orang-orang bumiputra, dan membuka perspektif kehidupan yang menguntungkan bagi golongan bumiputra yang pandai berbahasa Belanda dalam pemerintahan. Termasuk juga pemanfaatan Dewan Rakyat (*Volksraad*) sebagai ajang kompetisi dengan orang-orang Belanda. Pada waktu menjadi anggota Dewan Rakyat, Dr. Radjiman Wediodiningrat pernah hampir terpilih menjadi Ketua Dewan. Pada pemilihan pertama Radjiman memperoleh jumlah suara sama besar

dengan Mr. Schuurman. Setelah pemilihan diulang, Radjiman kalah tiga suara dan dengan kekalahan yang tipis itu membuktikan bahwa orang-orang bumiputra mampu untuk berdiri sejajar bahkan memimpin bangsa Belanda.

Disamping itu, khusus di bidang kebudayaan juga dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat kesadaran berbudaya bangsa. Berdirinya lembaga-lembaga kebudayaan seperti: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778); Literary Society (1811); Instituut voor de Javaansche Taal (1832); Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundige onderzoek op Java en Madoera (1901); Volklectuur / Balai Pustaka (1908), telah menyadarkan betapa pentingnya pembinaan dan pengelolaan kebudayaan. Demikian pula lembaga yang berdiri pada periode setelah berdirinya BO seperti: Oudheidkundige Dient in Nederlandsch-Indie / Lembaga Purbakala (1913); Bataviaasch Kunstkring / Lingkaran Seni Batavia (1914); Java-Instituut (1919); hingga berdirinya Keimin Bunka Shidoso tahun 1942. Di samping itu juga pendirian berbagai museum seperti: museum Nasional sekarang (1778); museum Radya Pustaka (1890); Museum Zoologi, Bogor (1894); museum Zoologi, Bukittinggi (1894); museum Mojokerto, Jawa Timur atas usul Bupati RAA.Kromoadiwidjojo Adinegoro (1912);museum Mangkunegoro, Surakarta (1918), museum Rumah Aceh, di Banda Aceh (1915); museum Trowulan, Jawa Timur (1920); Museum Geologi, Bandung (1929); Museum Bali, di Denpasar (1932); Museum Rumah Adat Banjuang, Bukittinggi (1933); Museum Sonobudoyo, Yogyakarta (1935) dan Museum Simalungun, Sumatera Utara (1938), memiliki arti yang sama dengan berdirinya lembaga-lembaga tersebut. Beberapa dari organisasi itu menjadi "cikal-bakal" lembaga-lembaga yang sekarang ada.

Semangat untuk memperkuat kesadaran berbudaya bangsa tidak hanya dimotivasi oleh berbagai contoh di atas. Ada dua upaya yang menurut hemat saya memiliki nilai sejarah yang amat tinggi. Pertama, ketika bahasa Indonesia (waktu itu masih disebut sebagai

bahasa Melayu) ditetapkan untuk digunakan sebagai bahasa kerja sidang Dewan Rakyat<sup>5</sup>.Kedua, ketika diselenggarakan suatu kongres pertama untuk membahas tentang nasib kebudayaan arah ke depan. Kedua peristiwa menurut hemat saya memiliki nilai sejarah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kedua peristiwa itu diselenggarakan tahun 1918, yang berarti tepat diantara dua peristiwa penting di atas, yaitu Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928.

## 1. Pemakaian Bahasa Melayu di Volksraad

Masalah bahasa memegang peranan penting dalam politik penjajahan, baik Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang, untuk menanamkan kekuasaannya. Mereka memaksa rakyat untuk memahami dan memakai bahasa Belanda. Demikian pula halnya dengan ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia.

Salah seorang pendiri bangsa yang menentang pemakaian bahasa Belanda di lembaga pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra tahun 1916-1917 beliau menyatakan. *"....maka tibalah juga waktunya di mana satu bahasa bumiputra terpenting akan menggantikan kedudukan bahasa Belanda dan di semua sekolah Hindia, bahasa Belanda akan dipelajari sebagai bahasa asing yang diperlukan."*<sup>6</sup>

Pada akhirnya penjajah menyadari bahwa memaksakan penggunaan bahasanya justru merugikan bagi kepentingannya. Diperlukan bahasa suku bangsa yang dapat menjadi bahasa pergaulan (*lingua franca*) baik dalam hubungan antar suku maupun dengan pemerintah Belanda. Belanda lebih sering menggunakan bahasa Melayu Riau sebagai pilihan. Sebagai contoh, dalam buku panduan

---

<sup>5</sup>Analisis Kebudayaan (majalah) tahun 1984: hal. 5

<sup>6</sup>Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan II, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, 1994: hal.

pariwisata yang terbit 1786 ditulis oleh Johannes Hofhout untuk para pegawai VOC yang baru tiba di Batavia, disamping berisi informasi tentang keindahan daerah Cipanas, dan peringatan (travel warning) tentang berbahayanya penyakit tropis dan perdagangan barang-barang terlarang juga memuat daftar kata-kata bahasa Melayu yang berguna dalam percakapan sederhana.<sup>7</sup>

Langkah lain yang dibuat Belanda adalah ketika menyetujui penetapan ***bahasa Melayu sebagai bahasa kerja Dewan Rakyat***. Penetapan itu merupakan bentuk keberhasilan kaum terpelajar dalam memanfaatkan lembaga yang terhormat itu untuk memperkukuh kesadaran budaya bangsa. Penetapan itu secara tidak langsung melapangkan jalan menuju terwujudnya bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia.

Kelebihan bahasa Melayu Riau menjadi bahasa pergaulan didukung oleh perannya sebagai bahasa dagang, sehingga pemakaian bahasa Melayu Riau menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Jiwa bahasa itu telah bertemu dengan bahasa-bahasa suku bangsa lainnya. Telah terjadi kontak sosial yang mendekatkan rasa kesukuan kepada rasa kebangsaan, sehingga akhirnya pada ***Kongres Pemuda tahun 1928 bahasa Melayu Riau itu dijunjung sebagai bahasa persatuan***.

Pengakuan itu merupakan peristiwa sejarah yang amat penting. Lagi-lagi telah lahir keikhlasan dari suku-suku bangsa yang lain menerima bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dalam pergaulan bangsa. Patut dicatat berdasarkan data pemakaian bahasa suku bangsa (tahun 1930) menunjukkan bahwa pemakai bahasa Melayu jauh lebih sedikit dibanding bahasa suku yang lain. Bahasa Jawa dipakai oleh 27.808.623 jiwa atau 47,02%, bahasa Sunda dipakai oleh 8.594.834 jiwa atau 14,53%, dibanding dengan pemakai bahasa Melayu Riau sebanyak 1.988.648 atau hanya 4,97% dibandingkan dengan jumlah

---

<sup>7</sup>Denys Lombard, Nusa Jawa; Silang Budaya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000: hal. 50

penduduk Nusantara.<sup>8</sup>

## 2. Kongres Kebudayaan sebelum Indonesia merdeka

Kongres Kebudayaan (KK) pertama sebelum Indonesia merdeka telah berlangsung 7 kali, tetapi hal ini tidak banyak diangkat ke permukaan. KK pertama diselenggarakan di Surakarta, tanggal 5 -7 Juli tahun 1918, dengan nama **“CONGRES VOOR JAVAANSCHЕ CULTUUR ONTWIKKELING,”**<sup>9</sup> atau kalau diterjemahkan menjadi **“Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa.”** Darimana itu sudah sangat jelas sasaran (Jawa) dan tujuan yang akan dicapai.

Kongres ini menjadi motor penggerak kongres-kongres selanjutnya, bahkan dilanjutkan sesudah Indonesia merdeka. Setelah pertama disusul oleh KK tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929 dan terakhir 1937. Kongres ini memiliki makna yang amat penting karena dalam perkembangan tidak hanya membahas nasib kebudayaan Jawa saja tetapi juga, Sunda, Madura dan Bali, bahkan sampai pada pembicara tentang kebudayaan bangsa.

Meskipun kongres ini berlangsung pada masa penjajahan Belanda, inisiatif datang justru datang dari seorang bumiputra, yakni oleh Pangeran Prangwadono. Bersama dengan tokoh-tokoh dari perkumpulan BO dan perkumpulan lainnya, ia menyampaikan gagasan untuk membahas masalah kebudayaan dalam bentuk kongres. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Pangeran Prangwadono adalah pencetus dan perintis penyelenggaraan KK di Indonesia serta orang pertama yang memikirkan tentang nasib kebudayaan bangsa arah ke depan.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Slametmulyana, Politik, Bahasa Nasional, Jambatan Jakarta 1966: hal. 12

<sup>9</sup>Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling, Stoomdrukkerij CA Misset, Semarang: 1918, hal. 3

Memang ada dua pemikiran yang dijadikan sebagai sumber gagasan untuk mengadakan kongres. Pertama, inisiatif datang dari **D. Van Hinloopen Labberton**, yang pada awalnya mengusulkan agar diselenggarakan **Kongres Bahasa Jawa**. Panitia dibentuk di Batavia, dan diminta agar yang menjabat sebagai Ketua Panitia Kongres adalah Pangeran Prangwadono. Kedua, pemikiran datang dari kalangan kaum terpelajar bumiputera anggota BO yang menolak permintaan pusat. Menyikapi kenyataan ini, pusat memutuskan dan membiarkan para anggota BO di Surakarta mengambil langkah untuk mengatur sendiri penyelenggaraan kongres.<sup>10</sup>

Di samping nama-nama berkebangsaan Belanda, nama-nama seperti: PH. Hadinegoro, Prangwadono, Dr. Hoesein Djajadiningrat, R. Sastrowidjono, Soejono, Ki Hajar Dewantara, Dr. Radjiman, R. Ngabei Poerbatjaraka, Dr. Soetomo, RP. Soeroso, Mr. Singgih, Tjipto Mangoekoesoemo, RA. Wiranata Koesoema, adalah nama-nama yang aktif dalam kongres. Dari 9 orang pemprakasa, 5 berasal dari bumiputra (Radjiman, Soetatmo, Notosoedirdjo, Satiman Wirjosandjojo dan Tjipto Mangoekoesoemo) dan 4 berkebangsaan Belanda (A. Muhlenfeld, Z. Stokvis, J. Rottier dan D. Van Hinloopen Labberton).

Pendapat mereka tentang kesadaran berbangsa dan berbudaya bangsa sangat jelas dan tegas. Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, R. Sastrowidjono pada saat itu mengatakan: ***'...telah tiba saatnya untuk menyadarkan masyarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi.'***<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Dari pendapat Takashi Shiraishi, Satria VS Pandita Sebuah Debat Dalam Mencari Identitas, hal. 164-165 dalam Indonesia. Dalam Kajian Sarjana Jepang, Penyunting Akira Nagazumi, Jakarta: Yayasan Obor, 1986, yang dikutip oleh Soebaryo Mangoenwidodo, dalam bukunya yang berjudul 'Dr. KRT Radjiman Wediodiningrat, Hasil Karya dan Pengabdianya, hal. 57-65

<sup>11</sup>Jaap Erkelens, Java-Instituut Dalam foto. 2001, hal. 2

Sementara itu bila dilihat dari sisi pandangan penjajah, salah satu dari sekian banyak cendekiawan Belanda yang memiliki pandangan yang sama dengan jiwa bangsa Indonesia adalah **A. Muhlenfeid**. Dalam kongres itu ia menyatakan pendiriannya tentang perlunya diajarkan sejarah abad-abad yang baru berlalu agar keturunan kita yang sedang tumbuh menyadari betapa buruk akibat yang menyedihkan bagi bangsa yang berselisih dan bercerai-berai. Di samping ia seperti membuat ramalan bahwa pada zaman yang akan datang daerah Jawa dan juga pulau-pulau lain Nusantara akan mendapatkan kedaulatan penuh.

#### IV. Penutup

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbangsa dengan kesadaran berbudaya bangsa memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kesadaran itu tumbuh karena makin berkembangnya wawasan kaum terpelajar bumiputra tentang kebangsaannya. Lahirnya kesadaran itu telah diperjuangkan melalui jalan yang panjang dan berliku. Buah dari kesadaran itu kini telah kenyataan. Kita sebagai generasi penerima warisan harus sanggup untuk menjaga dan terus diperkukuh agar kebangsaan Indonesia tetap ada. Mudah-mudahan catatan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 17 Mei 2004

Nunus Supardi

# KAUM INDO DAN NASIONALISME : HIBRIDITAS KOLONIAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS INDONESIA

Pradipto Niwandhono<sup>1</sup>

## A. Pengantar

Masa akhir kolonialisme Belanda atau “Zaman pergerakan” merupakan sebuah periode yang krusial dalam penciptaan Indonesia modern. Bertolak dari proyek modernisasi negara kolonial, darinya telah lahir benih-benih pemikiran baru yang terkristalissi dalam sebuah konsep kebangsaan yang bersifat terbuka dan pluralistis, serta meliputi semua kelompok etnis yang mengakui kepulauan Hindia (Indonesia) sebagai tanah airnya. Gagasan kebangsaan ini, bagaimanapun adalah produk barat dan telah mengalami proses yang kompleks sebelum menemukan bentuk finalnya. Terdapat sejumlah pengaruh penting dalam pembentukan ide kebangsaan multietnis ini, salah satunya berasal dari gerakan emansipasi sosial kaum peranakan Eropa (Indo).

Tulisan ini untuk sebagian besar merupakan singkatan dari tulisan saya, “Yang Ter(di)lupakan : Kaum Indo dan Benih nasionalisme Indonesia” (2011)<sup>2</sup>, dengan tambahan beberapa temuan argumen dalam penelusuran yang lebih mutakhir. Kami melihat bahwa keberadaan kaum Indo dan kebudayaan hibrida dari masa kolonialisme Belanda merupakan salah satu faktor esensial yang memungkinkan masuknya gagasan Barat dalam hal konsep kebangsaan dan kewarganegaraan pluralistik di Indonesia. Dalam situasi kolonial zaman Politik Etis yang

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Staf Pengajar di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (Universitas Airlangga Surabaya)

<sup>2</sup>Pradipto Niwandhono, Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia (Yogyakarta: Djaman Baroe, 2011).

diwarnai oleh gagasan mengenai “asosiasi”—kerjasama yang harmonis antara peradaban Barat dan Timur, Eropa dan Asia – itulah gagasan para intelektual Indo mengenai nasionalisme multietnik mulai mendapat dukungan luas dan menjadi pemikiran arus utama dalam gerakan sosial kebangsaan di Indonesia, disamping nasionalisme berbasis keagamaan maupun gerakan sosialis – marxis. Disamping kaum Indo, tentu saja ada elemen lain yang ikut berperan dalam memunculkan ide kebangsaan pluralis seperti halnya kaum terpelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Negeri Belanda, maupun para pengikut gerakan Teosofi yang mengidealkan suatu “asosiasi” lainnya dalam bidang spiritual-keagamaan. Meletusnya pemberontakan komunis tahun 1926, umumnya dianggap sebagai batas akhir dari zaman Politik Etis dimana ia juga mengakhiri cita-cita asosiasi. Politik kolonial yang lebih konservatif dan represif ditetapkan, sementara posisi orang-orang Indo menjadi semakin sulit dengan adanya polarisasi yang makin tajam antara semangat kebangsaan Indonesia di satu sisi dan rasisme masyarakat Eropa di sisi lain.

## **B. Kaum Peranakan Eropa dan kebudayaan Indis**

Sejarah keberadaan komunitas campuran Eropa-Indonesia telah berlangsung setua kolonialisme Belanda itu sendiri. Terbentuknya komunitas berdarah campuran ini terjadi seiring dengan ekspansi koloni para pemukim Belanda sejak abad ke-17 di sejumlah kota kolonial utama seperti Batavia dan kota-kota pelabuhan lainnya. Pertambahan pesat populasi penduduk Eurasia didukung oleh kondisi sosial masyarakat pemukim Belanda sendiri. Pada awal periode VOC, hampir tidak ada perempuan Eropa yang datang dan menetap di kepulauan Indonesia. Sebagai akibatnya, terjadi perkembangan pesat hubungan perkawinan antar-ras antara orang-orang Eropa (Belanda) dengan wanita Asia, baik pribumi maupun Tionghoa yang melahirkan keturunan campuran. Jumlah kasus pergundikan yang melibatkan wanita lokal juga cukup besar, khususnya di berbagai tanah partikelir

(swasta) milik orang-orang Belanda<sup>3</sup>. Kaum peranakan Eropa-Asia, yang pada periode VOC lazim disebut dengan istilah mestizo atau mestiezen merupakan bagian populasi terbesar dalam komunitas pemukim Eropa di Indonesia.

Kedudukan golongan Eurasia pada periode VOC masih relatif kuat, terlihat dari fakta bahwa ada seorang Eurasia yang menjadi gubernur jenderal, yaitu Dirk van Cloon (menjabat 1732-1735). Pada zaman Pencerahan Eropa yang disusul periode perang Napoleon dan pemerintahan selingan Inggris, kedudukan mereka secara sosial maupun Eropa seperti Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan . Batavia (Bataviaasch Genootschap voor Kunste en Wetenschappen) yang didirikan pada 1778, dan loji Masonik pertama di Batavia. La Choésie pada tahun 1762<sup>4</sup>. Gerakan kemasonan (Freemasonry), merupakan sebuah perkumpulan esoterik yang memiliki peran sentral dalam pengembangan pemikiran bebas masa pencerahan, sekaligus menjadi tempat berkumpul bagi para elite koloni dan orang-orang yang paling berpengaruh. Meningkatnya populasi para pendatang Eropa serta pengaruh modernisasi negara kolonial pasca Pencerahan, menyebabkan semakin tersisihnya kaum Eurasia dari peran dan kedudukan yang penting di koloni.

Pembentukan komunitas peranakan Eropa-yang dikenal dengan berbagai istilah akan tetapi sejak abad ke-19 lazim disebut sebagai Indo-Europeanen atau orang Indo – disertai dengan perkembangan kebudayaan campuran antara Eropa yang dibawa oleh para pemukim Belanda dengan berbagai unsur lokal. Kebudayaan

---

<sup>3</sup>Mengenai kondisi perguikan di Hindia Belanda seperti pergudikan di kalangan militer atau pergudikan tangsi”serta kebiasaan para pemilik tanah partekelir Belanda mempunyai Nyai atau istri pribumi, lihat Reggie Baay, Nyai dan Pergudikan di Hindia Belanda, (Jakarta Komunitas bamdu : 2008)

<sup>4</sup>Jean Gelman Taylor, Kehidupan Sosial di Batavia: Orang Eropa dan Hindia Timur (Jakarta; Masup Jakarta, 2009, HLM. 154)

mestizo atau,” Indisch “ (Indis) ini menjadi suatu elemen kultural yang dominan dalam kehidupan urban khususnya pada masa puncak kolonialisme Belanda (“Tempo Doeloe”. 1870-1914). Baik arsitektur dan tata ruang kota hiburan hingga mode pakaian dan makanan sebagian besar memiliki unsur yang bersifat “Indis”<sup>5</sup>. Pada masa sekarang ini Indis menjadi sebuah konsep mengacu pada hibriditas kolonial dalam berbagai aspeknya atau segala hal yang merupakan artefak dari bekas Hindia Belanda di masa lampau, sehingga lahir istilah budaya Indis, kesenian Indis termasuk keluarga atau komunitas Indis. Istilah komunitas Indis mengacu pada orang-orang keturunan Eropa yang tinggal dan menetap di kepulauan Hindia dan mengalami pembauran baik secara biologis (perkawinan) maupun kultural. Dengan demikian istilah ini dapat meliputi kategori orang berdarah campuran (Indo) maupun golongan orang Eropa murni kelahiran Hindia atau kreol. Suatu keluarga Indis dapat mencakup orang kreol, indo sekaligus para nyai pribumi atau Tionghoa yang telah bertahun-tahun hidup dilingkungan Eropa dan mereka semua mengadopsi kebudayaan campuran Eropa-Indonesia.

### C. Emansipasi Sosial Kaum Indo-Eropa

Dalam sejarah sosial masyarakat kolonial, kaum Indo menempati posisi yang khas yaitu sebagai semacam “sambungan” atau penyangga sosial antara masyarakat pemukim kulit putih Eropa yang populasinya kecil dengan masyarakat pribumi yang jauh lebih besar. Peran serupa juga dialami oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Pada umumnya semakin kuat darah Eropa terdapat dalam diri seorang Indo, semakin kuat pula kedudukannya dalam masyarakat kolonial. Akibat terdesaknya golongan Indo-Eropa oleh pendatang dari Eropa

---

<sup>5</sup>Untuk penjelasan yang lebih mekartaogyndaam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan budaya Indis lihat Djoko Soekiman, Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (Abad XVII- Medan Abad xx.(Yakarta : Benteng Budaya:2000).

mengakibatkan makin banyak golongan ini yang jatuh menjadi kelompok miskin. Mereka adalah bagian golongan Indo kecil (kleine Indo) yang tidak menikmati kehidupan di tengah-tengah komunitas Eropa, melainkan lebih banyak berbaur di antara golongan penduduk non-Eropa, baik orang-orang Tionghoa maupun bumiputera.

Sejak tahun 1880-an, perkembangan solidaritas para warga Indis Belanda sedikit banyak terkait dengan, dan dipacu oleh perkembangan jurnalistik yang memang banyak dikuasai oleh kaum Indo. Kelompok jurnalis ini membentuk inti dari golongan elite yang kemudian muncul dengan gerakan sosial untuk mendukung emansipasi kaum Indo-Eropa. Salah satu tokoh dari kelompok ini, Paul Adriaan Daum pada tahun 1885 mendirikan sebuah surat kabar berukuran tabloid, *Bataviaasch Nieuwblad* yang kemudian hari menjadi semacam corong suara dari gerakan emansipasi kaum Indo-Eropa<sup>6</sup>. Surat kabar ini telah melahirkan tokoh-tokoh terkemuka dalam pergerakan kaum Indo, F.H.K (Karel) Zaalberg (1873-1928) dan E.F.E (Ernest) Douwes Dekker (1879-1950). Kedua tokoh ini mewakili dua alur pemikiran yang berbeda dalam gerakan emansipasi tersebut, walaupun pada awalnya mereka sependapat dalam memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap keturunan campuran dan hak kewarganegaraan bagi seluruh penduduk Hindia, yang akan diuraikan nanti.

Gerakan emansipasi sosial kaum Indo berawal dari suatu organisasi sosial bernama Soeria Soemirat (secara harfiah bermakna "matahari terbit") pada akhir dekade 1880-an. Perkumpulan yang berpusat di Semarang ini muncul dari inisiatif para pengusaha swasta Indo dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di kalangan orang Eropa di Hindia yang menghadapi kesulitan dalam mencapai penghidupan layak. Mereka berprinsip bahwa selama masih

---

<sup>6</sup>Ulbe Bosma, "Kelas Indo dan Kewarganegaraan Indis" dalam Joost Cote & Loes Westerbeek (ed), *Recalling The Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004), hlm. 73.

banyak orang Indo yang mampu mengisi lowongan pekerjaan, maka upaya mendatangkan orang Belanda totok ke koloni harus dicegah. Soeria Soemirat memiliki seorang pendukung yang berpengaruh, jurnalis dan tokoh kaum etisi Pieter Brooschft dengan surat kabarnya De Locomotief. Melalui surat kabar tersebut, Brooschoft berhasil menarik perhatian dan simpati banyak kalangan mengenai buruknya kondisi kaum Indo yang termiskin<sup>7</sup>.

Pada Oktober 1898, didirikan perkumpulan Indo yang lebih besar yaitu Indische Bond dibawah inisiatif sejumlah tokoh Indo antara lain G.A Adriesse dan F.H.K Zaalberg. Zaalberg mewakili golongan menengah Indo yang memahami identitas mereka sebagai orang Eropa berbudaya tropis. Walaupun mendukung emansipasi, kenyataan bahwa posisi sosial-ekonomi, mereka yang tidak berbeda jauh dari kaum totok menyebabkan mereka tidak terlalu mempunyai perasaan keterasingan dan kebencian terhadap 'kulit putih' sebagaimana hanya golongan Indo kecil. Pada dasarnya tidak terdapat suatu pemikiran tunggal di kalangan pergerakan kaum Indo. Spektrum pemikiran mereka cukup bervariasi antara kelompok yang merasa bahwa perjuangan mereka sebatas emansipasi sosial ekonomi dan mengatasi persoalan kemiskinan, hingga mereka yang mendukung hak-hak politik kewarganegaraan bagi kaum Indo dan pemberian otonomi yang lebih besar bagi Hindia Belanda.

Kelompok yang mendukung tujuan-tujuan yang lebih bersifat politis kemudian memisahkan diri membentuk Insulinde pada tahun 1907. Pada awalnya tujuan organisasi lebih terbatas pada 'perjuangan mencapai keadaan yang lebih baik bagi orang-orang Eropa yang

---

<sup>7</sup>Reggie Baay, op.cit..., hal 187-188

lahir dan menetap di Hindia Belanda.<sup>8</sup> Dalam perkembangannya kemudian, organisasi ini mulai membuka keanggotaannya untuk kelompok penduduk yang lebih luas, khususnya setelah dilarangnya Indische Partij (IP) yang dipelopori Ernest Douwes Dekker sehingga mengakibatkan eksodus para pendukung IP menjadi anggota Insulide. Gerakan emansipasi kaum Indo mengalami perpecahan serius dengan adanya agitasi radikal kelompok Douwes Dekker yang mendukung kemerdekaan penuh Hindia, sementara sebagian besar kaum Indo dan bumiputera waktu itu masih berfikir mengenai kerjasama (asosiasi) damai antara Belanda dan Indonesia dibawah naungan kewarganegaraan Hindia Belanda. Dalam wacana yang didukung banyak kaum Etisi ini, Hindia Belanda dipersiapkan untuk menjadi sebuah negara birokratik dan dilandasi prinsip-prinsip yang melandasi negara modern di Eropa pasca Abad Pencerahan. Kemandirian politik bagi Hindia Belanda semestinya dicapai melalui cara-cara konstruktif dan evolusioner, alih-alih melalui perubahan radikal dan revolusioner.

Polarisasi dalam gerakan Indo-Eropa menjadi nyata dalam tahun-tahun Perang Dunia (1914-1918), khususnya setelah pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad) pada Mei 1918. Terbentuknya Volksraad merupakan sebuah pencapaian penting baik kaum Etisi Belanda maupun Kaum pergerakan Indis yang memperjuangkan suatu konsep kewarganegaraan Hindia bagi kaum Indo sejajar dengan kelompok penduduk lainnya. Pada Juli 1919, dibawah inisiatif Karel Zaalberg dan sejumlah pemimpin Indo dari bekas Indische Bond, diputuskan untuk membentuk suatu organisasi baru yang lebih solid memperjuangkan hak-hak sipil kaum Indo dengan nama Asosiasi Indo

---

<sup>8</sup>Istilah "Insulinde" konon dipopulerkan oleh Multatuli (Eduard Douwes Dekker) sebagai sinonim untuk kepulauan Hindia (Indonesia). Perkumpulan Insulinde berawal dari ketidakpuasan sebagian anggota Indische Bond akan orientasi organisasi tersebut yang dianggap terlalu lunak. Lihat Petrus Blumberger, *De Indo-Europeesche Beweging in Nederlandsch-Indie* (Haarlem : H.D Tjeenk Willink, 1939) hlm.33

Eropa atau Indo-Europeesch Verbond (IEV)<sup>9</sup>. Salah satu karakter khas dari organisasi IEV ini adalah komitmennya yang cenderung eksklusif yang mengutamakan kepentingan kaum Indo, sekalipun itu berarti berbenturan dengan gerakan nasionalisme kaum pribumi Indonesia yang jauh lebih besar. Sementara itu kelompok Indo lain yang mengikuti haluan Douwes Dekker membentuk Nationaal Indische Partij ( NIP ) sebagai pengganti Insulinde, akan tetapi partai ini tidak bertahan lama, dan para anggotanya melebur dalam organisasi atau sosialis yang lebih radikal.

#### **D. Sebuah Konsep Nasionalisme Pluralistik**

Nasionalisme modern nyaris merupakan sebuah fenomena global pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Asia, nasionalisme mengekspresikan diri sebagai gerakan anti-kolonial Eropa atau nativistik yang mencoba menghidupkan kembali dari “modernisme” Barat. Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga sumber utama dari gerakan-gerakan sosial-politik yang bercorak kebangsaan atau antikolonial. Pertama ialah gerakan nasionalisme berbasis etnik, khususnyaarevivalisme budaya Jawa cukup kuat mewarnai wacana pemikiran kebangsaan pada awal abad ke-20. Sebagian kaum aristokrat Jawa pernah mencapai taraf peradaban yang tinggi pada masa Majapahit dengan kebudayaan Hindu-Budhanya dan adalah menjadi tujuan mereka untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Jawa ‘asli’. Mereka sama-sama menolak Islam maupun Barat sebagai unsur

---

<sup>9</sup>Petrus Blimberger, op.out, hlm.40-50

asing dan dekaden.<sup>10</sup> Kedua, ialah gerakan sosial berbasis keagamaan Islam, dimana sebagai agama mayoritas di kepulauan Indonesia Islam memang menjadi faktor penting dalam pembentukan solidaritas lintas-etnis yang sifatnya anti-kolonial. Meski gerakan pan-Islam modern sering mendapat pengawasan dari pemerintah kolonial, beberapa organisasi semacam Sarekat Islam mampu menjadi salah satu gerakan massa terbesar. Ketiga, gerakan nasionalisme sekular yang berakar pada gagasan Pencerahan Eropa mengenai hak kewarganegaraan dan kontrak sosial sebagai landasan berdirinya negara. Salah satu model negara-bangsa modern tentu saja adalah Amerika Serikat merupakan contoh awal dari gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh kelompok ras campuran. Nasionalisme 'kreol' ini jelas menjadi rujukan utama dari kaum Indo radikal di Hindia Belanda.<sup>11</sup>

Pengaruh nasionalisme modern dalam gerakan kaum Indo tampak paling jelas dalam pemikiran dan kampanye politik Ernest Douwes Dekker. Ia merupakan seorang tokoh pertama yang sungguh-sungguh tertarik pada fenomena nasionalisme Asia dan telah mengadakan sebuah studi mendalam tentang hal ini. Pemikirannya tentang nasionalisme Indis dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh gerakan kebangsaan kaum mestizo di Filipina yang sebagai besar adalah

---

<sup>10</sup>Nasionalisme Jawa mewujudkan diri dalam bentuk gerakan revivalisme budaya Jawa, diawali oleh organisasi Boedi Oetomo (1908), Tri Koro Dharmo (1915), dan terutama pembentukan organisasi Comite Voor het Javaansche Nationalisme (1917) yang dipelopori oleh R.M Soetarno Soeriokoesoemo, seorang kerabat Soewardi Soerjaningrat dari keluarga Paku Alam. Lihat Hans van Miert, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1978-1930* (Jakarta : KITLV / Hasta Mitra, 2003) hlm.128-129

<sup>11</sup>Nasionalisme modern sering dipersepsikan sebagai sebuah komunitas imajiner yang lebih diikat oleh kemajuan teknologi, suatu kapitalisme mesin cetak yang telah memungkinkan terciptanya solidaritas kebangsaan yang lebih luas. Mengenai nasionalisme modern dan berbagai kasus nasionalisme kreol lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001)

berasal ras campuran ini berhasil mengadakan revolusi dan mendirikan sebuah republik merdeka. Dalam kunjungannya Eropa antara tahun 1910 hingga pertengahan 1911, Douwes Dekker sempat menemui beberapa tokoh nasionalis dari India-Inggris (Britis-India), diantaranya ialah tokoh radikal Shyamaji Krishnavarma, pemimpin redaksi majalah *The Indian Sociologist*.<sup>12</sup>

Kemunculan nasionalisme Indis dalam gerakan kaum Indo ditandai oleh kampanye politik dan pemunculan slogan 'Indie voor de Indiers' (Hindia untuk para warga Hindia) oleh tokoh *Indische Bond*, G.A. Andriesse. Oleh Douwes Dekker pengertian Indier dalam kampanye tersebut diperluas maknanya tidak sebatas kaum pemukiman Eropa dan Indo, tetapi juga meliputi seluruh penduduk Hindia Belanda tanpa memandang ras, etnisitas, ataupun agama. Dalam sebuah tulisannya, ia menyatakan bahwa kaum Indo-berbeda dengan orang-orang Jawa, Sunda, Batak dan kelompok etnis lain—tidak memiliki identitas regional sehingga mereka tidak akan mengalami rasa kehilangan identitas dengan mengadopsi konsep kebangsaan yang meliputi seluruh kepulauan Hindia. Wacana semacam ini adalah khas kelompok ras campuran dan gagasan semacam ini telah didukung oleh banyak intelektual Indo – termasuk Zaalberg pada awalnya. Gagasan Douwes Dekker berkembang menjadi kontroversial ketika ia bermaksud mewujudkan nasionalisme multi-rasialnya menjadi sebuah gerakan massa untuk menuntut kemerdekaan yang ia sebut sebagai 'pemerintahan sendiri untuk Hindia'. Bagi Douwes Dekker tercapainya kemerdekaan menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan kebangsaan multiras, mengingat kenyataan bahwa rezim kolonial-lah yang menciptakan sekat dan diskriminasi yang mengakibatkan Indo menjadi warga kelas dua. Douwes Dekker dan para pendukungnya

---

<sup>12</sup>Mengenai wawancara dengan tokoh revolusioner India tersebut lihat Ulbe Bosma Karel Zaalberg: *Journalist en Strijder voor do a Frans GiliInm 199-200*, jugdo, Leiden: KITLV 1997, E.F.E Douwes Dekker, Hilversum: Verloren,1999, hlm 72.i

sadar betapa cengkeraman kekuasaan kolonial bertumpu pada wacana rasis tersebut.

Kampanye politik Douwes Dekker berujung pada pembentukan Indische Partij (IP), yang diresmikan pada Desember 1912 telah didukung oleh ribuan kaum Indo-Eropa maupun pendukung bumiputra.<sup>13</sup> Sebagian besar di antara orang Indo yang bergabung adalah para *kleine Indo*, orang-orang ini melihat program Douwes Dekker 'cukup mewakili kehendak mereka yang sering mengalami frustrasi'. Sementara itu sebagian besar kaum Indo dari Indische Bond termasuk kawan dan mentor lamanya, Zaalberg menjauhkan diri dari kelompok Douwes Dekker. Dukungan juga datang dari golongan elit Indonesia berorientasi sekular dan dekat dengan komunitas Teosofi – seperti Tjipto Mangoekoesomo (1886-1943) dan Soewardi Soerjaningrat (1889-1959)—dan gagasan asosiasi pada umumnya. Tjipto sendiri merupakan seorang pemuda aristokrat Jawa berhaluan modernis dan dikenal dengan pandangannya yang anti-feodal.<sup>14</sup>

Kampanye Indische Partij segera menjadi keprihatinan utama pemerintah kolonial, khususnya karena sikap organisasi ini yang secara terang-terangan menuntut status kemerdekaan. Pada Maret 1913, pemerintah kolonial menolak permohonan badan hukum yang

---

<sup>13</sup> Menurut sejumlah sumber keanggotaan IP juga mencakup orang Cina, jumlah orang Cina yang menjadi anggota Indische Partij jarang disinggung, tetapi jelas bahwa orang-orang keturunan Cina sebagai penduduk yang menetap di Hindia Belanda juga termasuk dalam kelompok yang diajak untuk bergabung. Kemungkinan jumlah mereka paling banyak 300 orang saja, karena jumlah anggota Indo-Eropa 5500 orang, sementara total ada sekitar 7300 anggota (menurut SNI jilid IV), atau setidaknya lebih dari 7. M.H Thamrin: . Lihat Bob Hering., M.H Thamrin : Membangun Nasionalisme Indonesia, Jakarta: Hasta Mitra, 2003 hlm.43.

<sup>14</sup>Pemikiran jipto mengenai pandangan hidup Jawa dan kebangsaan Hindia sudah banyak ditulis.. salah satu sumber referensi yang banyak dikutip penulis dalam kajian ini adalah karya prosopografis dari Savitri Prastiti Scherer, Keselarasan dan kejanggalan : Pemikiran-pemikiran Priyayawa pada Awal Abad XX (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan ,1985)

diajukan IP, dan dengan sendirinya partai menjadi organisasi ilegal. Tidak sampai setengah tahun kemudian para pemimpinnya dikenakan hukuman pembuangan setelah sebuah kampanye protes yang sengit menentang pungutan dalam rangka seratus tahun peringatan kemerdekaan Bebelanda di koloni adalah tidak bijak," andai saya seorang Belanda, kiranya saya tidak akan menyelenggarakan perayaan kemerdekaan di tanah penduduknya tidak kita beri kemerdekaan. Berikan dulu kemerdekaan kepada bangsa terjajah itu, barulah kita merayakan kemerdekaan kita sendiri".<sup>15</sup>

Apa dampak nyata dari gebrakan politik yang berumur pendek ini?. Dalam jangka pendek, IP menimbulkan reaksi negatif bukan saja dari pemerintah kolonial, akan tetapi juga seperti tetapi juga dari kaum pergerakan sendiri. Di kalangan kaum sekular, golongan Etsi dan asosiasi menyayangkan langkah-langkah radikal Douwes Dekker dan kelompok IP-nya yang dianggap destruktif dan menimbulkan perpecahan. Tokoh pendukung asosiasi dan pemimpin perkumpulan Teosofi, D. Van Hinloopen Labberton yang merupakan kawan dan mentor Tjipto sendiri menyatakan bahwa para pemimpin IP "tidak memahami arti kebebasan yang sejati". Dengan mengambil analogi " seperti melepaskan burung kecil dari sarangnya " yang pasti akan celaka, Labberton menyatakan bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang niscaya akan diperoleh melalui proses pematangan diri secara gradual dan berkelanjutan, bukan sesuatu yang dipaksakan.<sup>16</sup> Pandangan serupa juga diungkapkan oleh R.M Noto Soeroto, tokoh

---

<sup>15</sup>R.E Elson, *The Idea of Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (Jakarta: Serambi Pustaka Utama, 2009) hlm. 22

<sup>16</sup>Pandangan Labberton terhadap Indische PARTIJ (ip) dikemukakan Thoesofich Mandblad voor Nederlandsch Indie pada tanggal 6 September 1913, lihat herman A.O De Tollenaere, *The Politics of Divine Wisdom: heosophy and Labour, National and Woman's movements in Indonesia and South Asia 1875-1947*, (Leiden: Katolieke Universiteit Nijmegen, 1996), hlm. 300-301.

priyayi muda yang menempuh pendidikan di Negeri Belanda. Meskipun mengidealisasikan kearifan Timur diatas demokrasi Barat, Noto Soeroto meyakini bahwa kekuasaan Belanda atas Hindia Timur masih mutlak diperlukan setidaknya dalam batas status persemakmuran.<sup>17</sup>

Konsep kebangsaan pluralis yang berkiblat pada demokrasi ala pencerahan Barat sebagaimana diangkat Douwes Dekker dan Tjipto juga mendapat reaksi kritis dari penganjur nasionalisme Jawa, R.M Soetatmo Soeriokoesoemo. Ia menyatakan bahwa “nasionalisme terkait dengan bangsa bukan dengan tanah, dan didasarkan kepada budaya bangsa tersebut.” Ia berupaya mempertentangkan ‘komunitas alami’ yang terbentuk oleh kesamaan keturunan dan budaya versus ‘komunitas rekaan’. Douwes Dekker selalu menyatakan bahwa bangsa Hindia (Indier) terbentuk oleh persamaan nasib dan solidaritas sebagai kelompok yang tertindas, akan justru itulah letak artifisialitas nasionalisme Indis (Hindia) modern, karena “ Kolonialisme Belanda-lah yang menciptakan Hindia atau “Pribumi” sementara Jawa sudah ada dengan sendirinya” ujar Soeriokoesoemo<sup>18</sup>. Dalam menghadapi pertentangan tradisi dan modernitas, Douwes Dekker dan kawan-kawannya d.engan tegas memilih yang terakhir karena bagi mereka nasionalisme adalah temuan modern dan merupakan sesuatu yang masih harus dibentuk dan ditempa, bukan sesuatu yang sudah final.

---

<sup>17</sup>Hans van Miert (2003), op.cit, hlm 124-125

<sup>18</sup>R.E Elson (2009),op.cit, hlm 23-24

## E. Kesimpulan

Pertemuan antara gerakan emansipasi Indo dengan wacana nasionalisme modern telah melahirkan suatu konsep kebangsaan baru yang oleh Douwes Dekker disebut Indisch Nationalisme atau nasionalisme Indis. Konsep kebangsaan di sini adalah temuan modern dan lahir dari pemikiran-pemikiran politik Zaman Pencerahan yang menekankan pada konsep kewarganegaraan dan kontrak sosial sebagai dasar pembentukan negara, melampaui ikatan primordial seperti kesamaan bahasa dan kebudayaan. Dalam kajian ini konsep “Indis” sengaja lebih ditekankan karena pengertian ini menunjukkan posisi kaum Indo sebagai bagian yang selain menjembatani masyarakat pemukim Eropa dengan pribumi juga menjadi inti dari pembentukan komunitas kebangsaan multiras dan pluralistik. Pada dasarnya dapat diungkapkan bahwa inti sekaligus cikal bakal dari komunitas kebangsaan modern itu terdapat pada kelompok-kelompok penduduk penduduk yang terhibridisasi oleh pertemuan kolonial baik itu orang Indonesia yang ter-Eropakan, orang Belanda yang ter-Hindiakan dan terutama orang Indo sendiri.

Nasionalisme Indis sebagai sebuah konsep nasionalisme modern mengambil contoh dari gerakan nasionalisme di negara Amerika Hispanik atau Filipina, dimana kaum ras campuran (*mestizo*) menguasai kepemimpinan gerakan kemerdekaan. Akan tetapi kampanye radikal Douwes Dekker dan IP-nya kurang mendapat dukungan mayoritas elit Indo. Disamping masih menyimpan rasa superioritas terhadap penduduk bumiputera, kaum elite Indo sebagaimana kaum asosiasionis Indonesia juga tidak setuju dengan cara-cara yang akan menimbulkan gesekan. Demikian pula gagasan akan suatu kebangsaan multiras kurang cocok diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam dan pembaratan (atau hibridisasi) hanya menyentuh sekelompok kecil penduduknya.

Di sisi lain, masalah hak kewarganegaraan, patriotisme, dan pemerintahan sendiri adalah warisan nasionalisme Indis yang terus hidup dalam wacana pergerakan nasionalis di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANDERSON, Benedict R.O.G, 2004. Imagined Communitas – Komunitas-komunitas Terbayang, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Blumberger, J.Th Petrus, 1939. De Indo-EuropescheBeweging in Nederlandsch-Indie, Haarlem : H.D Tjeenk Willink
- Bosma, Ulbe, 1997. Karel Zaalberg : Journalist en Strijder Voor de Indo, Leiden: KITLV, Cote, Joost & Westerbeek, Loes (ed) 2004 Recalling The Indies : Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial, Yogyakarta : Syarikat
- De Tollenaere, Herman A.O, 1996. The Politics Of Divine Wisdom : Theosophy and Labour,National and Woman’s movements in Indonesia and South Asia 1875-1947, Leiden : Katolieke Universiteit .
- Djoko Soekiman, 2000 Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa Abad XVIII – medio Abad XX, Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Miert, Hans van, 2003. Dengan Semangat Berkobar :Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930. Jakarta : KITLV/ hasta Mitra.
- Niel, Robert van, 1984 The Emergence of Modern Indonesia Elite. Leiden : KITLV
- Savitri Prastiti Scherer, 1985. Keselarasan dan Kejanggalan : Pimikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX, Jakarta : Pustaka Sinar harapan.
- Taylor,Jean Gelman, 2009: Kehidupan Sosial di Batavia, Jakarta: Masup Jakarta: Komunitas B

# NASIONALISME

Prof. Dr. R.Z Leirissa

## KONSEPTUALISASI

### Nation-state

Pertama-tama kita perlu menentukan apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Untuk itu ada baiknya kita bandingkan konsep nasionalisme dengan konsep nation-state (negara kebangsaan). Kedua kata itu memiliki akar yang sama yaitu nasion (nation), tetapi keduanya mengandung pengertian yang sangat berbeda. Nasion adalah “suatu komunitas yang berdiam dalam wilayah dengan perbatasan yang tetap (borders)”, sebagai suatu komunitas nation bisa diterjemahkan sebagai bangsa.

Kalau nasion lebih mengacu pada masyarakat, maka nation-state, atau negara-kebangsaan, lebih mengacu pada negara (state). Salah satu definisi yang mengandung jangkauan yang luas dan mendalam mengenai nation-state adalah “perangkat lembaga pemerintahan yang jangkauannya mencakup sebuah wilayah dengan garis perbatasan yang pasti, dan yang memonopoli kekerasan (senjata) di wilayah itu, serta yang menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan hukum”.

Mengingat definisi tersebut di atas mengenai nation-state, maka ketika kita bicara tentang nation-state, maka kita sesungguhnya berbicara mengenai lembaga pemerintahan yang mencakup sebuah bangsa (“wilayah dengan garis-garis perbatasan yang pasti”) dan memerintah berdasarkan undang-undang yang disusun secara demokratis. Bentuk pemerintahan yang disebut nation-state berbedadengan kerajaan yang tidak memiliki garis perbatasan yang pasti (boundaries) tetapi hanya “daerah perbatasan” saja (frontier) dan belum tentu memiliki monopoli atas kekerasan (senjata) dan

yang pemerintahannya tidak dilandasi hukum yang dihasilkan secara demokratis, sehingga kerajaan belum tentu mencakup sebuah bangsa. Dari definisi tersebut di atas mengenai nation-state jelaslah, bahwa negara atau nation-state tidak terkait dengan nasionalisme. Negara justru terkait dengan politik.

## **Nasionalisme**

Sebab itu adalah kekeliruan besar untuk menyamakan nasionalisme dengan nation-state (negara) seperti yang pernah dilakukan di masa-masa lampau. Nasionalisme lebih terkait dengan masyarakat dan pada dengan negara, walau negara kadang-kadang juga berkepentingan untuk mengobarkan nasionalisme. Tetapi walau nasionalisme bisa sengaja disebar-sebarkan oleh negara, namun pada umumnya nasionalisme tertanam dalam bagian terbesar dari warganegara yang membentuk suatu komunitas.

Bahwa nasionalisme tidak terkait langsung dengan negara dibuktikan dalam sejarah kita. Sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk pada tahun 1945, sudah ada nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul justru dalam bagian pertama dari abad ke-20. Munculnya nasionalisme Indonesia sejak awal abad ke 20 itu berkaitan dengan suatu perubahan sosial yang terjadi pada saat itu.

Ketika itu telah ada suatu sistem transportasi laut dan darat yang efisien dalam wilayah Nusantara ini yang memungkinkan berbagai anggota suku-bangsa dengan mudah membaaur dalam kota-kota besar di Hindia Belanda. Namun bagi banyak anggota suku-bangsa yang meninggalkan daerah asalnya itu, kehidupan dalam kota-kota besar itu terasa tidak bermakna. Mereka kehilangan makna hidup yang pada yang pernah mereka alami dalam kehidupan kesukuan masing-masing. Dalam kota-kota besar tidak ada kebersamaan tetapi hanya ada rutinitas saja yang tidak membuat kehidupan bersama terasa

nyaman. Dalam keadaan seperti itu terasa sekali kebutuhan untuk adanya perasaan kebersamaan.

Untunglah dalam sejarah kita muncul bahasa persatuan. Bahasa memang merupakan alat komunikasi. Tetapi menurut sementara para ahli sosiologi, bahasa persatuan bisa lebih dari itu. Penggunaan bahasa yang sama pada dasarnya berarti juga menggunakan berbagi unsur-unsur budaya atau gaya hidup yang sama. Bahasa ternyata juga merupakan alat yang bisa mentransfer atau menyebar-luaskan unsur-unsur kebersamaan itu diantara penggunanya. Dengan demikian muncullah perasaan kebersamaan atau nasionalisme dikalangan penduduk yang lalu menamakan dirinya bangsa Indonesia.

Tetapi harus diperhatikan pula, bahwa nasionalisme tidak selalu menyebar secara merata diantara seluruh penduduk yang mendiami suatu wilayah dibawah suatu pemerintahan. Biasanya ada kelompok-kelompok soaial tertentu atau etnisitas yang tidak merasa terikat oleh sumber-sumber kebersamaan tertentu. Maka disamping nasionalisme dari suatu bangsa , di sana sini terdapat “nasionalisme lokal” yang dalam situasi tertentu , banyak warganegara terseret sisa membahayakan integrasi sebuah bangsa. Kemudian, ada pula kelompok-kelompok sosial yang memiliki ideologi tertentu yang bertentangan dengan nasionalisme suatu bangsa.

Selain itu perkembangan nasionalisme yang radikal bisa menimbulkan bahaya pula. Hal itu disebabkan ada kemungkinan, bahwa ketika suatu bangsa mengalami krisis yang berkepanjangan , banyak warganegara terseret secara membabi buta oleh karisme pemimpin-pemimpin tertentu atau ajaran-ajaran mereka. Keadaan seperti itu memungkinkan para pemimpin yang merasa diri diatas angin itu mengubah tatanan pemerintahan demokratis menjadi tatanan yang totaliter.

Sebab itu jelaslah, bahwa sekalipun nasionalisme berbeda dengan nation-state, namun ternyata nasionalisme bisa sangat terkait

dengan kedaulatan nation-state. Ini disebabkan karena, seperti telah jelas di atas, dalam kenyataannya, nasionalisme bisa berubah-ubah. Nasionalisme bisa berwajah keras apabila kedaulatan negara terancam dan rakyat marah karenanya. Dalam situasi seperti itu nasionalisme berwujud gugatan dan permusuhan. Tetapi kadang-kadang pula nasionalisme bisa memperlihatkan wajah yang lembut dan bersahabat. Hal ini terjadi apabila keadaan negara aman dan tenteram dan tidak ada ancaman dari dalam maupun dari luar. Dalam keadaan seperti itu rakyat justru bebas memperjuangkan secara demokratis hak-hak kewarganegaraannya. Sebab itu ada pendapat yang mengatakan bahwa nasionalisme sesungguhnya memiliki dua sisi atau dua muka (junus-face).

### **BAGANNYA**

Kaitan antara nasionalisme dengan kedaulatan dan demokrasi itu bisa digambarkan sebagai berikut :

---

Kedaulatan, nasionalisme dan rakyat :

KEDAULATAN \_\_\_\_\_ NASIONALISME \_\_\_\_\_ RAKYAT

---

Nasionalisme dalam keadaan kedaulatan terancam :

KEDAULATAN \_\_\_\_\_ NASIONALISME \_\_\_\_\_ RAKYAT

---

Nasionalisme dalam keadaan aman dan tenteram :

KEDAULATAN \_\_\_\_\_ NASIONALISME \_\_\_\_\_ RAKYAT

---

## **NASIONALISME DALAM SEJARAH KITA**

### Nasionalisme lokal yang lembut

Pasang-surutnya nasionalisme bisa kita saksikan dalam sejarah kita sendiri. Dalam awal masa pergerakan nasional belum ada nasionalisme dalam arti yang sebenarnya seperti dikemukakan di atas. Budi Utomo sesungguhnya adalah perwujudan dari nasionalisme lokal. Demikian pula organisasi-organisasi pemuda lainnya, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes dan lain sebagainya.

Selain itu dalam periode awal itu nasionalisme lokal tersebut bersifat lembut dan tidak mengancam kedaulatan Belanda. Dalam keadaan itulah para pemuda tersebut bisa berkembang dan memperjuangkan cita-cita lokal masing-masing.

Maka dapatlah dikatakan, bahwa antara tahun-tahun 1908 nasionalisme tampil lembut, tidak galak, tidak menantang. Gagasan dan cita-cita membentuk negara sendiri juga belum muncul. Pemerintah Hindia Belanda ketika itu tidak dilihat oleh gerakan-gerakan lokal itu sebagai ancaman. Tujuan berbagai organisasi kepemudaan itu adalah sekedar keakraban, membina kebudayaan, dan pendidikan. Sarekat Islam yang muncul 1912 juga tidak bersuara lantang terhadap penjajah.

### **Nasionalisme yang menantang**

Nasionalisme Indonesia dalam arti yang sebenarnya dan yang mencakup sebagian penting dari penduduk Nusantara baru muncul dalam tahun 1920-an. Sumpah Pemuda adalah salah satu manifestasinya. Namun nasionalisme Indonesia itu muncul dengan wajah yang ganas, keras dan menantang. Sekalipun ketika itu kedaulatan sebuah negara Indonesia masih berbentuk gagasan dan cita-cita, namun perjuangan bangsa Indonesia pada satu pihak ditujukan untuk mempertahankan gagasan dan cita-cita tersebut terhadap rongrongan

penjajah. Berbagai ideologi yang ekstrem muncul dalam pergerakan nasional. PNI memperjuangkan kemerdekaan atau kedaulatan sebuah negara yang diidamkan, PKI menajamkan pertentangan antara penjajah dan yang dijajah. Partai Sarekat Islam Indonesia muncul dengan gagasan Negara Islam.

Sebab itu nasionalisme Indonesia sejak 1920-an itu dengan sangat gencar dan keras menentang penjajahan. Tetapi sementara itu suara-suara yang moderat juga tetap ada. Maka muncullah perbedaan antara pihak-pihak non-kooperator (menentang Belanda) dan pihak-pihak kooperator (menerima Belanda).

Dalam masa pendudukan tentara Jepang (1942-1945) pihak Jepang mempropagandakan ancaman dari Barat terhadap Indonesia. Maka dalam keadaan itu nasionalisme tetap berwajah keras melalui suara-suara anti-Barat itu. Bagi Jepang nasionalisme yang anti Barat itu menguntungkan mereka karena rakyat seolah-olah menjadi memihak pada Jepang yang anti-Barat. Pada pihak lain, bagi para pemimpin pergerakan, nasionalisme anti-Barat itu berguna untuk mempertahankan cita-cita kemerdekaan.

### **Nasionalisme dalam masa Revolusi dan sesudahnya**

Nasionalisme yang panas dan anti Barat dari masa Jepang itu tetap berlanjut dalam tahun-tahun berikutnya. Sejak kemerdekaan diproklamasikan (17 Agustus 1945), situasi politik intern Hindia Belanda dan politik internasional dinilai membahayakan kedaulatan negara muda itu. Sebab itu dalam masa Revolusi (1945-1949) nasionalisme Indonesia masih tetap dikobarkan dalam nada yang keras untuk membela kedaulatan Republik Indonesia.

Untuk beberapa tahun setelah Revolusi, di Indonesia diterapkan demokrasi parlementer (1950-1959). Dalam masa itu nasionalisme beralih menjadi lembut dan memihak pada rakyat. Dalam keadaan itu, rakyat mendapat kesempatan yang luas untuk memperjuangkan hak-

hak kewarganegaraannya.

Namun keadaan cepat berubah menjadi kacau karena pemberontakan-pemberontakan daerah bermunculan, seperti RMS, PRRI/Permesta dan lain sebagainya. Dalam peristiwa-peristiwa itu kita bisa menyaksikan munculnya nasionalisme kesukuan. Selain itu, konflik antar-partai sangat tajam. Bahkan di beberapa tempat muncul pemberontakan yang berlandaskan ideologi seperti DI/TII. Upaya mencari solusi melalui penyusunan UUD baru oleh Dewan Konstituante ternyata gagal sehingga keadaan yang penuh konflik di dalam negeri itu tidak kunjung mereda. Elite politik melihat kekacauan itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, sehingga nasionalisme yang dikorbankan untuk membela kedaulatan negara memperlihatkan wajahnya yang keras dan menantang.

Dalam tahun 1959 UUD 45 yang negara sentris dari masa pendudukan Jepang itu diberlakukan lagi. Ancaman pada kedaulatan negara tetap menjadi isu utama dalam politik. Elite politik Indonesia ketika itu melihat bahwa ancaman atas kedaulatan negara datang tidak saja dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri karena suasana perang dingin. Manifestasi dari keadaan itu adalah perjuangan mengembalikan Irian Barat (trikora) dan perjuangan melawan proyek "Noe-kolonialisme" (Dwikora). Keadaan itu berlangsung terus dalam masa Orde Baru (1968-1997) sekalipun tanpa politik konfrontasi.

## **KESIMPULAN**

Warna dan intensitas nasionalisme tidak selalu konstan. Dalam situasi dimana kedaulatan negara terancam, maka nasionalisme menjadi keras dan menantang untuk membela kedaulatan itu. Tetapi dimasa kedaulatan tidak terancam, maka nasionalisme menjadi lembut dan memungkinkan rakyat memperjuangkan hak-hak kewarganegaraannya.

Namun nasionalisme yang keras dan memihak pada kedaulatan atau negara bisa membawa dampak yang tidak diinginkan. Dalam keadaan seperti itu negara cenderung menjadi totaliter, seperti yang pernah kita alami dalam masa Demokrasi terpimpin dan masa Orde Baru.

NATION = komunitas yang mendiami sebuah wilayah dengan batas – batas yang pasti (borders);

NATION – STATE = perangkat pemerintah yang menjangkau wilayah dengan batas – batas yang pasti (borders), yang memonopoli kekerasan (senjata) dan memerintah berdasarkan undang – undang.

NASIONALISME = simbol – simbol dan emosi – emosi yang mengikat sebuah komunitas menjadi sebuah bangsa.

KEDAULATAN \_\_\_\_\_ NASIONALISME \_\_\_\_\_ RAKYAT

KEDAULATAN \_\_\_\_\_ NASIONALISME \_\_\_\_\_ RAKYAT

KEDAULATAN \_\_\_\_\_ NASIONALISME \_\_\_\_\_ RAKYAT

# KAUM ELIT DAN PERGERAKAN NASIONAL<sup>1</sup>

Restu Gunawan<sup>2</sup>

Sejak reformasi bergulir di negeri ini, pemberitaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peristiwa penting dan kadang-kadang menyebalkan terjadi. Mulai dari korupsi yang merambah berbagai elemen dari eksekutif, legislative, yudikatif maupun swasta, sampai masalah anggota DPR yang tertangkap basah asyik dengan alat komunikasinya menyaksikan tayangan porno, bahkan berita tentang Kongres PSSI tanggal 20 Mei 2011 yang mengalami kegagalan. Lalu mengapa kita sebagai bangsa yang katanya santun dan ramah ini, suka memaksakan kehendak, korup, tidak toleran dan sebagainya? Dimanakah kesalahan kita sebagai bangsa yang besar ini? Ketika pertanyaan ini diajukan maka berbagai jawab pun muncul, yang katanya kita belum siap dengan demokrasi, pemimpin yang tidak tegas, sistem pendidikan yang amburadul dan lain sebagainya.

Untuk sekedar mencoba menganalisis hal tersebut maka kita bisa merujuk ke berbagai peristiwa pada masa lalu. Koesomo Oetoyo dalam *"Pewarta Prijaji"*, Agustus 1900 menunjukkan bahwa yang digolongkan sebagai priyayi adalah mereka yang bekerja sebagai juru tulis, guru, mandor, polisi opas dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Jika mengacu pada hal tersebut maka orang-orang yang tersangkut dalam kasus-kasus di atas adalah golongan priyayi bahkan priyayi kelas tinggi.

---

<sup>1</sup>Disampaikan dalam seminar Nasional di Museum Kebangkitan Nasional tanggal 8 Juni 2011.

<sup>2</sup>Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia, saat ini bekerja sebagai Kasubdit Peradaban Sejarah. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Kemenbudpar email. restu\_gunawan@yahoo.com.

<sup>3</sup>Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908 – 1918*, Jakarta Grafitipers, 1989, hal.31

Jika hal ini dikaitkan dengan konsep abangan, santri dan priyayi, mereka-mereka yang telah muncul sebagai 'priyayi baru' (elit modern) dalam masyarakat ini belum siap secara moral dan etika. Seseorang yang telah menjadi priyayi seharusnya mempunyai perilaku yang membedakan antara dirinya dengan wong cilik. Hal ini diperlihatkan secara jelas oleh Umar Khayam dalam novelnya Para Priyayi dimana ketika Jepang masuk, Sastrodarsono yang seorang Mantri Guru (priyayi rendah) mengundurkan diri karena tidak mau menghormati kepada Jepang. Tetapi dari karya Khayam ini juga bisa dilihat bahwa untuk menjadi seorang priyayi haruslah loyal kepada atasan, cenderung tidak kreatif, hidup harus dijalani saja seperti 'air', karena pangkat priyayi sudah di depan mata, jadi tidak perlu berbuat aneh-aneh seperti terlihat dari pesan Ngoro Seten kepada Sastrodarsono saat anaknya menerima jabatan pertamanya sebagai guru bantu ( priyayi rendah )

*"Kau tahu Le, ini langkah yang sangat penting dalam hidupmu. Kau mulai masuk dalam kalangan priyayi. Kau bukan petani lagi. Diingat-ingat itu, Le. Duniamu mulai sekarang akan lain. Tahulah membawa diri dalam dunia yang baru. Kalau kau hati-hati, jujur dan setia kepada atasan dan peraturan gubernemen pasti kau akan berhasil naik pangkat. Jalan menuju dunia priyayi sekarang ada di depanmu, Le" (Kayam 1992; 38).*

Secara umum penduduk Jawa dapat dibagi menjadi dua kelompok yang amat jelas bedanya. Bagian terbesar orang Jawa di jaman kolonial tinggal di pedesaan. Mereka adalah kaum tani, orang kecil (wong cilik). Di atas mereka menurut status sosialnya adalah priyayi.<sup>4</sup> Mereka ini dari dulu anggota kelas yang memerintah penduduk Jawa. Jurang yang memisahkan priyayi dan krama (orang biasa) sangat lebar. Seorang priyayi pangkat terendah pun dapat menjadi penguasa

---

<sup>4</sup>Perkataan priyayi berasal dari para yayi atau saudara sang raja. Istilah priyayi semula untuk menyebut cara hidup para pembesar dan pejabat kerajaan, tetapi selanjutnya mengandung arti susunan menyeluruh ikatan sikap dan moral yang dianut oleh hampir setiap orang Jawa apapun asal sosialnya. Lihat Geertz 1960: hal.227 -260.

di wilayahnya sendiri. Kalau ia lewat berjongkoklah para petani sambil menyembah, cara orang Jawa mengucapkan salam sebagai tanda tunduk dan hormat. Priyayi kelas bangsawan, hidup sebagai pemegang hak apanage di tanah-tanah kerajaan, dan memegang jabatan pemerintahan di kerajaan yang dipimpin oleh raja mereka atau bekerja di pemerintahan Hindia Belanda.

Setelah tahun 1900 dengan dimulainya politik etis yang menyangkut edukasi, migrasi dan transportasi, khususnya dalam bidang edukasi telah memunculkan fenomena baru yaitu munculnya priyayi baru (elit modern). Kebanyakan mereka adalah orang muda dari kalangan pangreh praja yang telah memanfaatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan barat lanjutan. Kaum muda ini sering tidak puas dengan sikap merendah para elit pemerintahan Jawa. Mereka tak ingin mengikuti jejak orang tuanya. Pendidikan menawarkan kepada mereka kemungkinan-kemungkinan baru, untuk menduduki bidang-bidang lain di pemerintahan. Jabatan-jabatan baru terbentang luas seperti sebagai juru tulis pada kantor pemerintahan, guru, pertanian, dokter pemerintahan, penterjemah, pengawas dinas irigasi dan sebagainya. Sebagian hidup mandiri dengan memilih jabatan yang mereka sebagai dokter praktek, guru sekolah swasta, pengacara atau wartawan.

Para priyayi baru, memperoleh pekerjaan dan status sosial berkat pendidikan yang dinikmati. Kelompok ini dibandingkan dengan priyayi pangreh praja lebih terbuka untuk semua kaum muda berbakat kelas bawah. Kelompok priyayi baru ini merupakan sumber utama nasionalisme. Sebagai sumber inspirasi bagi munculnya nasionalisme, para priyayi muncul di kota-kota dan bukan di gubug-gubug reot petani di desa-desa. Ini menunjukkan bahwa munculnya gagasan dan ide-ide itu dari kota-kota yang membawa perubahan besar bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya saja di Batavia, Surabaya, Medan. Bahkan di Sumatera Barat majalah "*Insulinde*" sejak terbit pertama 1901 dan terakhir 1904 tidak pernah lupa menyuarakan "kemajuan"

dan mengajak memasuki : “dunia maju”. Dalam suasana ini kampanye bagi pendidikan modern dilancarkan pula.<sup>5</sup>

Lewat pendidikan Barat kaum priyayi muda berkenalan dengan pikiran-pikiran Eropa tentang politik dan pemerintahan dengan cita-cita demokratis Revolusi Perancis. Khususnya priyayi baru yang merupakan kaum intelektual itu dapat menerima pikiran-pikiran demokrasi Barat dan budaya barat. Seperti juga Sosrodarsono (lihat Para priyayi) yang melihat anak-anaknya berubah . Ia ingat, setelah lama meninggalkan rumah, ia mencium tangan orang tuanya, tetapi tatkala anak-anaknya sendiri lama tidak mengunjungi orang tua, mereka memeluk dan menciumnya disertai cucuran air mata. Ini semua sangat disadari Sosrodarsono, karena anak-anaknya telah menamatkan HIS (*Hollands Inlandshe School*).

Disisi lain para priyayi baru, sebagian besar juga merasa tidak puas dengan kondisi yang dialaminya di bawah tekanan kolonialis Belanda karena begitu banyak peluang karier tetapi priyayi baru ini tidak bisa berperan serta dalam menentukan jalannya pemerintahan dan hanya bertindak sebagai pegawai kelas rendahan. Sebaliknya para priyayi ini juga tidak suka dengan tradisi Jawa yang feodal yang amat hierarkhis yang dipertahankan oleh priyayi golongan tua. Dari pemikiran ini ternyata pendidikan model barat telah menghasilkan generasi muda yang tegas, berdikari dan mandiri.

### **Dari Nasionalisme Lokal ke Nasionalisme Indonesia**

Profesi kedokteran pada awalnya hanya sekedar menerima kehormatan akademis yang tinggi dari orang-orang Belanda, status sosialnya di kalangan masyarakat masih sangat rendah. Priyayi Jawa terutama priyayi birokratis menerima pejabat-pejabat kesehatan dengan rasa permusuhan. Mereka kesal dengan kehadiran priyayi baru ini. Hal ini lebih merupakan ungkapan rasa iri teradap berbagai

---

<sup>5</sup>Kompas: 20 Mei 2011

fasilitas yang diterima mahasiswa kedokteran. Seorang mahasiswa kedokteran menerima 8 gulden sampai 20 gulden hampir dua kali lipat dari yang diterima seorang magang yang bekerja sebagai juru tulis. Hal ini berbeda pula dengan sekolah Kepala (OSVIA) dimana mahasiswa harus membayar uang sekolah mereka. Seorang lulusan sekolah dokter bergaji 75 – 150 gulden skala ini adalah sama seperti gaji asisten wedana yang sudah bekerja 16 tahun. Meskipun dengan gaji besar, karena kedudukan priyayi profesional ini kurang mendapat penghargaan seperti yang diceritakan Ahmad Djajadiningrat regent Serang mengungkapkan kenangannya betapa buruknya dokter-dokter Jawa diperlakukan dalam masyarakat. Para dokter diberlakukan seperti mantri irigasi atau mantri polisi. Ia juga mengakui betapa buruknya ia memperlakukan dokter yang datang ke rumahnya suatu malam untuk menolong dokter tidak lebih dari kedudukan seorang asisten wedana.

*Dokter itu kemudian memperingatkan Djajadiningrat secara sopan karena berperangi kasar dan menceritakan kepada regent itu suatu peristiwa ketika ia belajar di STOVIA betapa anak lelaki dari seorang regent terpaksa meminjam pakaian dari padanya, Supaya dapat pergi ke pesta dansa. Dokter itu kemudian melanjutkan ceritanya betapa putra regent itu sekarang telah menjadi anggota terkemuka dari suatu masyarakat dan mencapai kedudukan sebagai seorang regent, sementara dia sendiri yang sudah lama dinas dengan berat sebagai seorang dokter masih tetap berada dalam status sosial yang rendah sebagai seorang dokter, padahal orang yang dalam hidupnya berhutang budi kepadanya kini menjadi regent. Djajadiningrat setelah mendengar cerita itu sangat malu dan akhirnya minta maaf karena kekasarannya.<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup>Savitri prastiti Scherer, Keselarasan dan kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX; Jakarta: Sinar Harapan, 1985, hal. 50

Kemampuan intelektual dari hasil didikan model barat dan kondisi sosial budaya tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa dokter-dokter Jawa lebih berpikiran maju, seperti dialami pula oleh Ciptomangunkusumo dan Soetomo. Akibat pengalaman pahit yang dialami orang tuanya dan kecapan intelektual pada dirinya, memperkuat kepekaan mereka akan ketidakadilan di masyarakat. Akibatnya di lebih berperan penting dalam menyatakan pendapat-pendapatnya yang kuat mengenai keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa ketimbang priyayi-priyayi lain yang lebih senior maupun latar belakang keluarga yang berbeda.

Boedi Oetomo yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar STOVIA (Sekolah Kedokteran Pribumi), diantara pendirinya terdapat orang-orang yang terkenal; Raden Soetomo, Tjipto Mangunkusumo, Gunawan Mangunkusumo. Mereka ini didesak oleh dokter Jawa Wahidin Soedirohusodo yang telah melakukan penjelajahan berbagai kota di Jawa untuk membangkitkan bangsa Jawa. Budi utomo yang berarti 'etika yang lebih tinggi'. Ini tercermin juga dalam semboyan 'santoso waspodo nggajoeih oetomo' berarti kekuatan dan kecerdasan mencapai keutamaan. Lambang yang dirancang tahun 1917 terdiri dari huruf BO yang ditembus oleh anak panah bermakna wahyu Tuhan dan dikelilingi bulu yang menjadi lambang 'masa lalu', masa kini, dan masa depan, juga lambang perkembangan badaniah, rohaniah dan susila. Lambang itu bergantung pada pita panca warna yang menggambarkan keuletan (hitam, keberanian (merah), kekayaan material (kuning), kemkmuran (hijau) dan kesucian (putih). Para pelajar yang menjadi anggota BO ini tidak mengejar tujuan politik terbuka tetapi tujuan utamanya adalah kemajuan negeri dan bangsa Jawa, terutama lewat perluasan pendidikan barat.

Berdirinya Boedi Oetomo, maka menandai lahirnya organisasi pribumi pertama di Indonesia menurut model barat yaitu sebuah perhimpunan yang pengurusnya secara periodik diganti, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kegiatan,

mengadakan rapat-rapat dan kongres-kongres dan anggotanya memiliki hak suara. Semangat BO menjadi loyo ketika dalam kongresnya, para pemimpin BO diambil dari para ambtenaar. Seorang Bupati karanganyar Tirtokusomo berhasil mengambil alih ketua BO. Ketika BO jatuh ke tangan para priyayi dan pada saat ini pula para anak muda terpelajar yang mendirikan BO mulai tersingkir. Adalah dokter Cipto Mangunkusumo yang segera terlempar dari BO karena usulnya agar BO bergerak dalam politik pergerakan kebangsaan ditolak. Sejak itu BO membiarkannya dirinya berkecimpung dalam suasana nasionalisme kultural yang emansipatoris dan mencari landasan identitas diri pada keutuhan kultural. BO tampil sebagai penggerak Kongres Nasional Kebudayaan Jawa pada tahun 1920. Adalah di kalangan BO pula timbul gagasan untuk membentuk "ikatan cendekiawan Jawa" tetapi gagal. Nasionalisme kultural adalah bagian dalam usaha untuk menentukan identitas diri, ketika di satu pihak tarikan kolonial menjanjikan modernitas dan sekaligus penindasan kemerdekaan, dan pihak lain keprihatinan terhadap kebanggaan kultural etnis sendiri yang dipusakai dan yang kini harus bernegosiasi dengan berbagai komunitas etnis yang senasib.

BO sebagai salah satu hasil dari politik etis, telah memberikan pengertian bagi para priyayi baru yang ada di Hindia. Cipto sebagai generasi pertama yang dibuang ke negeri Belanda dan sebagai pendiri BO telah menjadi inspirator bagi para pemuda yang dibuang ke negeri Belanda. Maka tidak mengherankan jika konsep 'Indonesia' justru muncul di negeri Belanda. Di negeri asing, dingin, dan sering tidak menyenangkan ini, dimana orang kota maupun orang kampung melengos melihat orang kulit berwarna, para mahasiswaitu belajar menghargai persamaan: bahwa mereka berasal dari tanah jajahan tropis, bahwa mereka terjajah oleh bangsa asing dan bahwa mereka tidak memiliki hak-hak sosial maupun politik. Lebih dari itu tidak hanya dalam berpendapat tetapi juga di depan hukum belanda mereka semua sama adalah "inlander". Sebelum mereka tiba di Belanda, pendidikan di Hindia Belanda telah memberikan kerangka pengertian

yang sama bagi mereka. Di sekolah-sekolah kolonial di seluruh Hindia Belanda anak-anak muda pribumi menerima pendidikan yang baku; buku tata bahasa yang sama, cerita-cerita masa lalu Belanda dan sedikit cerita masa lalu Hindia sendiri. Para pemuda yang berbakat dari luar Jawa datang ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan dan di bangku sekolah kolonial mereka berkenalan dengan teman-teman yang sama sekali berlainan latar belakang budayanya. Jadi dapat dikatakan pada abad ke-20 di ruang-ruang kelas, ruang-ruang kuliah di Batavia dan kota-kota di Jawa semangat Indonesia telah tumbuh. Para pelajar pemuda itu telah terilhami oleh rekan-rekan seniornya di Negeri Belanda serta para bekas anggota perhimpunan-perhimpunan itu sendiri.

Selain itu sebagai contoh yang paling khas dari hasil BO adalah ketika di Jawa mengalami renaissance budaya, para priyayi yang mengagungkan budaya Jawa ini menyadari bahwa sedang terjadi krisis yang mendalam di tengah dunia Jawa sebagai akibat kemerosotan politik sehingga priyayi Jawa, keraton dan penghuninya berada di bawah kekuasaan Belanda. Keruntuhan budaya Jawa amat dirasakan menyakitkan terutama oleh para priyayi di daerah Surakarta dan Yogyakarta yang menjadi jantung budaya Jawa. Di dalam perhimpunan BO mereka melihat kemungkinan untuk merangsang hidupnya kembali budaya Jawa. Perjuangan itu mendapat angin segar ketika pengurus BO mempunyai hubungan dekat dengan kraton, seperti RMA Soejosoeparto, Pangeran Hadiwijoyo (putra Pakubuwono X), Radiman Wediodiningrat dan para penguasa di pura Mangkunegara. Pada masa ini karya sastra Jawa mengalami kemajuan yang pesat. Diantaranya ditandai dengan penggalian dan penterjemahan kitab Pararaton dan Negarakertagama. Akibat publikasi Pararaton dan Negarakertagama itu kaum priyayi memiliki kembali warisan sastra yang berabad-abad telah putus dari mereka. Dan yang lebih penting gambaran Jawa yang loyo tidak bergairah dengan segera dapat digantikan oleh gambaran Majapahit yang jaya dan perkasa. Gambaran itu dengan segera dikutip dalam tinjauan-tinjauan sejarah dan buku-buku pelajaran di sekolah-

sekolah kolonial. Ini sebagai pertanda bahwa BO telah memberikan suasana baru dan semangat baru bagi pendidikan.

Meskipun BO mengalami stagnasi dan lebih cenderung menjadi organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan, tetapi BO telah menjadi inspirator bagi munculnya organisasi-organisasi lain, selain faktor-faktor internasional turut berperan seperti Kebangkitan Asia yaitu gelombang antusiasme di dunia Asia bahwa Barat dapat dikalahkan dengan senjatanya sendiri. Inisiatif BO diikuti Indische Partij (berdiri 1912) suatu organisasi multietnik kaum Indo-Eropa dan pribumi radikal yang langsung menuntut Hindia merdeka. Indische Partij adalah perhimpunan modern pertama yang berbenturan dengan pemerintah. Tiga pemimpinnya yang terkemuka E.F.E Douwes Dekker (cucu kemenakan Multatuli), Soewardi Suryaningrat dan Tjipto Mangunkusumo (salah seorang pendiri BO), kemudian dibuang Belanda tahun 1913. Selain itu Sarekat Islam yang berdiri tahun 1912 untuk menentang dominasi pedagang Tionghoa di Solo, beberapa tahun kemudian para pemimpinnya merumuskan juga tujuan-tujuan politiknya. Tahun 1918 anggota SI kira-kira setengah juta orang. Dan setelah itu muncul berbagai macam organisasi politik yang ada di Hindia Belanda baik yang langsung menuntut Indonesia Merdeka maupun yang kooperatif dengan Belanda.

### **Kebangkitan Kebangsaan: Sebuah Refleksi**

Kondisi politik bangsa Indonesia seperti yang saya lukiskan dalam pendahuluan tulisan ini, bisa jadi itu merupakan bentuk kegagalan dalam pengelolaan pendidikan nasional masa lalu. Hasil dari sistem pendidikan dilakukan melalui suatu proses yang panjang. Ketika hari ini kita melakukan kesalahan dalam pengelolaan pendidikan maka hasil yang buruk akan terasa beberapa puluh tahun kemudian. Sebaliknya ketika hari ini kita berhasil merumuskan dan menjalankan sistem pendidikan yang baik maka hasilnya akan dapat diraih pada

masa-masa yang akan datang juga. Ketika politik etis disampaikan oleh Van Deventer pada tahun 1901 maka pada tahun 1908, hasil dari pendidikan itu telah dapat pula dirasakan. Hal ini ditandai dengan munculnya generasi-generasi baru yang terus menerus berkembang dan puncaknya adalah kongres pemuda 1928 dan kemerdekaan Indonesia.

Kini ketika pendidikan yang lebih menuntut para siswanya untuk mendapatkan nilai dan angka yang tinggi tanpa dibarengi suatu pendidikan budi pekerti dan nilai-nilai perjuangan bangsa, maka pada masa mendatang akan menghasilkan generasi-generasi baru yang pragmatis, instan dan konsumtif. Pendidikan saat ini belum dapat menghasilkan kelas elit modern yang mampu melakukan perubahan secara fundamental terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para kaum elit masih berketut pada perebutan posisi untuk melanggengkan kekuasaan ketimbang membangun masyarakat.

Soetomo seorang pendiri BO mengemukakan bahwa 'pendidikan yang baik akan mengajar para cendekiawan mengabdikan kepada negeri dan rakyatnya dengan teliti dan bersungguh-sungguh, mencitai tanah air mereka dan rela mengorbankan jiwa demi kepentingan bangsa'. Bahkan Soetomo juga mengecam HIS karena sebagai suatu lembaga pendidikan, ternyata lembaga ini menghambat dan tidak berguna karena hanya 27% dari lulusannya dapat meneruskan ke sekolah-sekolah menengah Belanda. Meskipun pernyataan Soetomo ini ditentang oleh sebagian lawan-lawannya seperti Sutan Takdir Alisyahbana, yang mengatakan bahwa pendidikan barat telah mempercepat proses kemajuan dengan pendidikan yang teratur, meskipun diakui juga bahwa lembaga pendidikan kolonial telah memberikan perbedaan-perbedaan masyarakat berdasarkan status sosialnya. Hal ini berbeda dengan pendidikan pesantren yang memandang semua siswa adalah sama, baik yang kaya maupun miskin mereka secara bersama-sama belajar di pesantren.

## Jumlah Orang Hindia Belanda yang Memperoleh Pendidikan Barat 1900 - 1928

No	Tahun	Jumlah rata-rata orang Indonesia belajar di sekolah dasar barat	Jumlah rata-rata orang Indonesia belajar di sekolah menengah barat (termasuk MULO)
1	1900 - 1904	2.987	25
2	1905 - 1909	5.175	45
3	1910 - 1914	23.910	135
4	1915 - 1919	33.516	675
5	1920 - 1924	51.308	2.602
6	1925	61.425	4.431
7	1926	64.425	4.799
8	1927	66.824	5.692
9	1928	74.697	6.468

Sumber: Kahin hal. 40

Peningkatan jumlah kaum terpelajar di Indonesia, pendidikan barat telah menjadi penyebab berkembangnya suatu kelompok elite modern Indonesia baru yang kepentingan-kepentingannya berbeda dari kepentingan pemerintah jajahan. Golongan-golongan baru ini terdiri dari kaum elite yang merasa telah dikecewakan dan diperkaya oleh gagasan-gagasan sosial politik modernis Islam tidak dapat diselaraskan dengan hubungan-hubungan sosial politik jajahan. Pada umumnya gagasan-gagasan sosial politik Barat sangat mengintensifkan nurani sosial yang luas dari orang Indonesia untuk menentang kepatuhan ekonomi dan politik serta penghisapan oleh Belanda. Dengan cara yang sama ini juga diterapkan kepada keinginan-keinginan mereka yang lebih subyektif dan bersifat pribadi agar diakui bermartabat dan sama derajatnya, sehingga membawa reaksi tidak bebas karena adanya perasaan rendah diri yang sedah berkembang dalam dirinya orang Indonesia akibat dominasi orang asing.

## Prosentase Pegawai Pamong Praja di HB Tahun 1938

No	Kebangsaan	Pegawai Rendah	Pegawai Rendah Menengah	Pegawai Menengah	Pegawai Tinggi
1	Eropa	0,6	33,3	57,6	92,2
2	Indonesia (Pribumi)	98,9	60,6	38,0	6,4
3.	Indonesia yang samakan	0,2	3,4	2,0	0,5
4	Cina	0,3	2,3	1,5	0,3
5	Cina yang dipersamakan	-	0,4	0,8	0,5

Sumber: Kahin, hal 45

Kesempatan kerja yang sangat sedikit dari pemerintah kolonial kaum terpelajar sangat membuat resah mereka. Mereka sebagian kecil diterima sebagai pegawai pemerintah dengan gaji yang sangat jauh dari gaji pegawai non pribumi. Sebanyak 25% lulusan sekolah Belanda tidak mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. Mereka hanya mendapatkan pekerjaan diperiferi kehidupan ekonomi. Kecuali sebagai guru di sekolah-sekolah swasta hampir tidak ada lowongan dalam masyarakat Indonesia. Besarnya jumlah sekolah liar Indonesia yang sangat nasionalis selama dua puluh tahun terakhir pemerintahan Belanda jelas bertalian dengan situasi ini. Munculnya sekolah-sekolah liar secara tidak disadari oleh Pemerintah kolonial merupakan tempat persemaian ide-ide baru dan munculnya generasi kaum terpelajar kelas menengah yang nantinya terus menyebarkan semangat nasionalisme. Dari sekolah-sekolah inilah muncul elite-elite terpelajar yang mempunyai gagasan kemajuan dan mempunyai hasrat untuk membangun kesadaran nasional.

Selain itu, sejumlah kecil mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi politis maupun ide-ide politis yang ditemui disana. Sesuatu yang sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia. Hal ini pula yang memberi kesadaran akan adanya sebuah perjuangan melawan penindasan. Hal ini pula dapat disadari mengapa cita-cita Indonesia merdeka justru muncul dari kalangan pemuda terpelajar di Belanda melalui Perhimpunan

Indonesia (*Indonesische Vereneging, 1924*).

Pada masa awal dasawarsa kedua abad 20 proses nation formation telah menjadi dinamika sosial politik yang kian penting dan mencapai puncak simboliknya pada 28 Oktober 1928. Hasrat kemajuan adalah landasan awal kehidupan social di perkotaan yang kian majemuk. Dalam situasi inilah keinginan membentuk bangsa yang trans-etnis tumbuh dan mencapai puncaknya pada hasrat membentuk negara bangsa yang modern dan maju pada 17 Agustus 1945.

Jika mencermati perkembangan pendidikan dewasa ini, jika tahu 1908 dengan ditandai munculnya BO telah melahirkan gagasan-gagasan baru dan munculnya priyayi-priyayi baru yang berwawasan luas dan membawa perubahan dengan adanya organisasi yang teratur, maka kini setelah 103 tahun kebangkitan nasional ditandai dengan adanya peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20% mampukah memunculkan generasi-generasi yang berwawasan dan mempunyai karakter, seperti Soetomo, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat seorang tokoh pendidikan Indonesia, Soekarno, Hatta dan lain sebagainya. Ataukah dengan dana sebesar itu hanya membut gagap bagi para pengelolanya, sehingga bukan generasi yang berwawasan dan berkarakter yang kita hasilkan tetapi justru memunculkan modus-modus baru dalam korupsi bagi para pengelolanya. Niat baik untuk menaikkan anggaran tanpa dibarengi sebuah sistem dan perencanaan yang sistematis tentu tidak akan menghasilkan generasi yang maju tetapi justru menghasilkan generasi penyusu dan peminta-minta. Semoga itu tidak terjadi, dan menjadi renungan untuk melakukan refleksi bersama untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa!

Jika saja kebangkitan nasional bermakna penyegaran kembali semangat nasionalisme Indonesia, maka ini artinya tak lain dari pada keharusan untuk melanjutkan cita-cita yang telah dirumuskan oleh Pembukaan UUD 1945 dan terutama mengisi hal-hal masih tertinggal. Maka kedaulatan rakyat dan kemanusiaan, yang lebih populer dianggap

sebagai demokratisasi dan peneguhan ketetapan hati pada pelaksanaan hak asasi manusia akan tampil sebagai program utama. Kedua hal ini adalah panggilan yang otentik dari sejarah perjuangan bangsa bukan infiltrasi ideologis dari segala unsur yang telah didiskreditkan.

Ketika kebangkitan nasional telah dikumandangkan maka keharusan akan perubahan sebenarnya telah disuarakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah keharusan yang tak terelakkan dari dinamika itu. Jadi dalam kaitannya dengan kebangkitan nasional ini keberpihakan kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan di bangku-bangku sekolah merupakan keharusan zaman yang mesti dilakukan oleh semua elemen masyarakat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana kita cita-citakan bersama.

Kini jika ada keluhan bahwa nasionalisme telah jauh memudar bukan tanpa alasan. Sekian banyak peristiwa yang ada di tanah air menunjukkan betapa perlu perenungan baru tentang eksistensi bangsa. Setelah kita berhasil mewujudkan kemerdekaan sebagai 'jembatan emas' menuju masyarakat yang adil dan makmur, ternyata muncul berbagai corak kegalauan baru, sedangkan tantangan ke depan semakin kompleks. Untuk itulah nasionalisme tidak bisa berhenti pada kesadaran. Sehingga kesadaran nasionalis harus terpancar pula pada pola perilaku dan terwujud dalam struktur pengelolaan sosial politik yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, itu menjadi tugas kita semua untuk mewujudkannya.

## Daftar Pustaka

George Mc Turman Kahin; nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Hans van Miert; Dengan Semangat Berkorban: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia 1918-1930; Jakarta: Hasta Mitra, 2003.

Sartono kartodirdjo; Sejak Indische Sampai Indonesia; jakarta: Kompas, 2005.

Savitri Prastiti Scherer; Keselarasan dan Kejanggalan: pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX; Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Taufik Abdullah; Nasionalisme dan sejarah; Bandung: Satya Historika, 2001.

Taufik Abdullah dalam Kompas 20 Mei 2011.

Umar kayam; Para priyayi: Sebuah Novel; Jakarta, Grafitipers, 1992.

## MEMAKNAI PERINGATAN KEBANGKITAN NASIONAL DALAM KERANGKA KEINDONESIAAN

Susanto Zuhdi<sup>1</sup>

“Kebangkitan Nasional” adalah sebuah interpretasi terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1908. Ia diperingati untuk pertama kali pada tahun 1930 dan pada tahun 1948. Setelah itu baru lah diperingati secara berlanjut. Semangat “kebangkitan nasional” digaungkan yang keduanya itu, ketika bangsa ini menghadapi kembalinya penjajahan Belanda. Pada peringatan ke “40 tahun” di tahun 1948, adalah masa ketika rakyat Indonesia sedang berperang mempertahankan kedaulatan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Peringatan tersebut memiliki nilai penting justru karena kondisi bangsa dan negara yang sedang terancam hancur. Ibukota RI ketika itu di Yogyakarta dengan wilayahnya di Jawa minus Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur saja. Fakta histories itu adalah sebagai hasil perundingan Renville yang mengakibatkan wilayah RI semakin menyempit.

Bagaimana dengan peringatan kali ini? Kita dihadapkan pada permasalahan bangsa yang dihadapang oleh ancaman disintegrasi bangsa dan keutuhan wilayah NKRI, serta keterpurukan social-ekonomi yang berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada dua aspek penting yang dapat ditarik dari peringatan ini: kepemimpinan dan pendidikan. Keduanya merupakan modal yang kita perlukan untuk membangun bangsa dan negara.

Pemimpin yang diperlukan bangsa ini adalah yang berkemampuan visioner. Ini dapat dilihat dari apa yang telah diberikan dr. Wahidin Sudirohusodo. Konsep dr. Wahidin untuk mengatasi kondisi

<sup>1</sup>Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dosen Departemen Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

bangsanya yang ketika itu terbelakang hampir dalam semua bidang kehidupan harus dengan pendidikan. Itulah sebabnya ia rela berjalan jauh “hanya” untuk mencari dana beasiswa bagi pemuda pribumi agar dapat bersekolah (tinggi). Perjuangan terdahulu yang bersifat kedaerahan tidak lagi mampu menghadapi kolonial Belanda. Strategi perjuangan perlu diubah. Pendidikan menjadi modal perjuangan bangsa yang masih relevan hingga kini. Perjuangan kini yang dimaksud adalah untuk mengisi kemerdekaan yang telah dicapai. Akan tetapi problematik keterbelakangan pada masyarakat kita kini pun masih terjadi.

### **Pemimpin Bangsa yang visioner adalah yang mampu “Membaca Sejarah”**

Disini diajukan dua modal kepemimpinan, pertama yang berasal dari masa abad ke-19, ketika perlawanan terhadap Belanda masih secara kedaerahan, yakni Sultan Thaha dari Jambi. Dan model angkatan pergerakan nasional seperti terlihat pada Sukarno, Hatta, Sam Ratulangi untuk menyebut beberapa nama saja.

Dalam situasi ketika kita sulit mendapatkan pemimpin sejati Sultan Thaha Saifuddin dari Jambi merupakan sedikit contoh yang dapat disebut. Ia berjuang melawan kolonialisme Belanda antara tahun 1855 hingga gugurnya tahun 1904. Yang kita miliki kini adalah para elite politik. Kedua pengertian itu memang sosiologis karena selalu ada dalam suatu masyarakat. Tetapi kedua pengertian itu berbeda. Hubungan elite dan masa tidak seerat antara pemimpin dan yang dipimpin. Hubungan yang disebut terakhir adalah bersifat emosional karena memiliki sentuhan kepercayaan (trust) dan kesetiaan (loyalty) dari yang dipimpin kepada sang pemimpin. Apalagi karena pemimpin adalah orang yang karismatis. Kawula kesultanan Jambi sangat percaya dan bersedia kepada Sultannya, Thaha Saifuddin.

Selain pemberani ia juga seorang pemimpin yang cakap. Adalah

tidak berlebihan jika identitas keberaniannya dengan nama “Saifuddin” yang artinya “Pedang(nya) Agama”. Gelar itu diperoleh Thaha dari Aceh, setelah menimba ilmu disana. Kelebihannya sebagai seorang pemimpin yang cakap bahwa Sultan Thaha memiliki kemampuan membaca sejarah. Ada tiga perspektif sejarah yang ia lihat dan amati dalam mencermati kondisi zaman yang dihadapinya. Pertama, ia melihat masa ketika ia berada dalam situasi kacau, karena pengaruh Belanda semakin kuat. Kedua, masa lampau Jambi sebagai yang pernah jaya dan gemilang. Sedangkan pespektif ketiga, ia memandang masa depan sebagai harapan. Justru karena itulah ia dengan tekad dan keyakinan yang kuat berani melawan penjajah. Dengan demikian, Thaha adalah sultan yang memiliki kriteria seorang pemimpin yang nyaris sempurna.

Ia adalah seorang pemimpin yang visioner menatap kedepan karena ia mampu membaca sejarah. Tindakan untuk mendatangkan guru-guru dari Mesir dan Turki, serta dari ranah Minang, agar kawulanya bertambah , menunjukkan sikap keterbukaan dengan dunia luar. Ini dalam istilah sekarang adalah “globalisasi”, gabungan antara berwawasan “global” dan bertindak “local” (“think globally, act locally”). Visioner juga berarti kemampuan membawa rakyatnya memahami tujuan yang hendak dicapai, meskipun dengan pengorbanan sekalipun. Apakah karena ia seorang sultan sehingga begitu saja rakyatnya menuruti titahnya. Unsur itu memang ada tetapi yang penting lagi adalah kemampuan membaca “sejarah’ yang telah disebut diatas.

Angkatan Sukarno, Hatta, Ratulangi adalah sosok yang “membaca sejarah” (bukanmenghapal!) sebagai modal strategi perjuangannya. Dalam pidato “Pembelaan “nya di depan pengadilan Belanda di Bandung 1930, Sukarno melihat 3 perspektif : Masa lampau yang pernah gemilang, masa kini yang suram (hidup dalam penjajahan) dan masa depan yang penuh harapan (“kemerdekaan sebagai jembatan emas”). Kemampuan mereka “membaca sejarah” menghasilkan

proyeksi dan perkiraan kedepan yang jitu. Doktor Sam Ratulangi pada tahun 1930 telah menulis buku tentang “PerangPasifik”. Itu artinya 12 tahun sebelum tentara Jepang memasuki negeri Indonesia. Bahwa itulah masa berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Mereka mengantisipasi periode ke depan dengan upaya perjuangan bangsanya guna menyongsong masa itu dengan berbagai strategi perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Sejarah bangsa ini memang dibentuk dari daerah. Akan tetapi bukan sifat “kedaerahan” seperti yang dimunculkan sekarang ini meski atas nama pelaksanaan Otonomi Daerah. Memang tidak semua peristiwa local bermakna nasional, tetapi pada suatu daerah terdapat sejumlah fakta yang pada hakikatnya merupakan simpul keindonesiaan. Ketika kita membaca adanya fakta pembuangan Sultan Jambi, Seri Ingalogoke Banda pada tahun 1690, maka proses yang merajut bagian - bagian yang kelak “menjadi Indonesia” sudah berlangsung. Pembuangan itu karena Sultan dituduh terlibat dalam pembunuhan Kepala Kantor Kumpeni di Muara Kumpeh. Dilihat dari tahunnya, barangkali Sultan Jambi inilah yang pertama diasingkan ke Banda. Sebab baru kemudian yakni pada tahun 1820 menyusul pembuangan pejuang dari Palembang, kemudian pada akhir abad ke-19 bekas “pemberontak” petani dari Cilegon Banten dibuang ke Banda (Neira) pada tahun 1888, dan pejuang dari Aceh pada tahun 1898. Dalam abad ke-19 pula dibuang ke Banda bekas “Pemberontak” dari Tondano Sulawesi Utara. Lebih lanjut pembuangan yang alami tokoh pergerakan nasional ke Banda Neira antara lain: drs.Hatta, Syahrir, dokter Ciptomangunkusumo, Mr. Iwa Kusumasumantri terjadi pada tahun 1930-an.

### **Bangsa Yang Kerdil dan Lemah Ingatan?**

Menurut hemat saya ungkapan “bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya” sudah harus diganti dengan

**“hanya bangsa yang menghargai pahlawannya yang patut menjadi bangsa yang besar”**. Mengapa saya ajukan yang kedua karena alasan acuannya jelas. Yang mengatakan itu adalah Thomas Carlyle sejarawan terkemuka dari Skotlandia (1795-1881). Ungkapan pertama tidak jelas acuannya. Lebih dari itu ungkapan itu menunjukkan logika terbaik. Semestinya ada upaya terlebih dahulu dan memperlihatkan pencapaian tertentu baru suatu bangsa boleh menyatakan dirinya sebagai bangsa yang besar. Sebab persoalannya akan menjadi ejekan pada bangsa itu jika dalam kenyataannya tidak menghargai pahlawannya. Itu artinya mereka adalah “bangsa yang kerdil”. Jadi lebih dahulu kita menghargai pahlawan, barulah kita (dapat) menjadi bangsa yang besar. Menghargai pahlawan adalah dengan jalan meneladani apa yang telah diperbuatnya bagi bangsa. Artinya bagaimana kita sekarang mau dan mampu mewujudkan cita-cita mereka.

Sebagai bangsa yang kemerdekaannya melalui perjuangan hebat, tentulah bangsa ini memiliki sejumlah pejuang dan pahlawan. Tidak terhitung berapa banyak jasad mereka terbaring di persada Nusantara. Selain meninggalkan “nama harum” dan jika masih terpelihara maka para pejuang/pahlawan dapat diziarahi. Bukti-bukti peninggalan lainnya bisa berupa bangunan/markas perjuangan/tempat pengasingan. Karena situs-situs sejarah itu bernilai sejarah maka dapat kita maknai sebagai “simpul-simpul” yang dapat merekatkan bangsa. Bukankah pandangan ini perlu diangkat sebagai upaya mengatasi ancaman disintegratif.

Akan tetapi dalam kenyataan, tidak sedikit berita mengenai terbelahnya peninggalan sejarah di berbagai daerah di republik kita. Banyak faktor mengapa seolah kita tak peduli dengan urusan yang bersifat historis. Ironisnya justru kita sering hanya membanggakan inilah bangsa memiliki kebudayaan tinggi dan bangsa yang penuh perjuangan dalam merebut kemerdekaannya. Itu memang benar. Tetapi orang akan bertanya mana buktinya? Dan kalau kita tidak bisa melestarikan bukti-bukti itu, akankah kita bisa mengatakan bahwa

bangsa ini memiliki sejarah dan kebudayaan yang luhur itu?.

Berbagai peristiwa konflik sosial yang menimbulkan banyak korban fisik dan non fisik yang mengancam disintegrasi bangsa dan negara kesatuan merupakan bukti kita bangsa pelupa. Sumpah pemuda, Proklamasi kemerdekaan, bahkan peristiwa sekitar munculnya reformasi yang baru lalu, tidak menjadikan bangsa ini sadar sejarah. Peringatan “Sumpah Pemuda” semestinya memberi motivasi kepada generasi muda, juga yang tua untuk memegang teguh pada komitmen persatuan. Jadi bukan konflik dan tawuran yang semestinya diperlihatkan tetapi sinergi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Dengan persatuan memang merupakan wahana kita mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dugaan kuat sebagai bangsa mengalami amnesia sejarah, tidak sulit dibuktikan. Kita mengira dan tentu juga berharap, rangkaian peristiwa konflik dan “perang” di Ambon yang terjadi antara 1999-2001 tidak terulang kembali. Tapi apa mau dikata, ternyata meletuslah peristiwa pada 25 April yang lalu.

### **Catatan Penutup**

Pembelajaran sejarah yang dirasakan membosankan ditambah dengan tantangan semakin kecilnya jumlah jam pelajaran di kelas. Pembelajaran sejarah perlu dilakukan dengan berbagai bentuk dan metode. Oleh sebab itu pelajaran sejarah di luar kelas perlu diintensifkan.

Program kegiatan “Lawatan Sejarah” dilaksanakan sejak tahun 2002 di tingkat daerah oleh BKSNT di seluruh Indonesia dan tingkat nasional yang dilaksanakan Asisten Deputi Sejarah Nasional Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sejarah dalam upaya pembentukan semangat dan karakter bangsa (national and character building)

guna memperkokoh integrasi bangsa. Kegiatan Lawatan Sejarah adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang merupakan simpul-simpul orientasi pada nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan. Mengunjungi tempat-tempat pengasingan dan pembuangan para tokoh dan pejuang bangsa (ada yang hingga wafat dan dimakamkan di tempat itu) bukan saja kita melakukan rekreasi sekaligus bermuatan edukasi, melainkan juga terselip guna dari belajar sejarah yang lain yakni inspiratif. Sejauh mana kita dapat memperoleh inspirasi dari belajar sejarah adalah pertanyaan yang kita jawab.

Apa yang dilakukan Hatta sebelum dibawa ke Boven Digul pada tahun 1934 suatu hal menarik dicermati. Ia minta izin kepada pemerintah kolonial di Batavia 3 hari untuk mengemas belasan peti yang diisi buku yang akan menemaninya di tanah “pembuangan”. Di Boven Digul inilah Hatta menyelesaikan naskah tulisannya yang kemudian diterbitkan berjudul “Filsafat Alam Yunani”. Juga menarik apa yang dilakukan Sukarno ketika baru tiba di Ende pada tahun 1934. Setibanya di tempat pengasingannya itu, Sukarno segera sibuk membongkar sejumlah kotak berisi buku. Tidak kurang juga Syahrir dan sejumlah nama-nama tokoh pergerakan lainnya adalah contoh bagus buat kita yakni membaca dan lagi-lagi mereka gemar membaca. Pemimpin yang arif karena ia belajar. Dan akan berhenti sebagai pemimpin manakala mereka berhenti belajar.

Kalau demikian maka makna “Kebangkitan Nasional” adalah untuk meneguhkan kembali komitmen kita untuk membangun bangsa dengan “membaca sejarah”.

## **“HARI KEBANGKITAN NASIONAL” PESAN SEJARAH DAN HARAPAN MITOS**

**Taufik Abdullah**

Lahirnya sebuah organisasi modern

Pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif Sutomo, para pelajar STOVIA di Batavia mendirikan organisasi dengan nama yang konon secara kebetulan terucapkan oleh salah seorang mereka ketika sedang mereka-rekakan idealisme yang ingin dikembangkan. Nama yang dipilih bagi organisasi itu ialah Budi Utomo. Memang nama organisasi memakai bahasa Jawa sebab para pelajar yang terlibat di dalam kepeloporan ini terdiri para pelajar STOVIA yang berasal dari daerah kebudayaan Jawa. Dengan didirikannya organisasi ini maka nama dokter Wahidin Sudirohusodo, seorang pensiunan “dokter Jawa”, pun abadi dalam catatan sejarah, sebab ialah yang dianggap sebagai pelopor sesungguhnya dari Budi Utomo. Meskipun kalau kisah sejarah bisa diikuti juga anak-anak STOVIA ini bisa juga bergaul dengan Douwes Dekker, yang kemudian dikenal dengan nama Dr. Setiabudhi, pelopor nasionalisme Indonesia golongan Indo, juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh ini. Tetapi secara langsung atas pengaruh Wahidin-lah Sutomo dan kawan-kawanya mendirikan organisasi ini.

Baik melalui tulisan maupun lisan Wahidin mengkampanyekan betapa perlunya sebuah organisasi yang sebagaimana dikatakannya telah dianjurkan oleh Dr. Abdul Rivai.<sup>1</sup> Memang dalam tulisannya di Bintang Hindia, yang terbit di negeri Belanda dokter Rivai, yang tengah belajar untuk mendapatkan gelar *Europesche Arts*, artinya dokter yang diperbolehkan mengobati orang Eropa, menganjurkan agar didirikan di semua kota suatu organisasi yang disebutnya “Perkumpulan kaum

---

<sup>1</sup>Nagazumi Akira, *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*, Tokyo: Institute of Developing Economies, 1972. 30-31

muda”.<sup>2</sup>

“Sekali berarti sudah itu mati”, begitu sebaris sajak Chairil Anwar tentang kepahlawanan. Demikian pulalah nasib yang tampaknya menimpa Wahidin. Meskipun tetap aktif tetapi peranan sentra meninggalkannya setelah kongres pertama Budi Utomo pertama, Oktober, 1908, berakhir. Dalam kongres itu ia hanya tampil dominan di hari pertama saja. Perhatian para peserta, yang sebagian besar terdiri atas para priyayi birokrat ternyata telah melampaui apa yang menjadi pikirannya. Ia masih berpikir tentang perlunya program beasiswa bagi para pelajar Jawa, sedangkan para peserta lebih banyak berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sejak kongres itu Budi Utomo terlepas pula dari idealisme para remaja, yang pernah disebut Wahidin, Sebagai “kaum muda” dalam arti kaum progresif. Budi Utomo mulai menampilkan diri sebagai organisasi para priyayi birokrat yang berniat memajukan “bangsa Jawa” sesuai dengan ajaran tradisi, warisan mulai dari para leluhur. Maka bisalah dipahami juga kalau Budi Utomo bersifat elitis juga—“ketika kaum elite Jawa telah terpelajar”, kata statement-nya,” rakyat biasa akan mengikuti saja”. Alam pikiran seperti inilah yang kemudian sangat nyaring bersuara dalam Kongres Nasionalisme Jawa di tahun 1918.<sup>3</sup>

Sejak kongres pertama di bulan Oktober 1908 itu Budi Utomo tampil sebagai organisasi yang bertolak dari sikap politik yang “ko-operator. Sikap ini semakin kental setelah pemerintah kolonial mendirikan Volksraad (1918). Meskipun November beloofte yang diucapkan gubernur jenderal tentang masa depan yang lebih

---

<sup>2</sup>Ahmat B.Adam , *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness (1855-1913)*. Ithaca, New York, Cornell University : Southeast Asia Program, 1995, 101-107.

<sup>3</sup>Lihat Hans van Miert, *Dengan Semangat Berkobar: Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*, Jakarta: KITLV Jakarta, Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, 2003, 118 dst: Lihat juga Takashi Shiraishi, “The Disputes between Tjipto Mangunkusumo and Soetatmo Soerioloesoemo: Satria vs Pandita”, *Indonesia*, 32 (October) 93-108.

demokratis bagi “tanah Hindia” hanyalah janji kosong belaka, Budi Utomo lebih suka bermain dalam lembaga-lembaga “perwakilan” yang didirikan pemerintah Hindia Belanda, mulai dari Volksraad sampai dewan-dewan daerah dan kota. Tetapi memang pilihan lain tidak ada pula. Bukankah sekarang Budi Utomo adalah salah satu organisasi para priyayi birokrat?.

Tetapi sejalan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia Budi Utomo terkena imbasnya. Maka pada tahun 1935, Budi Utomo bersama partai-kooperator yang bercorak kedaerahan lain, seperti Kaum Betawi dan Sarekat Sumatra dan partai yang didirikan dr. Sutomo, Persatuan Bangsa Indonesia, bergabung dan membentuk partai baru, Partai Indonesia Raya (Parindra). Bagi Dr. Sutomo berdirinya Parindra mungkin merupakan pemenuhan impian lama yang sempat tak terkabul setelah Budi Utomo dikuasai para priyayi birokrat. Setelah kongres pertama itu dirinya dan cita-citanya tidak lagi mendapat tempat dalam organisasi yang didirikannya dan ia kemudian harus mencari jalan lain-keluar dari Budi Utomo. Dalam Parindra, Sutomo, yang telah mendirikan Persatoean Bangsa Indonesia, bukan saja menemukan kembali wadah awal dari idealisme kebangsaannya, tetapi juga kebanggaan karena mewujudkan sebuah partai yang sadar bertolak dari pematangan kesadaran daerah menjadi kebangsaan yang trans-etnis. Dalam orientasi politik Parindra tetap berpegangan pada garis ko-operator. Sejak tahun 1933 setelah Sukarno dan Hatta serta Sjahrir dan lain-lain diasingkan ke tanah pembuangan ko-operasi adalah orientasi politik satu-satunya yang masih mungkin dilakukan. Pemerintah kolonial telah semakin kental dalam menjalankan politik *rust en orde*

## **Sejarah dan mitos**

Empat puluh tahun setelah kelahiran Budi Utomo, yang biasa disebut dalam catatan sejarah sebagai organisasi modern pribumi

yang pertama, diperingati dan dirayakan sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”. Presiden Sukarno, wakil Presiden Hatta dan para pemimpin Republik Indonesia beserta rakyat dengan enthusias merayakan hari yang telah diberi makna baru ini. Konon kabarnya Bung Hatta agak ragu juga, ketika Ki Hadjar Dewantara, yang dihormati para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia, yang berpusat di Yogyakarta, mengusulkan agar kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai hari nasional. Apakah tanggal kelahiran ini akan menyaingi Hari Proklamasi? Tetapi ia diyakinkan bahwa sebuah bangsa memerlukan lebih dari satu hari : keramat”<sup>4</sup>. Apalagi bukankah Budi Utomo akhirnya menjadi Partai Indonesia Raya? Daerah-daerah lain, yang masih berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia, baik di Jawa maupun di Sumatera, juga merayakan “Hari Kebangkitan Nasional” ini. Jadi dengan merayakan peristiwa di tahun 1908 para pemimpin revolusi sebenarnya ingin mengatakan bahwa perjuangan bangsa telah berlangsung lama karena itu hanya satu kemungkinan yang mungkin dihadapi, yaitu kemerdekaan bangsa harus tercapai. Bukankah 40 tahun adalah rentangan waktu yang panjang? Jadi dengan sikap *enough is enough* – kalau ungkapan orang sana boleh dipakai-perjuangan harus dijalankan sampai ketentuan akhir dicapai. Apalagi pada waktu itu perpecahan internal di kalangan pendukung Republik Indonesia telah semakin tampak pula. Perjanjian Renville dengan Belanda semakin membuka lebar konflik internal Republik. Mudah-mudahan dengan merayakan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional harapan pun disemaikan juga-semoga peringatan dan perayaan ini bisa juga memperkecil bahaya perpecahan sesama pendukung Republik.

Sekian tahun kemudian ketika Orde Baru telah mulai merumuskan makna kehadirannya maka tanggal kelahiran Budi Utomo dijadikan sebagai tonggak pertama dalam proses pertumbuhan bangsa, *natio formation*.

---

<sup>4</sup>Kisah ini disampaikan secara lisan oleh Dr. Sri Margana, dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya, UGM, tgl 30 April, 2003

Peristiwa itu kemudian diikuti oleh Sumpah Pemuda (28 Oktober,1928) dan akhirnya Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus, 1945). Setiap tonggak sejarah ini didukung oleh angkatan yang dominan. Maka dalam proses pembentukan bangsa ini tampil ke depan secara bergantian Angkatan 08' Angkatan'28 dan Angkatan '45. Selanjutnya hanyalah Angkatan penerus saja.

Tetapi seandainya sejarah-sebagai rekonstruksi dari peristiwa yang terjadi di masa lalu-ingin dilihat kembali maka tampaklah sifat kesejarahan dari 20 Mei berbeda dengan “tanggal-tanggal keramat nasional” yang lain. Peristiwa “Sumpah Pemuda” ketika ikrar berbangsa dan bertanah air satu serta menjunjung bahasa persatuan Indonesia dipatrikan boleh dilihat sebagai puncak simbolik dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan yang mengikuti sesudahnya. “Sumpah Pemuda” adalah ekspresi dari pengakuan para tokoh angkatan muda akan keikutsertaan mereka dalam menjunjung cita-cita yang telah terlebih dahulu dipancarkan oleh Indonesische Vereeniging (1923) yang menjadi Perhimpunan Indonesia (1924), Perkumpulan mahasiswa pribumi Hindia Belanda di negeri Belanda, dan PKI (1923) dan PNI (1927). Semua organisasi ini telah menjadikan “Indonesia” sebagai nama dari komunitas-bangsa mengalami proses awal pembentukannya. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, yang diikrarkan pada penutupan Kongres Pemuda II, maka semua organisasi pemuda pelajar yang berdasarkan kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond (Pemuda Sumatra), Jong Celebes, Jong Ambon dan sebagainya, melebur diri ke dalam organisasi baru yang bernama, Indonesia Muda. Nanti, jika waktunya telah datang, banyak juga dari mereka terjun ke dalam pergerakan kemerdekaan bangsa. Maka merekapun terlibat pula dalam berbagai corak ideologi dan partai serta organisasi para perintis kemerdekaan sebelum akhirnya, ketika kesempatan itu datang, Proklamasi kemerdekaan pun diumumkan. seketika kata-kata “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” telah diucapkan , pintu gerbang revolusi nasional pun terbuka lebar. Sekian tahun bangsa mengalami peristiwa

yang mendebarkan. Hari-hari tanpa kepastianpun harus dilalui dengan darah, air mata dan doa sampai akhirnya kedaulatan negara-bangsa tercapai.

Tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari kelahiran Budi Utomo seakan-akan sebuah titik yang terputus dengan dinamika sosial yang terjadi sesudahnya. Idealisme kerakyatan yang melatar belakangi kelahiran organisasi ini berubah wajah menjadi sikap paternalistik yang ingin membina masyarakat dengan menjauhi segala kemungkinan konflik kolonial. Bolehlah dikatakan bahwa kontinuitas historis dari idealisme 20 Mei ditemukan di luar organisasi itu, setelah pantulan-pantulan idealisme yang tercecer diambil dan dikembangkan oleh Indische Partij dan Sarekat Islam. Setelah itu negeri inipun mengalami intensitas pergerakan nasionalisme yang bersifat trans-etnis dan anti-kolonial.

Jadi, terlepas dari kemungkinan perbedaan nilai yang diberikan pada ketiga peristiwa yang secara ideologis telah diperlakukan sebagai tahap-tahap dalam sejarah perjuangan ke arah tercapainya Indonesia Merdeka, ketiganya telah mengalami proses mitologisasi dalam pengetahuan sejarah dan kesadaran bangsa. Ketiganya tidak lagi hanya diperlakukan sebagai tanggal dari terjadinya suatu peristiwa tetapi sebagai wakil dari nilai yang ingin diperabadikan seakan-akan pada waktu itulah nilai luhur itu lahir dan matang. Dengan kata lain ketiganya memperlihatkan betapa peristiwa, sebagai sebuah realitas sejarah, dan nilai simbolik yang dikenakan padanya telah bercampur baur. Ketiganya membayangkan realitas itu harus dihayati dalam dunia nilai, telah bercampur. Hanya saja dalam percampuran sejarah dengan nilai simbolik atau corak dari mitologisasi sejarah ini terdapat juga perbedaan yang agak mendasar dari ketiga peristiwa itu.

“Sumpah Pemuda” dan “Hari Proklamasi” boleh dikatakan sebagai peristiwa sejarah yang menghasilkan mitos. Seketika peristiwa itu terjadi di waktu itu pula nilai mitologis telah terkena pada dirinya keduanya dengan begitu saja dijadikan sebagai “puncak” dari proses perjuangan yang telah lama dirintis dan sekaligus adalah pula awal

dari proses yang tidak mungkin surut kembali. Belajar dari ketidak hati-hatian pemberontakan PKI di Banten dan Silungkang (Sumatra Barat), Desember 1926 – Januari 1927, radikalisme politik kemerdekaan setelah sumpah pemuda lebih ditandai oleh pergumulan ideologis dan pemantapan tekad ke arah tercapainya kemerdekaan bangsa, suatu komunitas baru yang telah dibayangkan. Hal ini berlanjut sampai di suatu saat para pemimpin terkemuka ditangkap dan diasingkan dan politik kolonial yang konservatif dijalankan. Mereka yang tersingkir itu baru tampil lagi di tengah-tengah masyarakat setelah kejatuhan pemerintah kolonial Belanda di masa Perang Pasifik dan Indonesia mengalami masa pendudukan Jepang. Ketika akhirnya kesempatan itu terbuka maka sebuah klimax dalam sejarah dan perkembangan kesadaran pun terjadi Proklamasi Kemerdekaan. Berapa banyak korban harus jatuh dan kampung halaman yang hancur demi kemerdekaan bangsa? Sejarah sebagai realitas dan mitos sebagai nilai yang dikisahkan terbaaur menjadi suatu kesatuan dan ketika itu pula pensejarahan mitos the historization of the myths tercipta begitu saja. Realitas yang objektif dan sistem nilai yang diaktualkan dalam kisah sejarah telah terpadu dalam suatu kesatuan.

Tetapi 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional adalah hasil murni dari suatu renungan. Hal ini adalah sebuah construction, rekaan yang imajinatif, ketika pegangan baru ingin didapatkan. Dengan kata lain makna dan nilai dari hari itu dilekatkan setelah peristiwanya telah lama berlalu. Mudah-mudahan Levy-Strauss, sang tokoh antropologi strukturalis, tidak keberatan kalau dikatakan bahwa proses mitologisasi 20 Mei terjadi bukan karena ketidaktahuan akan jawab yang ingin didapatkan tetapi hasrat peneguhan sistem nilai yang telah dimiliki dengan pada jawab yang telah tersedia. Hari Kebangkitan Nasional adalah hasil mitologisasi ketika hasrat akan jawab terhadap keprihatinan hari kini ingin diteguhkan. Hanya saja setelah peringatan Hari Kebangkitan Nasional dilakukan berulang-ulang maka proses yang sama pun terjadi juga mitos telah mengalami historisasi. Nilai telah dianggap sebagai realitas sejarah.

Tetapi apakah pencampur-adukan sejarah dan mitos sesuatu yang salah? Mungkin demikianlah halnya jika semuanya harus dilihat dalam kaca mata sejarah sebagai usaha kritis-akademis untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu saja. Berbeda halnya kalau unsur-unsur dari dinamika sejarah merupakan hal yang ingin dipahami. Apakah yang mendorong orang merupakan sesuatu yang melampaui situasi kekinianya? Kalau pertanyaan ini juga menjadi perhatian maka kelihatanlah bahwa ternyata bahwa bukan pengetahuan “sejarah sebagai peristiwa di masa lalu” yang memainkan peran utama dalam dinamika sejarah, tetapi pemahaman subjektif jadi bertolak dari kesadaran nilai tertentu yang dilekatkan pada peristiwa sejarah itu. Peristiwa yang terjadi di masa lalu kalau terhadap peristiwa sejarah itu telah dikenakan nilai subjektif atau, mungkin juga, pemahaman yang bertolak dari peristiwa yang terjadi di masa lalu itu, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya proses mitologisasi. Maka yang tampil dalam kesadaran adalah mitos yang bertolak dari pengetahuan sejarah.

Mitos yang telah menjadikan peristiwa sejarah sebagai kendaraan bagi sistem nilai yang ingin dipelihara atau bahkan yang hendak dibuang, bukannya sejarah, yang tanpa nilai, yang tidak mempengaruhi pola perilaku. Janganlah heran kalau Bung Karno lebih sibuk dengan usaha menggali “apinya sejarah” daripada mencari ketepatan peristiwa sejarah. Karena itu apa yang disebut sebagai the debunking of the myth penghancuran mitos tidaklah harus selamanya berarti pengingkaran kebenaran historis yang dipancarkan mitos karena kebenaran sejarah telah didapatkan, tetapi bisa juga berarti pembatalan pesan yang ingin disampaikan mitos.

Kalau begitu bagaimanakah sebaiknya memahami makna 20 Mei dalam proses nation formation atau lebih penting bagi masa kini, nation building?

## **Makna 20 Mei 1908**

Bagaimanakah suasana sejarah harus digambarkan? Suasana tak ubahnya dengan sungai yang mengalir, tanpa pemberhentian. Begitu pulalah halnya dengan suasana sosial-kultural-tanpa tanggal pemberhentian. Tetapi jika suasana itu dirasakan sedemikian penting bagaimanakah intensitas ingatan akan bisa dikuatkan kalau yang harus diingat itu tidak mempunyai alat pengingat? Maka mestikah diherankan kalau suasana kemunduran Majapahit akhirnya diberi tanggal kejatuhannya dengan sistem candrasengkala, Sirna hilang kerta ning bhumi yang dalam angka tahun berart 1400 caka atau 1478 Masehi. Biarlah kemudian sejarawan sibuk mengatakan bahwa kejatuhan kerajaan besar itu barulah terjadi sekian puluh tahun kemudian. Tetapi dengan adanya penanggalan yang sekaligus bersifat simbolik itu suatu suasana kesenduan kultural bisa lebih intens dirasakan. Tetapi bagaimana halnya dengan 20 Mei 1908.?

Buku sejarah Indonesia biasa memulai uraian tentang abad 20 Hindia Belanda periode sebelum nama Indonesia dipakai dengan pidato Ratu Wilhelmina yang menjanjikan dimulainya politik etis kolonial. Dengan janji ini maka pendidikan, irigasi, dan kolonisasi digerakkan. Tentu saja janji politik etis ini membawa dampak yang penting bagi daerah-daerah yang telah cukup lama berada di bawah kekuasaan kolonial. Hal ini perlu juga dikatakan karena ketika abad 20 dimasuki ada daerah yang baru saja dikuasai Belanda dan bahkan masih ada juga kantong-kantong daerah yang belum masuk dalam kekuasaan resmi pax neerlandica. Di daerah-daerah ini dampak positif dari politik etis dalam arti sekolah modern dan sebagainya mulai diperkenalkan barulah terjadi sekian puluh tahun kemudian.

Dampak langsung dari perubahan politik eksploitasi kolonial terjadi di kota-kota. Suasana yang telah mulai hidup di kota-kota kolonial sejak akhir abad 19 dan telah semakin menaik ketika abad 20 dimasuki. Suasana inilah yang terpancar dalam surat-surat Kartini, sang putri Bupati Rembang, kepada kawan-kawannya di negeri

Belanda. Inilah suasana ketika kesadaran akan ketertinggalan dan keterbelakangan mulai dirasakan. Mengapa “orang lain” telah bisa begini dan begitu sedangkan kita tetap seperti dulu juga? Mengapa “orang lain” telah semakin kaya sedangkan masyarakat kita masih berada dalam kemiskinan? Di waktu itu pulalah perlawanan heroik melawan kekuatan yang dianggap “menganiaya” yang dilancarkan dari desa mulai disadari sebagai sikap yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Korban berjatuh, tetapi situasi tetap tidak berubah. “Door duisternis tot light” begitulah editor dari buku kumpulan surat-surat Kartini menamakan bukunya. Demikian pulalah suasana yang ditangkap para pelajar STOVIA ketika mereka mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dengan begini sebuah tanggal simbolik dari suasana zaman telah tersedia ketika sekian generasi kemudian membayangkan kembali suatu zaman yang dianggap awal dari suatu evolusi sosial yang penting.

Dekade pertama abad 20 boleh dikatakan sebagai awal dari the formative period dari sebuah komunitas baru yang kemudian menyebut dirinya “bangsa Indonesia”. Dalam sejarah imperialisme dan kolonialisme masa ini bisa dilihat sebagai dirumuskannya sikap yang berlagak – White Mens’s burden, kata imperialisme Inggris, mission civilisatrice, kata saingannya kolonialis Prancis dan tentu saja Belanda tak ketinggalan dengan mengatakan hasratnya untuk membayar ererchuld, hutang kehormatan. Tetapi bagi masyarakat yang terkena dampak dari hasrat imperialis yang diselubungi dengan kata-kata manis ini awal abad 20 adalah juga saat yang mendebarkan. Apakah arti kemajuan kalau hal ini berarti pengesahan kekuasaan asing? Barangkali situasi abad pertama di Sumatra Barat bisa dipakai sebagai ilustrasi sejarah karena terekam dengan baik.

Perdebatan antara hasrat “kemajuan” dan perlawanan terhadap “ketidakwajaran kekuasaan asing” mulai terjadi sejak awal abad 20. Sejak nomer pertama (1901) sampai dengan nomer terakhir (1904), majalah Insulinde yang terbit di Padang tidak

pernah lupa memperkenalkan makna “kemajuan” dan keharusan memasuki “dunia maju”.<sup>5</sup> Dalam suasana inilah kampanye untuk memasuki dunia pendidikan modern dilancarkan. Tetapi sementara itu di daerah pedesaan keresahan masyarakat semakin menaik karena “kompeni” akan memperkenalkan pajak perseorangan walaupun monopoli kopi dihapuskan. Masalahnya ialah membayar pajak berarti Belanda telah menempatkan dirinya sebagai penguasa, pada hal ketika Perang Paderi telah memasuki babak kedua (1833) ketika batas-batas antara “kaum putih”, para reformasi agama dan “kaum hitam”, pendukung kontinuitas adat kebiasaan lama telah mengabur Gubernur Jenderal mengeluarkan Plakat Panjang (Lange Verklaring). Pernyataan ini antara lain mengatakan bahwa “kompeni” datang bukan untuk memerintah tetapi untuk berdagang. Tetapi kini mengapa “kompeni” melanggar kata-katanya sendiri? Disamping itu permufakatan sesuatu yang fundamental dalam tradisi Minangkabau akan kesediaan membayar pajak juga belum didapatkan. Bujukan orang kota yang ingin “kemajuan” agar masyarakat bersedia membayar pajak dan memakaikan kesempatan bagi kemajuan tidak digubris. Maka pada bualan Maret sampai Juli 1908 pemberontakan yang terpencar-pencar terjadi di berbagai tempat. Masyarakat Minangkabau mengingatkannya sebagai “Perang Kamang”, “Perang Mangopoh” dan “Perang-perang” lainnya. Sekian banyak tentara didatangkan dari Jawa dan sekian banyak pula anak negeri yang tewas dalam pertempuran dan mati di tiang gantungan.<sup>6</sup> Dengan kegagalan ini sebuah tradisi mungkin dipertahankan, tetapi tuntutan masa depan semakin kuat. Tradition of resistance, tradisi perlawanan, mungkin terjaga, tetapi untuk menyelesaikan masa kini hanya tinggal satu alternatif “memasuki dunia

---

<sup>5</sup>Taufik Abdullah, “Modernization in the Minangkabau World: West Sumatra in the Early Decades of the 20 th Century” dalam Claire Holt et.al (eds), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, New York & London: Cornell University Press, 1972.

<sup>6</sup>Taufik Abdullah, “The Anti-tax Rebellions of 1908 in West Sumatra: The Schakel Society in Crisis”, Graciela de la Lama (editor), *Southeast Asia I, 30 th International Congress of Human Sciences in Asia and North Africa*, Mexico: El Colegio de Mexico, 1982, 135-153.

maju". Tetapi bagaimana? Maka sejarahpun mencatat pula bahwa sejak itu kemajuan sosial di Sumatra barat berjalan dengan lancar. Dengan kata lain suasana "kemajuan" semakin meluas di kalangan masyarakat. Tetapi suasana ini tanpa tanggal, tanpa alat pengingat.

20 Mei adalah sebuah tanggal, tetapi bagaimanakah memaknainya? Apakah arti 20 Mei dalam pembentukan "kesadaran bangsa" seandainya sejarah direnungkan kembali? Memang benar ketika itu "bangsa" sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan dan diciptakan, belum lahir, dan benar pula Budi Utomo dengan segera meninggalkan idealisme anak-anak muda karena dengan begitu saja telah menjadi perkumpulan para priyayi. Tetapi ketika organisasi ini lahir sebenarnya sebuah "revolusi", yang tanpa letupan keras, telah terjadi. Kelahiran itu adalah pernyataan akan adanya cara baru dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang luar. Kalau diingat-ingai sudah sejak awal abad 16, sejak Malaka berhasil dikalahkan Portugis, kepulauan Nusantara menghadapi tantangan dari luar yang semakin lama semakin keras tetapi jawab yang diberikan tidak berubah ketika ketidakadilan dan ketidakpantasan telah dirasakan berlebihan maka perlawanan bersenjataupun harus terjadi. Begitulah hampir semua kesatuan politik lokal dengan intensitas yang berbeda-beda biasanya melalui tiga fase corak perlawanan dimulai oleh raja, kemudian ketika raja telah tidak berdaya, dilanjutkan oleh para bangsawan kraton dan para ulama atau guru kebatinan tampil memimpin para petani melawan kekuasaan yang dianggap tidak syah. Sekian banyak kisah kepahlawanan bisa diceritakan dalam setiap fase perlawanan yang terjadi di hampir semua kesatuan politik lokal. Tidak kurang pentingnya keikutsertaan dalam perlawanan itu adalah pantulan dari keharusan sosial dan kepatuhan para pemimpin masyarakat tanpa pilihan pribadi. Tetapi ketika Budi Utomo didirikan dua hal sekaligus terjadi. Pertama Budi Utomo adalah organisasi sukarela modern pertama. Orang masuk atau keluar berdasarkan pilihan sendiri, bukan karena keharusan sosial atau primordial tanpa pilihan aktif. Kedua, masa depan yang cerah haruslah diperjuangkan melalui jalan yang sesuai dengan tuntutan

zaman. Jadi kesadaran akan zaman yang berubah diperkenalkan pula.

Ketika kesadaran pilihan pribadi telah diperkenalkan maka berbagai kemungkinanpun terhampar. Tidak lama kemudian secara bertahap berbagai corak voluntary associatios, organisasi sukarela, pun bermunculan. Di saat cita-cita “kemajuan” telah masuk dalam kesadaran sebagian anggota masyarakat berbagai corak masa depan pun mulai terbayangkan juga. Situasi ini secara bertahap semakin matang di kota-kota kolonial, yang telah semakin tampil sebagai pusat dari berbagai corak jaringan sosial, mulai dari pemerintahan, perekonomian, sampai pendidikan. Melalui berbagai jenis jaringan ini kota-kota yang semula bersifat pluralistik, yang terdiri atas berbagai kelompok “orang asing”, lama kelamaan makin membentuk sebuah corak masyarakat tertentu. Proses ini diperkuat oleh munculnya kebudayaan cetak yang kapitalistik tetapi memberi informasi tentang berbagai hal dan bahkan juga mempersamakan keragaman corak hasrat komunitas yang baru terbentuk itu. Dalam suasana inilah hasrat munculnya komunitas baru yang melebur berbagai keasingan mulai tumbuh. Masa awal proses pembentukan bangsa pun bermula. Boleh dikatakan bahwa pada awal dekade kedua abad 20 proses nation formation telah merupakan salah satu dinamika sosial-politik yang dominan yang akhirnya mencapai puncak simboliknya pada tanggal 28 Oktober 1928.

Kalau pemahaman akan peristiwa sejarah yang empirik mungkin memberikan berbagai pengetahuan dan kearifan dalam menjalankan ujian hari kini dan menghadapi tantangan masa depan, maka renungan akan mitos sejarah bisa juga melontarkan sekian banyak makna dan inspirasi dalam pembentukan dan peneguhan sikap batin. Jika memang demikian halnya bagaimanakah Hari Kebangkitan Nasional sebuah mitos yang didasarkan pada peristiwa sejarah sebaiknya dimaknai sesuai dengan keharusan hari kini?

Hasrat akan “kemajuan” adalah awal dalam konteks kehidupan sosial yang telah bercorak pluralistik. Dari sinilah berbagai hasrat yang

melahirkan sebuah bangsa sehingga akhirnya sebuah negara-bangsa yang berhasrat modern dan maju berhasil pula didirikan. Karena itulah cita-cita awal tentang “kemajuan” ini harus mengalami kontekstualisasi dengan meletakkannya ke dalam alam pikiran yang melatar belakangi terbentuknya negara-bangsa yang bernama Republik Indonesia. Artinya sebaiknya cita-cita yang akhirnya melahirkan mitos “kebangkitan nasional” dikembalikan kepada idealisme bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, sebuah dokumen klasik yang sampai kini ingin dipertahankan. Untuk apakah negara-bangsa ini didirikan? Salah satu hasrat untuk mendirikan negara ini yang erat kaitannya dengan cita-cita “kemajuan” sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD ialah keinginan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya Pembukaan UUD menegaskan pula bahwa hasrat untuk mendirikan negara itu berdasarkan pada pengakuan ke-Esaan yang transendental, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Sekian puluh tahun kemerdekaan telah dicapai dan sekian banyak gelombang zaman dalam pergolakan sejarah telah kita lewati pula. Kini telah pula sepuluh tahun “era reformasi” telah kita lalui, maka timbul juga pertanyaan “Apakah situasi kehidupan bangsa yang kini kita jalani membayangkan sikap dan perilaku yang cerdas? ”. Biarlah masing-masing menjawabnya. Tetapi yang jelas ialah sejak semula era ini dimasuki berbagai kecenderungan yang ingin dihindarkan masih bermain di atas pentas kehidupan bangsa. Bagaimanakah bisa diupayakan betapa lemahnya terasa wibawa dari sistem kepemimpinan bangsa sehingga dengan begitu saja hal sepele bisa menjadi alasan untuk konflik horizontal, bahkan tak pula jarang, vertikal. Dan sekian banyak kelemahan yang menghinggapi kehidupan bangsa masih bisa dikatakan, tetapi kesemuanya membayangkan betapa masih jauhnya “kehidupan bangsa” untuk sampai pada tingkat “cerdas”.

Hari Kebangkitan Nasional” mulai dirayakan 40 tahun setelah peristiwa kelahiran sebuah organisasi modern dilahirkan. Hari itu

dirayakan karena padanya bisa dilekatkan suatu nilai ideologis dalam usaha mengatasi masalah yang dihadapi bangsa yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Begitulah di tahun 1948 sebuah mitos diciptakan tetapi tantangan realitas kekinian dihadapi dengan sikap yang “cerdas”. Ada saatnya berunding dan ada saatnya gerilya harus diteruskan. Ada masanya persatuan bangsa harus diigatkan betapapun harganya, tetapi ada pula masa ketika pengkhianatan harus ditumpas dan ditiadakan. Bagaimanapun juga kemerdekaan bangsa harus tercapai.

Kini, sekian puluh tahun telah berlalu, corak tantangan pun telah pula berubah, tetapi tuntutan akan “kecerdasan” dalam kehidupan bangsa yang bersandarkan pada lima prinsip dasar tidak berubah. “Kecerdasan” ini di satu pihak menuntut sikap yang realitis dan rasional, dengan mempertimbangkan segala aspek yang relevant, terhadap realitas yang mengalir sedemikian cepat. Tetapi dipihak lain, seperti dulu juga, memerlukan landasan nilai integratif dan inspiratif yang kuat dalam kehidupan bangsa. Tidak bisa kita terpukau pada landasan moral dan nilai integratif yang lama ketika situasi masyarakat dan dunia sekitar telah mengalami perubahan. Karena itulah sudah waktunya pula, seperti dulu juga, bangsa memerlukan mitos integratif yang baru. Suasana yang semakin menyesakkan dada memerlukan sesuatu yang lain sebagai penawarnya.

Jadi “ Hari Kebangkitan Nasional “ seyogyanyalah kita jadikan sebagai hari peneguhan “ kehidupan bangsa yang cerdas”. Sikap cerdas adalah sekaligus merupakan landasan ethos penentuan pilihan yang rasional dalam tindakan dan etik sebagai landasan emosional dari pilihan tersebut.

# PASANG – SURUT KOMITMEN KEBANGSAAN : MASA DEPAN PLURALISME DI INDONESIA

Yudi Latif\*

Penanda penting yang mewarnai Kerapatan Besar Pemuda Indonesia ( KBPI) II, 28 Oktober 1928, adalah penggunaan bahasa Melayu (Indonesia) sebagai bahasa utama Kongres. Pilihan ini merupakan lompatan radikal dari KBPI I, dua tahun sebelumnya, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa Utama. Suatu trajektori baru dalam kesadaran nasional, ditandai oleh penarikan batas antara dunia yang terjajah dalam “universum simbolik” sebagai rumah kehidupan (*the house of being*).<sup>1</sup>

Tetapi pemancangan tanda baru ini bukanlah perkara mudah. Bagi para pemuda-pelajar yang terdidik dalam persekolahan dan komunitas epistemik bergaya Eropa penggunaan bahasa Indonesia membawa kesulitan yang serius: menimbulkan kegagalan bagi pembicara dan kebingungan bagi pendengar.

Pengamat resmi dari Belanda, Van der Plas, melaporkan bahwa **Soegondo Djojopoespito** sebagai pemimpin Kongres tak mampu menunaikan tugasnya secara baik:

---

<sup>1</sup>Ketua Harian Pusat Studi Pancasila, Universitas pancasila. Penulis buku “Negara paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila.”

Sejak awal 1920-an, kerinduan kan pemisahan simbolis dengan bahasa kolonial telah bergema di lingkungan aktivis Perhimpunan Indonesia di Belanda, seperti tercermin dalam pernyataan Sunarjo (seorang mahasiswa hukum di Leiden). “Saya merasa jijik dengan apa yang telah diperbuat oleh Belanda dan saya berniat segera pulang ke Tanah akan mencari guru yang bisa membantu memperbaiki bahasa Melayu dan Jawa saya yang sangat terabaikan , karena keduanya dalam kondisi yang sangat menyedihkann.” Lihat latif (2005:256).

***“Pemimpin kongres, pelajar Soegondo, tidak dapat memenuhi tugasnya dan otoritas. Ia mencoba untuk berbicara bahasa Indonesia, tetapi tidak mampu membuktikan dirinya mampu melakukannya dengan baik.”<sup>2</sup>***

Dilaporkan pula, ada penolakan secara diam-diam dari beberapa peserta terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Sedang beberapa yang lain tidaklah menolak, namun tak mampu menggunakannya; hingga akhirnya terpaksa menggunakan bahasa Belanda.<sup>3</sup> Salah seorang dalam kategori terakhir adalah Siti Soendari, perwakilan dari Poetri Indonesia.

Tetapi komitmen kebangsaan membuat hal yang sulit membangkitkan tekad untuk menaklukkannya. Hanya selang dua bulan sejak peristiwa itu, Siti Soendari secara heroik sanggup berpidato dalam bahasa Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928. Ia memulai pidatonya dengan melakukan disclaimer :

***“Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanja kalau kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Djawa. Boekan sekali-kali karena kami hendak merendahkan-rendahkan bahasa ini, atau mengoerang-ngoerangkan harganja. Itoe sekali-kali tidak. Tetapi barang siapa diantara toean jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di kota Djakarta (Betawi), jang diadakan beberapa boelan jang laloe atau setelah membatja poetoesan kerapatan jang terseboet, tentoe masih mengingat akan hasilnja, jaitu hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah***

---

<sup>2</sup> Lihat Foulher (2008: 17).

<sup>3</sup>Salah seorang peserta meminta maaf karena menggunakan bahasa Belanda dan menyatakan penyesalan “bahwa ia sendiri sebagai anak Indonesia tidak bisa berkata dalam bahasa sendiri.” Ini merupakan pertanda kesadaran baru, karena hingga tahun 1928, penggunaan bahasa Belanda dalam konteks nasional tidak pernah menjadi sebab sebuah permintaan maaf (Foulcher, 2008: 19).

*jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoenjoeng bahasa persatoen, bahasa Indonesia. Oleh karena jang terseboet inilah maka kami sebagai poetri Indonesia jang lahir dipoelau Djawa jang indah ini berani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra'jat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelkan oleh poetri Indonesia dan dioentoekan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetri Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja.<sup>4</sup>*

Perubahan dahsyat dalam tempo cepat dari keberanian seorang Siti Soendari menggunakan bahasa Indonesia, dengan melepaskan diri dari bahasa ibunya (Jawa) dan bahasa keduanya—dan juga bahasa intelektualnya (Belanda), merupakan simbol dari kuatnya komitmen kebangsaan baru.

Komitmen menggunakan bahasa baru ini menandai transformasi dari “nasionalisme kultural” (*cultural nationalism*) menuju “nasionalisme politikal” (*political nationalism*).<sup>5</sup> Gerakan-gerakan kebangkitan yang semula terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etno-religius yang bersifat lokal dan fragmentaris,<sup>6</sup> mulai mempertautkan diri ke dalam komunitas politik impian yang

---

<sup>4</sup>Lihat proceeding Kongres perempuan Indonesia dalam Blackburn (2008: 185).

<sup>5</sup>Cultural nationalism adalah suatu konsepsi kebangsaan yang memandang bahwa humanitas secara inheren diorganisasikan ke dalam komunitas historis, yang masing-masing diwarnai oleh kekuatan uniknya tersendiri, yang diekspresikan melalui kekhasan budaya, berbasiskan pada kampung halaman alamiah (naturan homelands) dengan tata-pemerintahannya yang khas. Political nationalism adalah suatu konsepsi kebangsaan atas dasar visi voluntaris pencerahan yang memandang bangsa sebagai komunitas politik dari kehendak bersama (political community of will) yang di bangun atas pembuatan keputusan yang bersifat rasional dari warga negara yang sederajat dan diekspresikan melalui mekanisme negara teritorial. Lihat Hutchinson (2005: 45-46).

<sup>6</sup>Untuk menyebut beberapa contoh dari gerakan-gerakan proto-nasionalis ini, Budi Utomo (1908), Sarekat Islakar Roekoen (1919), Jong Bataks Bond (1925), Sumatranen Bond (1917), Jong Celebs (1918), Jong Minahasa (1918), Sekar Roekoen (1919), Jong Bataks Bond (1925), dan Jong Islamieten Bond (1925).

bersifat lintas-kultural, bernama “Indonesia”.

Pada titik ini, nasionalisme politikal tumbuh melalui proses “sekularisasi”, dalam bentuk demistifikasi ikatan warga dengan simbol-simbol primordialnya. Seturut dengan itu, fantasi inkorporasi baru dihidupkan berdasarkan konsepsi kewargaan yang bersifat teritorial (territorial conception of citizenship), yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darahsama-sama anak negeri terjajah.

Demikianlah, lewat Sumpah Pemuda ini, kaum muda dengan kesadaran baru menerobos kelembaman solidaritas etno-religius melalui “penemuan” politik (the invention of politich). Bukan saja, hingga awal abad ke-20, bahasa Melayu – Indonesia tidak memiliki kata yang spesifik untuk “politik”: tetapi yang lebih penting, pemuda-pelajar pada akhir 1920-an mulai merumuskan konsepsi baru ideologi politik perjuangan. Perjuangan politik untuk menjelmakan suatu nation of citizens yang dapat menyatukan pelbagai keragaman posisi, determinasi dan aliran kultural ke dalam suatu blok nasional (historical bloc).<sup>7</sup>

Komitmen kebangsaan kaum muda ini terbukti tidaklah bertepuksebelah tangan. Menyusul peristiwa Sumpah Pemuda, berbagai organisasi pergerakan dari berbagai latar etnis-keagamaan mulai mengintegrasikan diri ke dalam keindonesiaan dengan membubuhkan kata “Indonesia” dalam namanya. Sarekat Islam bermetamorfosis menjadi Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) pada 1929. Budi Utomo bertransformasi menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1935.

---

<sup>7</sup>Politik dalam kesadaran kaum muda ini jauh dari bahasa teori ‘pilihan rasional’ bahwa rasionlitas kepentingan individual harus dibayar oleh irasionalitas kehidupan kolektif. Politik dalam konsepsi mereka merupakan usaha resolusi atas problem-problem kolektif dengan pemenuhan kebajikan kolektif. Mirip dengan pemahaman Aristotelian, politik dipandang sebagai seni mulia untuk meraih harapan dan memelihara kemashalatan umum, terutama kepentingan kaum terjajah, dengan jalan mensubordinasikan kepentingan-kepentingan partikular pada kepentingan (kaum Terjajah) secara keseluruhan.

Komunitas Protestan mulai mendirikan Partai Kaum Masehi Indonesia (PKMI) pada 1930, disusul kemunculan Federasi Perkumpulan Kristen Indonesia (FPKI) pada 1939. Komunitas Katolik mendirikan Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) pada 1938.<sup>8</sup> Komunitas agama-agama lain seperti Hindu-Budha mempertautkan diri dengan ke-Indonesia melalui keterlibatan anggota-anggotanya dalam berbagai pergerakan dan partai politik yang ada.

Pengikatan bersama komitmen kebangsaan dari berbagai identitas kolekti (etnis, agama, kelas dan jender) ini pada akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya. Sejarah membuktikan, nasionalisme politik Indonesia cukup mampu merajut kepentingan masyarakat plural yang sulit menemukan kehendak bersama.

### **Komitmen Kebangsaan Awal Kemerdekaan**

Tetapi, kemampuan nasionalisme politikal ini baru teruji sebagai kekuatan nasionalisme negatif-defensif, ketika dihadapkan pada keburukan musuh bersama dari luar (penjajahan). Padahal, dengan berlalunya kolonial, proyek kebangsaan Indonesia yang berlandaskan pada penemuan “batas” dan “lawan” dengan kolonial itu tak bisa lagi dipertahankan.

Nasionalisme politikal dituntut merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya. Untuk mempertahankan kehendak bersama dan horizontal comradeship, nasionalisme harus memecahkan masalah-masalah konkrit, yang sumber-sumber masalahnya tidak bisa melulu dialamatkan kepada kejahatan musuh dari luar.

---

<sup>8</sup>Merupakan metamorfosis dari pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD) yang berdiri pada 1923.

Ketika nasionalisme politikal gagal merealisasikan janji-janjinya, maka anasir-anasir nasionalisme kultural akan menguat kembali. Hendaklah disadari pula bahwa kesadaran (*rasionalitas*) nasionalisme politik tidaklah beroperasi dalam suatu tabula rasa, melainkan tumbuh di atas pola-pola ketidaksadaran kolektif terdahulu, yang disebut Carl Gustav Jung sebagai *archetypes*. Yakni berbagai bentuk sumberdaya etno-kumunal seperti imaji, simbol, mitos dan ritual etno-religius yang diwariskan ribuan tahun lamanya.

Berbeda dengan keyakinan utopian kaum modernis yang percaya bahwa sekali negara bangsa terbentuk, negara nasional akan beroperasi sebagai satu kesatuan sosial yang koheren, yang pembangunannya akan diarahkan dari pusat politik. Kenyataannya selalu ada batas sekularisasi, rasionalisasi dan kemampuan negara-nasional untuk memberikan makna dan mempertahankan dominasi terhadap penduduknya.

Bahkan Perancis, sebagai contoh terbaik dari negara sipil (*civic state*), berbasis konsepsi nasion yang bersifat rasional dan voluntaris pada kenyataannya tak bisa sepenuhnya menghabisi simbol-simbol etno-komunal terdahulu. Universalisme dari revolusi Perancis berpijak pada konsepsi etnis terdahulu bahwa Perancis memiliki misi khusus terhadap Eropa, sebagai pewaris peradaban Romawi dan Caroling dan sebagai penjaga terpilih dari Kekristenan Katolik Eropa.<sup>9</sup> Lebih dari itu, meskipun Republik Perancis mengembangkan negara sekular yang tersentralisasi secara kuat, dalam kenyataannya tak pernah mampu untuk mencerabut budaya Katolik yang hidup di tengah-tengah warganya, yang mempertahankan sumber-sumber tandingan terhadap republikan yang berlanjut hingga saat ini.<sup>10</sup>

Perlu juga diingat bahwa perubahan-perubahan alam yang tak terduga-penyakit, kelaparan, kerusakan ekologis, dan pergeseran pola

---

<sup>9</sup>Lihat Armstrong (1982; bab 5)

<sup>10</sup>Lihat Hutchinson (2005: 38)

fertilitas-memiliki dampak disruptif dalam relasi antar penduduk, yang pada gilirannya juga mempengaruhi kemampuan nasionalisme politik. Ketidakmampuan pemerintah Britania untuk mengatasi kelaparan hebat di Irlandia pada pertengahan abad ke 19 menyebabkan alienasi secara permanen orang-orang katolik Irlandia dari pertautannya dengan Britania.

Di dalam ketidakpuasannya terhadap kinerja pemerintahan pusat, dan di dalam kompetisi antar kelompok etno-komunal, kerap kali usaha untuk bertahan hidup diperjuangkan dengan kembali berpaling ke sumber-sumber moral dan politik dari nasionalisme kultural. Dalam pada itu, ketidakmampuan pemerintahan dan elit politik untuk membuat politik bermakna bagi warganya, mendorong mereka berpaling ke simbol dan sentimen etno-komunal dalam rangka memobilisasi dukungan massa.

Situasi inilah yang segera Indonesia alami setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan berlalunya kolonial, *historical bloc* yang dibangun atas dasar nasionalisme negatif-defensif tak bisa lagi dipertahankan. Sementara itu, dalam ketiadaan musuh bersama, komunitas politik kembali ke “normalitasnya”: pluralitas.

Nation building dalam masyarakat plural terbukti merupakan masalah yang pelik. Tidaklah berarti tidak mungkin. Seperti kata Arend Lijphart (1977), adalah mungkin untuk mengembangkan nasionalisme dan pemerintahan demokratis yang stabil dalam masyarakat plural, sejauh elit politiknya mau bekerja sama. Tetapi kesediaan bekerjasama ini hanya bisa dikembangkan jika terdapat kerangka solidaritas baru, berupa kehadiran nasionalisme sipil (*civic nationalisme*). Dalam kenyataannya, nasionalisme sipil yang berbasis kewargaan inklusif (*inclusive citizenship*) dan kebijakan sipil (*the virtue of civility*) ini belumlah berkembang biak di Indonesia pasca – kolonial.

Dalam hal ini, penilaian Edward Shils tentang kecenderungan intelektual di negara-negara berkembang mengandung kadar

kebenarannya:

***Meskipun intelektual di negara-negara terbelakang telah memiliki ide kebangsaan di dalam negerinya sendiri, mereka toh belum bangsa. Hal ini juga memerlukan rasa kemitraan, dan kesediaan untuk berbagi subansi bersama, melampaui kepentingan kelompok, melunakkan dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil, menganggap hal itu sebagai kurang signifikan ketimbang kepentingan komunitas bangsa secara keseluruhan. Dalam kehidupan politik, watak serupa itu membentuk apa yang disebut sebagai kebajikan sivilitas (the virtue of civility). Sayang sekali, kebajikan seperti itu bukan merupakan gambaran umum dari kaum inteligensia-politik di negara-negara tersebut. Yang berkembang di sini adalah suatu kecenderungan padat politisasi (intense politicization) yang disertai oleh keyakinan bahwa hanya mereka yang memiliki kesamaan prinsip dan posisilah yang dianggap sebagai anggota absah dari masyarakat politik (polity). Sedangkan mereka yang berbeda dikucilkan oleh curam hambaran yang terjal.***

Inteligensia-politisi, yang diharapkan membimbing komunitas politik ke arah keadaban politik (***political civility***), pada kenyataannya malah menyuburkan komunalisme. Sebagian karena tak memiliki landasan ekonomi yang kuat, kelompok-kelompok inteligensia-politisi saling bersaing untuk menguasai birokrasi dan ekonomi negara. Dan kehendak untuk mengontrol sumber-sumber daya itu membutuhkan justifikasi sosial. Dalam konteks inilah, kepentingan-kepentingan komunal menjadi dalih yang kuat. Solidaritas etno-komunal kemudian dipolitisasi dalam situasi-situasi konflik yang isu-isu utamanya sering kali adalah kepentingan-kepentingan ekonomi-kekuasaan dari elit politik.

Dengan intensitas politisasi, elite settlement dalam 25 tahun pasca proklamasi sulit diupayakan. Konflik ideologis bersanding dengan ketegangan antara yang disebut Herbert Feith *“solidarity makers” dan “administrators”*, yang tak pernah terpecahkan secara efektif. Sulit menemukan pemimpin yang berusaha mengaitkan tujuan jangka panjang dengan program-program administratif jangka pendek, antara daya tarik ideologis dengan solusi atas problem-problem teknis.<sup>11</sup> Intensitas politisasi dan konflik ideologis yang bersanding dengan snobisme elit politik di tingkat pusat membuat state building terabaikan, yang pada gilirannya menelantarkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sejak 1952, Soekarno telah mengingatkan tentang lima macam krisis yang bisa mematikan kehidupan politik nasional. Pertama, krisis politik, yang membuat banyak orang tidak percaya lagi kepada demokrasi; kedua, krisis alat-alat kekuasaan Negara; ketiga, krisis cara berfikir dan cara meninjau; keempat, krisis moral; kelima, krisis Gejag (kewibawaan otoritas).

Dengan berbagai macam krisis yang melanda pusat politik sebagai pusat teladan, kekecewaan, ketidakpercayaan, dan kekacauan muncul di daerah-daerah pinggiran. Komitmen kebangsaan mengalami ujian berat dari bangkitnya kembali kesadaran nasionalisme kultural dalam bentuk pemberontakan kedaerahan dan keagamaan.

### **Komitmen Kebangsaan Era Orde Baru**

Koreksi Orde Baru atas hal ini dengan menjadikan ekonomi sebagai panglima dalam kerangka pertumbuhan, stabilitas dan dan sentralisasi kekuasaan membawa aneka ketimpangan. Yang paling mencolok, terdapat ketidakselarasan antara watak kenegaraan dan watak kebangsaan. Watak multikultur kebangsaan Indonesia dinafikan

---

<sup>11</sup>Lihat Feith (1962: 34)

oleh watak sentralistik bangun kenegaraan. Ketimpangan antara pusat dan daerah terjadi dengan pengingkaran terhadap hak-hak politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Karena penguasaan kapital oleh segelintir pihak di titik pusat, persebaran kapital yang melicinkan mobilitas vertikal dan horizontal terhambat. Sifat insular negeri kepulauan yang menyulitkan kontak dalam intensitas tinggi tak menemukan jembatan katalisnya.<sup>12</sup>

Dalam ketersendatan lalu lintas pergaulan, masyarakat lebih banyak terkungkung dalam kepompong komunalisme. Dalam situasi demikian, pembicaraan diseputar SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) ditabukan bersanding dengan pemaksaan kebijakan asimilasi, yang melahirkan fenomena “dekulturisasi” bagi etnis tertentu, seperti Tionghoa. Akibatnya, Indonesia sebagai masyarakat plural terkunci dalam situasi “plural monokulturalisme,” terdiri dari banyak etnis yang hidup dalam kepompong budayanya masing-masing dengan keterhambatan proses penyerbukan silang budaya secara alamiah.

Pengikatan komitmen kebangsaan dari jaringan komunalisme ini sekedar bertumpu pada solidaritas emosional yang tersisa dari warisan kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya-keagamaan. Tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena persamaan kepentingan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, komitmen kebangsaan mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan

12 Situasi ini telah lama dirisaukan Bung Hatta. Membandingkan pengalaman Italia (nagri agraris) dan Inggris (nagri Industri) dalam mrngembangkan persatuan nasional, ia temukan bahwa rasa persatuan nasional di Italia lebih rapuh. Menurut Bung Hatta, sifat petani yang terikat hatinya pada tanah menyulitkan mobilitas dan intensitas hubungannya dengan kalangan yang lebih luas. Rasa persatuan nasional secara umum lebih kuat di nagri industri tempat rakyatnya yang memburuh terlepas dari ikatan tanah dan disusun bersatu oleh pabrik dan disiplin kerja. Di sini, mobilitas penduduk tidak dipaksakan, semisal lewat transmigrasi melainkan tumbuh secara suka rela mengikuti pergerakan kapital.

keterkucilan.

Dengan proses belajar kolektif lebih banyak dimediasikan oleh paguyuban yang tertutup, ketimbang oleh asosiasi yang terbuka, universum simbolik yang menyediakan kerangka interpretasi sosial lebih membiaskan gramatika komunalisme. Akibatnya, kekecewaan sosial-ekonomi sering disublimasikan ke dalam sentimen etno-religius. Ketika nasionalisme politik tak banyak memberi makna bagi kehidupan rakyat, terutama di daerah, gramatika komunalisme akan memudahkan rakyat berpaling ke nasionalisme kultural sebagai cara menemukan makna dan harapan.

### **Komitmen Kebangsaan Era Reformasi**

Keterbukaan dan kebebasan ruang publik Orde Reformasi membawa eforia bagi pengekspresian identitas-identitas yang termajinalkan. Usaha membawa ragam ekspresi “plural monokulturalisme” ini ke dalam situasi “multikulturalisme” dengan kesediaan berbeda (*pluralisme*) dan kesediaan bersatu (*kosmopolitanisme*) menuntut adanya kerangka solidaritas baru.

Kerangka solidaritas baru ini harus bertumpu pada premis-premis nasionalisme politik yang berbasis pada rasionalitas, kesukarelaan dan persemakmuran bersama. Pada akhirnya, seperti diisyaratkan John Rawls, sumber persatuan dan komitmen kebangsaan dari negeri multikultural adalah “konsep keadilan bersama (*a share conception of justice*)”. Meskipun suatu masyarakat bangsa terbagi dan pluralistik.....kesepakatan publik atas persoalan-persoalan keadilan sosial dan politik mendukung pesaudaraan sipil dan menjamin ikatan-ikatan asosiasi.<sup>13</sup>

Setelah sepuluh tahun reformasi digulirkan, Indonesia telah menghasilkan banyak perubahan dari segi prosedural, namun

---

<sup>13</sup>Lihat Rawls (1980: 540)

belum membawa kemajuan berarti secara substansial. Padahal, di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambungkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokratis merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi.

Seturut dengan cita-cita republikanisme demokratis, warga negara harus menikmati persamaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya agar kebebasan tidak mengarah pada penguasaan seseorang atau suatu golongan terhadap yang lain. Kebebasan tanpa keadilan hanya membuat tirani berganti wajah, dari wajah bengis militeristik menuju wajah lembut permainan prosedur.

Jika persoalan demokrasi kita adalah defisit keadilan, bukan kebebasan, maka isu utamanya bukanlah pergantian elit dan prosedur politik, melainkan pada kapasitas transformatif dari kekuasaan. Bagaimana mengakhiri gerak sentripetal dari kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak sentrifugal yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Malangnya, pergeseran dari rezim otoritarian menuju demokrasi di Indonesia belum menyentuh aspek ini, sehingga upaya-upaya reformasi belum mampu mewujudkan "*a share conception of justice*".

Lemahnya perwujudan keadilan bersama melemahkan fondasi nasionalisme politik, dalam situasi ketika arus globalisasi kian menguat beriringan dengan gejala revivalisme etno-religius.

Pada ranah negara-bangsa, globalisasi menarik (*pull away*) sebagian dari kedaulatan negara-bangsa dan komunitas lokal untuk diserahkan ke otoritas (maya) global. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu kecil untuk menyelesaikan berbagai masalah global seperti isu perdagangan bebas, terorisme, human trafficking, dan global warning.

Saat yang sama, globalisasi juga menekan negara-bangsa ke bawah, menciptakan tekanan baru bagi otonomi lokal. Negara-bangsa menjadi dirasa terlalu besar untuk menyelesaikan relik-relik masalah di tingkat lokal.

Rongrongan terhadap otoritas negara ini terjadi ketika negara-bangsa Indonesia sedang bertransformasi menuju demokrasi, yang menghendaki penguatan otoritas negara guna merespon meluasnya tuntutan rakyat di dalam negeri. Tanpa pemulihan otoritas negara, transisi menuju demokrasi, seperti yang berlangsung di Indonesia saat ini, kerap kali hanya membuat pendulum sejarah berayun dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Selain implikasi globalisasi, melemahnya otoritas negara ini terutama disebabkan oleh berbagai krisis politik seperti yang pernah dikeluhkan Soekarno pada 1952. Bertahun-tahun pemerintahan demokrasi diperjuangkan dengan keringat dan darah. Tetapi, ketika kesempatan itu diraih, politik tak berkhidmat bagi kepentingan orang banyak; aparaturnya gagal menegakkan hukum dan ketertiban: politisi dan pejabat Negara miskin visi dan wawasan: perilaku politik tercerabut dari moralitas seperti terpisahnya air dengan minyak: adapun orang-orang yang menggenggam otoritas justru berlomba menghancurkan Gejag

Dalam situasi demikian, arus globalisasi yang bersanding dengan lokalisasi membawa paradoks global dalam kehidupan berbangsa. Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi memang menguat. Tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, "politik identitas" (*identity politics*) yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif-etnis, bahasa, agama, bahasa dan bangsa-mengalami gelombang pasang.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik

penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan, melainkan suatu kemungkinan munculnya keyakinan atavistik bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan dan keberlainan (*otherness*).

Tantangan berat terhadap nasionalisme politikal datang dari persenyawaan antara pengekspresian politik identitas yang bersifat trans-nasional dengan revivalisme sentimen kedaerahan. Komitmen kebangsaan bisa dilampaui oleh komitmen etno-komunal yang mendapatkan sumber-sumber moralitas dan idealitasnya dari gerakan-gerakan kebudayaan dan keagamaan trans-nasional.

Dalam situasi seperti itu, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas prinsip dasarnya. Ide sentral dari republikanisme menegaskan bahwa proses demokrasi bisa melayani sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari masyarakat yang makin mengalami ragam perbedaan. Oleh karena itu, tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik (*political recognition*) dan politik pengakuan (*politics of recognition*) yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka kelompok budaya, sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan produktif dalam suatu republik.

Kini, puluhan tahun setelah Sumpah Pemuda, Indonesia masih tetap merupakan proyek kebangsaan yang belum tuntas. Perjuangan Pemuda kerap kali lebih berhasil untuk “menjebol”, tapi belum ampuh untuk “membangun”. Masalahnya, seperti kata Isiah Berlin, “Manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan.

Untuk itu, perlu dihadirkan konsepsi nasionalisme yang lebih positif dan progresif. Nasionalisme yang tidak melulu bersandar pada apa yang bisa kita lawan, melainkan juga pada apa yang bisa kita tawarkan. Nasionalisme sejati haruslah berarti bukan sekedar

mempertahankan melainkan juga memperbaiki keadaan negeri.

Para pendiri bangsa Indonesia sesungguhnya telah mewariskan kepada bangsa suatu kerangka dasar bagi pengembangan nasionalisme progresif. Fondasi dasar ini tertuang dalam "*phiosofische grondslag*", bernama **Pancasila**.

Sebagai filosofische grobdslog, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai dan falsafah perjuangan bangsa. Gagasan Pancasila yang pertama kali dikemukakan secara publik pada 1 Juni 1945 bisa disejajarkan dengan dokumen-dokumen awal dari kelahiran Amerika Serikat, seperti misalnya Federalist Paper yang mengiringi rentetan sejarah semenjak Declaration of Independence, atau pemikiran-pemikiran Montesquieu dan Rousseau bagi kelahiran Perancis sebagai Republik. Di sana ada suatu pergulatan yang terus berjalan, yang kemudian berelasi erat dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, pergerakan Indonesia (termasuk Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Indhische Partij, Sarekat Islam, Taman Siswa dan sebagainya) dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berikut dengan kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Setelah Sumpah Pemuda merumuskan sesuatu yang sifatnya tangible, yaitu mengenai tumpah darah, kebangsaan, dan menunjung bahasa persatuan, maka Pancasila adalah konsekuensi penting dari pergulatan para pendiri bangsa ini. Pada, kenyataannya, sequence ini amat penting bagi bangsa dan negeri Indonesia yang keseluruhannya menjadi pribumi (*native*), bahkan bagi mereka yang menjadi imigran semenjak masa lampau.<sup>14</sup> Beberapa bangsa hidup dengan warna imigran yang kuat, dan beberapa yang lain kesulitan memilih bahasa persatuan. Sequence ini penting juga dengan mempertimbangkan

---

<sup>14</sup>Denys Lombard dan parakitri T. Simbolon (dalam Menjadi Indonesia ) membuat banyak catatan mengenai perjalanan sejarah munculnya "bangsa Indonesia".

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat plural, yang mungkin menjadi satu-satunya bangsa dengan tingkat keragaman yang begitu kaya dan seringkali ekstrem.

Sebagai bangsa multikultural, Negara Indonesia berdasarkan Pancasila adalah negara yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Dalam hal ini Bung Karno mengatakan dalam pidatonya:

***Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua!***

***Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'Gotong-royong.' Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah Negara gotong-royong!"***

Dalam kerangka falsafah gotong royong itu, misi nasionalisme progresif dalam Indonesia merdeka telah diantisipasi dalam kandungan nilai dari masing-masing dan keseluruhan sila Pancasila.

Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, "Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya 'egoisme-agama'....Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari

globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio-nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu.

Dalam prinsip “*sosio-nasionalisme*,” kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia. Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme.”

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif. Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang terjadi di pasar, dengan jalan menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinventasi dalam public good yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu falsafah berbangsa dan bernegara yang begitu visioner dan tahan banting (durable). Sayang sekali, keluasan daya jangkau dan daya jawab Pancasila itu belum banyak dikembangkan dan diamalkan secara jujur dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



**MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 26 Jakarta Pusat 10410  
Telp. (021) 34830033, Fax. (021) 3847975  
Website: [www.museumkebangkitannasional.go.id](http://www.museumkebangkitannasional.go.id)